

SKRIPSI

**PRINSIP LAUT BEBAS (*MARE LIBERUM*) DAN DINAMIKA
KONFLIK VOC-MAKASSAR ABAD XVII**



OLEH

**ABDUL AZIS
NIM. 2220203880230008**

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2026 M/1448 H

**PRINSIP LAUT BEBAS (*MARE LIBERUM*) DAN DINAMIKA
KONFLIK VOC-MAKASSAR ABAD XVII**



OLEH

**ABDUL AZIS
NIM. 2220203880230008**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S. Hum) Pada
Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2026 M/1448 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Prinsip Laut Bebas (*Mare Liberum*) dan Dinamika
Konflik VOC-Makassar Abad XVII

Nama Mahasiswa : Abdul Azis

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203880230008

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
B-1330/In.39/PP.00.9/PPs.05/06/2025

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama
NIP

: Dr. Ahmad Yani, M. Hum. (.....)
: 199406132020121011

Mengetahui:



: Dr. H. Muhiddin, Lc., M. Fil. I.
NIP. 197607132009121002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Prinsip Laut Bebas (*Mare Liberum*) dan Dinamika
Konflik VOC-Makassar Abad XVII

Nama Mahasiswa : Abdul Azis

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203880230008

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
B-1330/In.39/PP.00.9/PPs.05/06/2025

Tanggal Kelulusan : 13 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Ahmad Yani, M. Hum. (Ketua)

Dra. Hasnani Siri, M. Hum. (Anggota)

Saidin Hamzah, M. Hum. (Anggota)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. H. Mubiddin, Lc., M. Fil. I.¹²
NIP. 197607132009121002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis hanjatkan kehadiran Allah SWT. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini yang berjudul “Prinsip Laut Bebas (*Mare Liberum*) dan Dinamika Konflik VOC Makassar Abad XVII.” Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sejarah Peradaban Islam (S. Hum.) pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Suri Teladan Baginda Agung Nabi Muhammad Saw.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, penulis sampaikan kepada Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Abdul Rasyid Amin dan Ibunda Mariana Laibu, yang dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan doa yang tidak pernah terputus, selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah penulis. Terima kasih karena telah menjadi mata untuk melihat, kaki untuk melangkah, serta tangan untuk menggapai bagi penulis. Terima Kasih atas segala pengorbanan, semangat, dan dukungan moril maupun materil yang diberikan selama ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan jerih payah kalian dengan keberkahan dan kesehatan yang melimpah. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan serta mengembangkan kemampuan akademik selama masa perkuliahan.
2. Bapak Dr. Muhiddin, Lc., M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah menciptakan lingkungan akademik yang kondusif sehingga proses pendidikan dapat berjalan dengan baik.

3. Bapak Saidin Hamzah, M.Hum. selaku Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam yang senantiasa memberikan arahan, pembinaan, motivasi, dan semangat kepada seluruh mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani, M.Hum. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, kritik, serta motivasi kepada penulis sejak awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare, khususnya dosen Program Studi Sejarah Peradaban Islam, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan wawasan selama penulis menempuh pendidikan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh tenaga kependidikan di lingkungan rektorat, fakultas, dan program studi atas pelayanan akademik yang diberikan.
6. Saudara-saudari penulis, Rahman dan Azizah, serta seluruh keluarga besar, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, perhatian, dan dukungan tanpa henti sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini.
7. Sahabat-sahabat terbaik penulis, Iming, Takin, Rian, Aksa, Wanda, dan Ima, yang telah menjadi tempat berbagi cerita, memberikan semangat, serta menemani penulis dalam setiap proses perjalanan akademik hingga penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman HM-PS SPI, SEMA FUAD, serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, kerja sama, pengalaman, serta dukungan selama masa perkuliahan.
9. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Kadingeh, yang telah memberikan pengalaman, kebersamaan, serta pelajaran berharga selama

9. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Kadingeh, yang telah memberikan pengalaman, kebersamaan, serta pelajaran berharga selama pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
10. Teman-teman angkatan 2022 Program Studi Sejarah Peradaban Islam, yang telah menjadi rekan belajar, berdiskusi, dan saling berbagi pengalaman selama menjalani proses perkuliahan.
11. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Abdul Azis, yang telah berusaha, bertahan, dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap proses, tantangan, serta keterbatasan selama menempuh pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga setiap usaha yang telah dilakukan menjadi langkah awal menuju perjalanan yang lebih baik di masa mendatang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Sejarah Peradaban Islam, serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Parepare, 15 Juli 2026 M
29 Muharam 1448 H
Penulis,



Abdul Azis
NIM. 2220203880230008

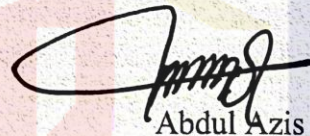
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Abdul Azis
NIM : 2220203880230008
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 22 Desember 2004
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Prinsip Laut Bebas (*Mare Liberum*) dan Dinamika Konflik VOC-Makassar Abad XVII

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Parepare, 15 Juli 2026
Penyusun,



Abdul Azis
NIM. 2220203880230008

ABSTRAK

Abdul Azis. *Prinsip Laut Bebas (Mare Liberum) dan Dinamika Konflik VOC Makassar Abad XVII* (dibimbing oleh Dr. Ahmad Yani, M.Hum.).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *Mare Liberum* dalam kebijakan maritim Kerajaan Gowa-Tallo, proses terjadinya konflik antara Kerajaan Makassar dan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada abad XVII, serta dampaknya terhadap perdagangan maritim, ekonomi, dan kondisi sosial politik. Permasalahan penelitian ini meliputi: (1) bagaimana prinsip *Mare Liberum* menjadi sumber konflik antara VOC dan Makassar; (2) bagaimana proses terjadinya konflik; dan (3) bagaimana dampak konflik terhadap kondisi ekonomi dan sosial politik.

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* dengan pendekatan historis, politik, dan sosial. Metode penelitian yang digunakan meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Analisis penelitian didukung oleh teori *Sea Power* Alfred Thayer Mahan, teori konflik Karl Marx, serta teori perubahan sosial dan politik Max Weber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *Mare Liberum* yang diterapkan Kerajaan Gowa-Tallo bertentangan dengan kebijakan monopoli VOC yang berlandaskan *Mare Clausum*, sehingga menjadi penyebab utama konflik antara kedua pihak. Konflik berkembang dari persaingan perdagangan menjadi konfrontasi politik dan militer yang berpuncak pada Perang Makassar (1666–1669) dan Perjanjian Bongaya 1667. Konflik tersebut mengakhiri sistem perdagangan bebas di Pelabuhan Somba Opu, melemahkan perekonomian Kerajaan Gowa-Tallo, mengubah keseimbangan politik di Sulawesi Selatan, serta mendorong diaspora masyarakat Bugis-Makassar ke berbagai wilayah Nusantara. Meskipun demikian, nilai-nilai kebaharian dan identitas maritim masyarakat Bugis-Makassar tetap bertahan sebagai bagian penting dari sejarah maritim Indonesia.

Kata Kunci: *Mare Liberum*, VOC, Kerajaan Makassar, konflik maritim,

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul	5
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
G. Landasan Teori	17
H. Metode Penelitian.....	22
BAB II PRINSIP MARE LIBERUM DAN KEPENTINGAN MARITIM MAKASSAR	31
A. Kondisi Maritim Makassar Abad XVII.....	31

B. Sistem Perdagangan Kerajaan Gowa–Tallo	37
C. Prinsip Mare Liberum dalam Kebijakan Makassar	41
D. Prinsip Mare Clausum dan Kepentingan VOC	43
E. Benturan Kepentingan Maritim VOC dan Makassar	46
BAB III DINAMIKA KONFLIK VOC DAN MAKASSAR ABAD XVII	51
A. Awal Hubungan Makassar dan VOC	51
B. Ketegangan Perdagangan dan Pelayaran	55
C. Proses Eskalasi Konflik	59
D. Perang Makassar	63
E. Perjanjian Bongaya	66
BAB IV DAMPAK KONFLIK VOC DAN MAKASSAR	70
A. Dampak terhadap Sistem Perdagangan Maritim	70
B. Dampak terhadap Kondisi Ekonomi Makassar	74
C. Dampak terhadap Struktur Sosial Politik	78
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
BIODATA PENULIS	XII

DAFTAR TABEL

No Tabel	Daftar Tabel	Halaman
1	Persamaan Dan Perbedaan Peneliatan	15



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Penetapan Pembimbing	I
2	Surat Keterangan Bebas Pustaka	II
3	Dokumentasi (Foto Arsip)	III
4	Buku Fisik	VII
5	E-Book	VIII
6	Turnitin	XI



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (”).

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A

ا	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وُ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

- c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / يَ	Fathah dan Alif atau ya	A	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	I	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يموت : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 الْحَجُّ : *al-hajj*
 نُعَمُّ : *nu‘ima*
 عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy- syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ

Dīnullah

بِاللَّهِ

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
بدون	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره

جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah Makassar tidak dapat dipisahkan dari sejarah perdagangan di wilayah Kepulauan Indonesia pada khususnya dan Asia Tenggara serta Asia Timur pada umumnya. Berdasarkan interaksi antarpusat perdagangan, Edward, menyatakan bahwa perkembangan Makassar berkaitan dengan perubahan politik dan ekonomi akibat intervensi orang eropa dan dinamika penguasa Kerajaan Makassar (Kesatuan Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo).¹

Perdagangan Makassar sebelum 1800 dibagi menjadi dua periode. *Pertama*, awal pertumbuhan 1490 hingga 1667. Pada masa ini Makassar berada dibawah pengawasan kerajaan kembar Gowa dan Tallo. Kegiatan niaga berpedoman pada politik pintu terbuka yang umum berlaku di Asia Tenggara. Dengan kata lain penguasa Makassar Menganut prinsip *mare liberium* (kebebasan di laut), suatu prinsip yang menjadikan Makassar maju pesat. Dengan demikian Makassar terbuka bagi perdagangan asing atau bandar niaga internasional. *Kedua*, periode dibawah kekuasaan VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) antara 1667-1799. Pada periode ini Makassar terutama difungsikan sebagai pos pengaman untuk mencegah pedagang lain memasuki Maluku.²

Perdagangan Maritim penduduk Sulawesi Selatan berpedoman pada politik pintu terbuka, kebijaksanaan yang umum berlaku di wilayah Asia Tenggara yaitu kebijaksanaan yang membuka bandar bagi pedagang-pedagang asing atau menciptakan bandar niaga internasional. Dalam hal ini diusahakan pengembangan pasar seluas mungkin untuk mendistribusikan produksi atau menjadikannya pelabuhan transit dan dengan cara itu dapat ditingkatkan kekayaan dan kesejahteraan penduduknya. Berkaitan dengan itu pemerintah menganut prinsip *Mare Liberum* (kebebasan laut

¹ Edward L Poelinggomang, Makassar abad XIX: studi tentang kebijakan perdagangan maritim (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002).hlm13

² Edward L Poelinggomang, Makassar Abad XIX: Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim.hlm.14

bebas) agar dapat mengembangkan perdagangan.³ Terkait dengan pemanfaatan laut sebagai sarana kehidupan dan aktivitas manusia, hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam QS Al-Isra'/17:70:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Terjemanaannya:

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.⁴

Keterbukaan Kerajaan Makassar terhadap semua pedagang baik yang mandiri maupun mereka yang mewakili atau melaksanakan kegiatan niaga penguasa, membuka peluang dan memudahkan terjalin hubungan niaga yang baik dengan penguasa pusat perdagangan lain.⁵

Kemajuan yang dicapai Makassar itu ternyata tidak memuaskan pedagang Belanda. Mereka tidak menginginkan pedagang Eropa lainnya berkeliaran di Makassar. Bagi pedagang Belanda, pedagang Eropa lainnya adalah saingan. Belanda, yang menanamkan kekuasannya di Maluku setelah mengusir orang Portugis dan Spanyol, Menyerang perahu-perahu dagang Makassar di dekat perairan Ambon agar dapat Memonopoli rempah-rempah. Penguasa Makassar melaporkan penyerangan itu kepada perwakilan dagang VOC namun tidak digubris.⁶

Pertentangan antara VOC Belanda yang menganut prinsip *mare closum* (kebijakan laut tertutup) dengan Kerajaan Makassar yang menganut prinsip *mare*

3 Edward L Poelinggomang, Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 1, ed. oleh dkk. (Makassar: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, 2004).hlm51

4 Mushaf al-Qur'an (Jakarta: Dharma Karsa Utama, 2015).

5 Edward L Poelinggomang, Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 1.hlm.63

6 Poelinggomang, Makassar abad XIX: studi tentang kebijakan perdagangan maritim.hlm.25

liberium (kebijakan laut bebas) tersebut menimbulkan ketengangan antara kedua belah pihak. Keduanya sama-sama tempramen, VOC memiliki pemimpin yang keras seperti Jan Pieterzoon Coen. Sedangkan Makassar memiliki reputasi sebagai *haentjen van het Oesten* (ayam jantan dari timur). Dengan demikian, puncak dari ketengangan tersebut adalah terjadinya perang Makassar.⁷

Selain itu, dinamika perdagangan maritim Makassar pada abad XVII juga tidak dapat dilepaskan dari peran strategisnya sebagai pusat transit rempah-rempah yang menghubungkan Maluku, Jawa, Kalimantan, dan kawasan Asia lainnya. Posisi geografis Makassar yang berada pada jalur silang pelayaran menjadikan kota ini berkembang sebagai pelabuhan internasional yang ramai. Kebijakan ekonomi Gowa–Tallo yang terbuka terhadap pedagang asing menciptakan struktur ekonomi yang kompetitif dan menjadikan Makassar salah satu pusat perdagangan paling dinamis di Nusantara.⁸

Di sisi lain, upaya VOC memaksakan monopoli rempah di kawasan timur Indonesia meningkatkan ketegangan ekonomi dan politik dengan Kerajaan Makassar. VOC memahami bahwa selama Makassar mempertahankan prinsip *mare liberum*, maka dominasi perdagangan VOC tidak akan terwujud. Karena itu, VOC melakukan tekanan diplomatik, blokade laut, hingga konfrontasi militer untuk membatasi kebebasan pelayaran Makassar. Konflik ini bukan hanya perbedaan ideologi maritim, tetapi juga perebutan kekuasaan ekonomi dan politik di Asia Tenggara.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa dinamika perdagangan maritim di Makassar pada abad XVII tidak dapat dilepaskan dari perbedaan ideologi dan kepentingan ekonomi antara Kerajaan Makassar yang menganut prinsip *mare liberum* dan VOC Belanda yang menganut prinsip *mare clausum*. Pertentangan dua pandangan ini bukan hanya berdampak pada hubungan politik dan ekonomi regional, tetapi juga

7 Ahmad Yani, *Melintasi Rentang Waktu: Eksistensi Masyarakat Bugis-Makassar Pasca Perang Melawan VOC Belanda*, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2024).hlm.7

8 A R Hamid dan A Rifal, *Perkembangan Makassar Menjadi Kota Pelabuhan Dunia Di Jalur Rempah Abad XVII* (Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021).

9 L Mery, *Hukum Laut: Kajian Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia* (Tohar Media, 2024).

turut memengaruhi jalannya sejarah maritim di Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip *mare liberum* diterapkan oleh Kerajaan Makassar serta bagaimana prinsip tersebut berkontribusi terhadap kemajuan perdagangan maritim dan sekaligus memicu konflik dengan kekuatan kolonial Eropa pada abad ke-XVII.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip *Mare Liberum* menjadi sumber konflik antara VOC dan Makassar pada abad XVII?
2. Bagaimana proses terjadinya konflik antara Kerajaan Makassar dan VOC pada abad XVII?
3. Bagaimana konflik antara Makassar dan VOC pada abad XVII mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial politik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana prinsip *Mare Liberum* menjadi sumber konflik antara VOC dan Makassar pada abad XVII.
2. Untuk mengkaji proses terjadinya konflik antara Kerajaan Makassar dan VOC pada abad XVII.
3. Untuk menjelaskan konflik antara Makassar dan VOC pada abad XVII mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial politik.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman konseptual mengenai prinsip *Mare Liberum* sebagai bagian dari hukum laut internasional awal serta relevansinya dalam memicu konflik antara VOC dan Kerajaan Makassar pada abad XVII.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi akademisi dan peneliti selanjutnya yang mengkaji sejarah maritim, serta dinamika konflik antara kekuatan kolonial dan kerajaan-kerajaan lokal di Asia Tenggara.
2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi historis yang lebih komprehensif bagi masyarakat, akademisi, maupun pemerhati sejarah tentang bagaimana perbedaan prinsip penguasaan laut menjadi faktor pemicu konflik VOC Makassar serta dampaknya terhadap ekonomi dan sosial politik pada abad XVII.
- b. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini menjadi sarana pengembangan kemampuan analitis dan metodologis dalam penulisan karya ilmiah sejarah, khususnya yang berkaitan dengan studi konflik kolonial, hukum laut, dan dinamika kekuasaan maritim di Nusantara.

E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam penelitian dan meminimalisir timbulnya kesalahpahaman atas judul penelitian, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari subjudul sebagai berikut:

1. Mare Liberum

Secara etimologis, istilah *Mare Liberum* berasal dari bahasa Latin yang berarti “laut bebas”. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh ahli hukum Belanda Hugo Grotius dalam karyanya *Mare Liberum* (1609), yang menegaskan bahwa laut adalah wilayah bebas dan tidak dapat dimonopoli oleh satu negara tertentu.¹⁰ Gagasan ini muncul sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan monopoli laut yang dilakukan oleh Portugis dan Spanyol dalam menguasai jalur perdagangan di Samudra Hindia. Menurut Grotius, laut merupakan milik bersama umat manusia (*res communis omnium*), sehingga setiap bangsa memiliki hak yang sama untuk berlayar dan berdagang tanpa batasan kekuasaan teritorial negara manapun.¹¹

Dalam konteks Nusantara, konsep *Mare Liberum* menjadi penting ketika dikaitkan dengan praktik perdagangan maritim pada abad ke-17, terutama di wilayah Makassar yang berperan sebagai pelabuhan bebas. Prinsip kebebasan laut ini sejalan

¹⁰ L Mery, Hukum Laut: Kajian Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia.

¹¹ T B Sinaga et al., “Wilayah Negara sebagai Salah Satu Unsur Esensial Negara Menurut Hukum Internasional,” *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 112–24.

dengan perdagangan terbuka yang dikembangkan oleh Kerajaan Gowa-Tallo, di mana semua bangsa diperbolehkan berdagang tanpa diskriminasi. Hal tersebut menjadikan Makassar sebagai pelabuhan internasional yang ramai dan kompetitif. Namun, gagasan *Mare Liberum* kemudian menimbulkan pertentangan dengan kepentingan VOC yang berusaha menerapkan *Mare Clausum* (laut tertutup) untuk memonopoli perdagangan di Asia Timur.¹² Oleh karena itu, dalam penelitian ini istilah *Mare Liberum* dipahami sebagai konsep kebebasan pelayaran dan perdagangan laut yang menjadi landasan filosofis sekaligus sumber konflik ekonomi antara kekuatan lokal Makassar dan kekuasaan kolonial Belanda pada abad ke-17.

2. Dinamika Konflik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinamika diartikan sebagai kekuatan yang menimbulkan gerak, perubahan, atau perkembangan dalam suatu proses sosial.¹³ Adapun konflik merupakan pertentangan antarkelompok atau antaraktor yang dilatarbelakangi oleh perbedaan kepentingan, tujuan, ataupun persepsi terhadap suatu sumber daya. Dengan demikian, dinamika konflik dapat dipahami sebagai keseluruhan perubahan, pergeseran, dan perkembangan yang terjadi dalam hubungan pertentangan tersebut, baik terkait eskalasi, bentuk interaksi, maupun strategi yang digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks sejarah maritim, dinamika konflik sering kali muncul karena perebutan akses terhadap jalur pelayaran, hak dagang, dan legitimasi kekuasaan di kawasan laut.¹⁴

Pada abad XVII, dinamika konflik ini terlihat jelas dalam hubungan antara VOC dan Kesultanan Makassar, ketika perbedaan prinsip mengenai kebebasan laut menjadi pemicu ketegangan. Prinsip *Mare Liberum* yang menekankan kebebasan berlayar dan berdagang bagi semua bangsa bertentangan dengan upaya VOC untuk

12 R Sinaga et al., “Kongsi Dagang Inggris (EIC) dan Belanda (VOC): Pengaruhnya dalam Jaringan Perdagangan Antar Benua,” *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation* 1, no. 2 (2024): 521–28.

13 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

14 M Saraswati et al., “Perspektif Maritim Indonesia Dalam Strategi Diplomasi Dan Konektivitas Jalur Laut,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, no. 10 (2024): 31–41.

memaksakan monopoli rempah melalui pembatasan akses laut. Perbedaan kepentingan tersebut berkembang dari ketegangan diplomatik menjadi persaingan militer, hingga akhirnya berujung pada Perang Makassar. Perubahan posisi politik, strategi pertahanan, dan jaringan pelayaran di kawasan timur Indonesia pada masa itu menunjukkan bahwa dinamika konflik tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh ideologi maritim, kebijakan perdagangan, dan kemampuan suatu kerajaan mempertahankan kedaulatan lautnya.¹⁵

3. Makassar Abad XVII

Makassar dalam konteks ini merujuk pada Kesultanan Gowa-Tallo, sebuah kerajaan maritim yang berpengaruh besar di kawasan timur Nusantara. Pada abad ke-17, Makassar bukan hanya sebuah entitas politik, tetapi juga merupakan pusat perdagangan regional yang menghubungkan jaringan dagang Nusantara dengan pedagang dari Eropa (Portugis, Belanda, Inggris) dan Asia (Cina, India, Arab). Kota pelabuhan Somba Opu dan Ujung Pandang (kini Makassar) menjadi jantung perekonomian dan diplomasi kerajaan.¹⁶

Abad XVII (abad ke-17) merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah Makassar, ditandai dengan puncak kejayaan maritim, intensifikasi perdagangan rempah, serta awal intervensi dan persaingan dagang dengan kongsi dagang Belanda (Vereenigde Oostindische Compagnie). Periode ini juga menjadi saksi transformasi sosial, politik, dan ekonomi Kerajaan Gowa-Tallo, termasuk proses Islamisasi, konflik internal, dan pergeseran kebijakan perdagangan akibat tekanan eksternal, yang berpuncak pada Perang Makassar (1666-1669) dan ditandatangani Perjanjian Bongaya pada tahun 1667.¹⁷ Dengan demikian, frasa Makassar Abad XVII mengacu pada entitas politik, ekonomi, dan sosial-budaya Kesultanan Gowa-Tallo dalam kurun

¹⁵ P Mukhlis et al., *Sejarah Kebudayaan Sulawesi* (Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1995).

¹⁶ Hamid dan Rifal, *Perkembangan Makassar Menjadi Kota Pelabuhan Dunia Di Jalur Rempah Abad XVII*.

¹⁷ Asmunandar Abd. Rahman Hamid, Rifal, "Perkembangan Makassar Menjadi Kota Pelabuhan Dunia di Jalur Rempah Abad XVII," *Jalurrempah*, no. December (2021): 13.

waktu tahun 1600-1699, yang menjadi fokus kajian mengenai interaksinya dengan konsep *Mare Liberum* dan dinamika perdagangan maritim global.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka merupakan suatu usaha untuk menunjukkan sumber-sumber yang terkait dengan judul penelitian. Serta menelusuri tulisan atau penelitian yang relevan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis. Hal ini juga bertujuan untuk menemukan data sebagai bahan perbandingan atau referensi agar data yang dikaji itu lebih jelas.

Penelitian ini mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Pengkajian ini dilakukan dengan tujuan agar terhindar dari penelitian yang sama. Jikapun ada penelitian terdahulu yang sama maka penulis berusaha mempelajari serta memahami untuk mengetahui titik perbedaan agar terhindar dari pelagiat penelitian terdahulu. Pada bagian ini peneliti menyajikan beberapa hasil penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Buku yang ditulis oleh Edward L. Polinggomang yang berjudul “Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim”, penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, tahun 2002.¹⁸ Merupakan karya penting yang mengkaji dinamika perdagangan maritim di Makassar beserta perubahan kebijakan ekonomi-politik yang memengaruhi aktivitas pelayaran di kawasan tersebut. Buku ini menyoroti bagaimana struktur perdagangan, peran pelabuhan Makassar, serta intervensi kekuatan kolonial membentuk arah perkembangan maritim di Sulawesi Selatan. Meskipun fokus utamanya berada pada abad XIX, karya ini memiliki relevansi yang signifikan dengan penelitian penulis karena sama-sama menjelaskan dunia maritim Makassar dan interaksi kekuasaan asing terhadap praktik perdagangan lokal.

Kesamaan antara buku Poellingomang dan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pengaruh kekuatan kolonial terhadap kontrol laut dan

¹⁸ Poellingomang, Makassar abad XIX: studi tentang kebijakan perdagangan maritim.

perdagangan. Namun, penelitian dalam skripsi ini memiliki ruang lingkup waktu yang berbeda, yaitu abad XVII, saat VOC terlibat dalam konflik terbuka dengan Kerajaan Makassar. Jika Poelinggomang menyoroti kebijakan maritim setelah Makassar berada dalam kendali kolonial, penelitian penulis justru mengkaji fase penting sebelum dominasi tersebut, yakni masa ketika Makassar masih berusaha mempertahankan prinsip *Mare Liberum* sebagai dasar kebebasan pelayaran dan perdagangan. Selain itu, fokus penulis lebih menekankan pada aspek konflik, diplomasi, dan pertarungan ideologis antara konsep laut bebas dan monopoli VOC, sedangkan Poelinggomang lebih banyak membahas regulasi ekonomi dan struktur perdagangan pada masa pasca-penaklukan.

Meskipun demikian, buku ini tetap memberikan kontribusi signifikan bagi penelitian penulis, terutama dalam memahami kesinambungan sejarah maritim Makassar dan bagaimana perubahan kebijakan VOC pada abad XIX berasal dari akar konflik sebelumnya. Data historis dan analisis Poelinggomang mengenai relasi antara penguasa lokal dan kolonial juga membantu penulis dalam menempatkan dinamika konflik abad XVII dalam konteks yang lebih luas. Penulis menggunakan buku ini sebagai sumber pendukung untuk menilai perkembangan kebijakan maritim setelah VOC menguasai Makassar, sehingga dapat memperkuat argumentasi mengenai pentingnya prinsip *Mare Liberum* yang menjadi dasar pertentangan pada abad XVII serta dampaknya terhadap konfigurasi kekuasaan di kawasan tersebut.

2. Buku yang ditulis oleh Abdul Rahman Hamid yang berjudul “Sejarah Maritim Indonesia”, penerbit Ombak tahun 2013.¹⁹ Buku ini merupakan karya komprehensif yang mengulas perjalanan sejarah maritim Nusantara sejak awal terbentuknya jalur perdagangan laut di Asia pada abad ke-1 Masehi. Buku ini menjelaskan bagaimana posisi strategis wilayah Indonesia menjadikannya

19 Abdul Rahman Hamid, *Sejarah Maritim Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013).

sebagai pusat interaksi dagang antarbangsa, yang kemudian melahirkan jaringan emporium, pertumbuhan kerajaan-kerajaan maritim yang kuat, serta dinamika penyebaran agama-agama besar. Penulis juga menyoroti perkembangan teknologi perkapalan dan proses transfer pengetahuan yang terjadi sebagai akibat dari hubungan dagang dan kontak budaya antarkawasan. Buku ini menjadi rujukan penting dalam memahami akar-akar peradaban maritim yang membentuk karakter sejarah Indonesia.

Kaitan utama antara buku ini dan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai bangkit dan runtuhnya kekuatan maritim pribumi beserta peran intervensi bangsa asing dalam perebutan jalur pelayaran dan perdagangan. Walaupun buku Hamid membahas sejarah maritim secara luas dan tidak secara khusus menyoroti konflik VOC Makassar abad XVII, konsep yang dibahasnya, terutama mengenai bagaimana kekuatan kolonial berupaya menguasai ruang laut Nusantara, memiliki relevansi langsung dengan penelitian ini. Buku tersebut memberi kerangka pemahaman bahwa perebutan kontrol maritim bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga perebutan dominasi politik dan strategi hegemoni atas jalur perdagangan internasional. Hal ini sangat berhubungan dengan konflik antara Kerajaan Makassar dan VOC yang berakar pada penolakan Makassar terhadap monopoli perdagangan dan pembelaannya terhadap prinsip *Mare Liberum*.

Dengan demikian, buku ini memberikan kontribusi penting bagi penelitian penulis dalam memetakan latar sejarah maritim yang lebih luas yang melingkupi konflik VOC Makassar. Pembahasan Hamid mengenai keruntuhan kekuatan maritim pribumi akibat tekanan kolonial menjadi landasan teoretis untuk memahami mengapa Makassar gigih mempertahankan kebebasan berniaga dan pelayaran. Data historis dan analisis dalam buku tersebut membantu penulis menempatkan konflik abad XVII dalam konteks kontinuitas sejarah maritim Indonesia, sehingga memperkuat argumentasi bahwa

perjuangan Makassar bukan sekadar pertarungan regional, tetapi bagian dari dinamika besar perebutan laut Nusantara oleh kekuatan kolonial.

3. Buku yang ditulis oleh Ahmad Yani dengan judul “Melintasi Rentan Waktu: Eksistensi Masyarakat Bugis-Makassar Pasca Perang Melawan VOC Belanda”, penerbit Rajawali Pres tahun 2024.²⁰ Buku ini menyajikan uraian historis yang mendalam mengenai kehidupan masyarakat Bugis-Makassar setelah berakhirnya Perang Makassar, yang merupakan salah satu konflik paling besar dan paling menentukan bagi VOC di Asia Tenggara. Buku ini menelusuri kondisi masyarakat Bugis-Makassar sebelum konflik, proses terjadinya perang, serta dampak sosial, politik, dan budaya yang muncul setelah penetrasi kekuasaan VOC mulai menguasai ruang-ruang kehidupan di Sulawesi Selatan. Dengan pendekatan historis yang cermat, penulis menjelaskan bagaimana perang tersebut menjadi titik balik yang membentuk lanskap sosial baru bagi masyarakat Bugis-Makassar.

Kaitan buku ini dengan penelitian penulis sangat kuat karena keduanya membahas dinamika konflik antara VOC dan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Namun, buku Ahmad Yani berfokus pada fase pasca perang, yakni bagaimana masyarakat Bugis-Makassar beradaptasi dengan perubahan struktur kekuasaan kolonial setelah kekalahan Makassar dan penandatanganan Perjanjian Bongaya. Sementara itu, penelitian penulis justru menyoroti aspek sebelum dan selama konflik, khususnya pertentangan antara prinsip *Mare Liberum* yang dianut Makassar dan sistem monopoli dagang VOC sebagai pemicu utama perselisihan. Dengan demikian, meskipun ruang lingkupnya berbeda, keduanya saling melengkapi dalam memberikan gambaran utuh tentang bagaimana konflik tersebut berlangsung dan dampak jangka panjangnya.

²⁰ Ahmad Yani, *Melintasi Rentang Waktu: Eksistensi Masyarakat Bugis-Makassar Pasca Perang Melawan VOC Belanda*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2024)

Relevansi buku ini terletak pada kontribusinya dalam memperkuat pemahaman mengenai konsekuensi dari kekalahan Makassar dalam mempertahankan kebebasan pelayaran dan perdagangan di kawasan timur Nusantara. Analisis Ahmad Yani tentang transformasi sosial pasca konflik membantu penulis melihat bahwa perebutan kendali laut bukan hanya berdampak pada dinamika politik dan ekonomi, tetapi juga pada struktur masyarakat, mobilitas kelompok Bugis-Makassar, dan perubahan identitas maritim mereka. Buku ini menjadi rujukan penting untuk memahami kesinambungan sejarah dari konflik VOC Makassar abad XVII yang menjadi fokus penelitian, sekaligus menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan prinsip *Mare Liberum* memiliki implikasi panjang terhadap eksistensi masyarakat di kemudian hari.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hasriana Nur Badriah dalam skripsinya yang berjudul “Prinsip Laut Bebas (*Mare Liberum*) Sultan Alauddin Setelah Masuknya Islam Di Gowa Abad XVI-XVII”. UIN Alauddin Makassar 2021.²¹ Penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana Sultan Alauddin menerapkan prinsip kebebasan laut sebagai bagian dari kebijakan kenegaraan setelah Islam menjadi agama resmi kerajaan. Pembahasannya meliputi konsep *Mare Liberum*, alasan sultan menerapkan prinsip tersebut, dampaknya terhadap hubungan perdagangan internasional, serta posisinya sebagai bentuk perlawanan diplomatik terhadap monopoli VOC. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana prinsip laut bebas difahami dan dipraktikkan penguasa Gowa serta implikasinya terhadap kehidupan politik dan ekonomi kerajaan. Dari segi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah hukum dan sejarah politik karena menganalisis hubungan antara prinsip hukum laut dengan praktik pemerintahan. Penelitian ini memiliki kedekatan langsung

21 H N Badriah, “Kebijakan Laut Bebas (*Mare Liberum*) Sultan Alauddin setelah Masuknya Islam di Gowa Abad XVI–XVII” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021).

dengan penelitian yang sedang dilakukan, namun fokusnya masih terpusat pada sosok Sultan Alauddin dan belum menelusuri pengaruh prinsip laut bebas terhadap dinamika perdagangan Makassar secara keseluruhan.

Kesamaan penelitian Hasriana Nur Badriah dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada fokus keduanya terhadap konsep *Mare Liberum* dalam konteks Kerajaan Gowa. Penelitian tersebut memberikan pemahaman awal tentang bagaimana Sultan Alauddin menerapkan prinsip laut bebas sebagai kebijakan politik untuk menolak monopoli VOC. Hal ini sangat berkaitan dengan penelitian saya, meski penelitian saya meninjau aspek yang lebih luas, yakni pengaruh *Mare Liberum* terhadap dinamika perdagangan maritim Makassar abad XVII secara keseluruhan, bukan hanya pada masa Sultan Alauddin.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Akbar Adam dalam skripsinya yang berjudul “Relevansi Perjanjian Bongaya 1667 Dan Perjanjian Bongaya 1824 Dalam Perdagangan Antara Kerajaan Gowa Dan Belanda (Voc)”. IAIN Parepare Tahun 2025.²² Penelitian ini berfokus pada bagaimana Perjanjian Bongaya 1667 dan 1824 membentuk ulang hubungan politik, sosial, dan ekonomi antara Kerajaan Gowa dan Belanda melalui ketentuan-ketentuan yang memberikan hak monopoli perdagangan kepada VOC, sehingga melemahkan kedaulatan Gowa dan mengubah struktur sosial politik masyarakat Makassar. Kajian ini membahas bentuk serta isi kedua perjanjian, dampaknya terhadap hilangnya kebebasan perdagangan, serta proses integrasi Makassar ke dalam sistem kolonial. Tujuannya adalah menjelaskan bentuk perjanjian serta menganalisis relevansi keduanya terhadap perubahan sosial politik Gowa. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan *library research* dengan pendekatan historis dan sosial politik melalui tahapan heuristik, kritik sumber,

22 A Adam, “Relevansi Perjanjian Bongaya 1667 dan 1824 dalam Perubahan Sosial Politik antara Kerajaan Gowa dan Belanda (VOC)” (IAIN Parepare, 2025).

interpretasi, dan historiografi untuk menelusuri dinamika hubungan Gowa–Belanda serta perubahan struktur kekuasaan yang ditimbulkannya.

Kesamaan penelitian Muh. Akbar Adam dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada sama-sama mengkaji perubahan besar dalam dinamika kekuasaan dan perdagangan di Makassar abad XVII, khususnya bagaimana dominasi VOC membatasi kebebasan dagang dan melemahkan posisi Kerajaan Gowa. Penelitian tersebut memberi gambaran historis mengenai hilangnya kebebasan perdagangan setelah Perjanjian Bongaya, yang relevan dengan kajian saya tentang dinamika maritim Makassar. Namun penelitian saya berfokus lebih spesifik pada peran konsep *Mare Liberum* dalam persaingan pelayaran dan perdagangan, sehingga memperluas analisis yang belum dijangkau dalam penelitian tersebut.

Agar dapat memudahkan untuk memahami perbedaan dan persamaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini, maka akan diuraikan dalam tabel berikut:

No	Nama Peneliti	Judul	Perbedaan	Kesamaan
1.	Edward L. Poelinggomang (2002)	Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim	Buku fokus pada abad XIX dan kondisi setelah Makassar berada di bawah kontrol kolonial sedangkan penelitian yang akan saya lakukan berfokus pada abad XVII dan konflik VOC Makassar terkait prinsip <i>Mare Liberum</i> .	Sama-sama membahas dunia maritim Makassar dan pengaruh kekuasaan kolonial terhadap aktivitas pelayaran serta perdagangan.

2.	Abdul Rahman Hamid (2013)	Sejarah Maritim Indonesia	Buku mencakup sejarah maritim Nusantara secara umum dan luas, tidak khusus pada konflik VOC–Makassar sedangkan penelitian yang akan saya lakukan berfokus pada prinsip laut bebas dan dinamika konflik abad XVII.	Sama-sama membahas sejarah maritim, perkembangan perdagangan laut, dan perebutan kendali pelayaran oleh bangsa asing.
3.	Ahmad Yani (2024)	Melintasi Rentan Waktu: Eksistensi Masyarakat Bugis-Makassar Pasca Perang Melawan VOC Belanda	Buku berfokus pada periode <i>pasca perang</i> Makassar, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan berfokus pada sebab, dinamika, dan konflik yang terjadi sebelum <i>dan</i> selama perang terkait prinsip <i>Mare Liberum</i> .	Sama-sama meneliti VOC dan hubungan kolonial di Sulawesi Selatan dan Membahas dampak perang Makassar terhadap masyarakat dan struktur kekuasaan.
4.	Hasriana Nur Badriah (2021)	Prinsip Laut Bebas (<i>Mare Liberum</i>) Sultan	1. Fokus pada sosok Sulta Alauddin dan peenerapan prinsip <i>Mare Liberum</i>	1. Tema <i>Mare Liberum</i> dan penolakan terhadap monopoli VOC.

		Alauddin Setelah Masuknya Islam di Gow Abad XVI-XVII	sebagai kebijakan kenegaraan. 2. Kurang menulusiri pengaruh prinsip <i>mare liberium</i> terhadap keseluruhan dinamika perdagangan maritim di Makassar.	2. Relevan terhadap kajian hubungan hukum laut dan praktik pemerintahannya.
5.	Muh. Akbar Adam (2025)	Relevansi Perjanjian Bongaya 1667 dan Perjanjian Bongaya 1824 dalam Perdagangan antara Kerajaan Gowa dan Belanda (VOC)	1. Fokuss pada perjanjian Bongaya (1667 dan 1824) dan dampaknya dalam monopoli VOC, hilangnya kebebasan pedangangg, dan perubahan struktur sosial politik. 2. Tidak mengeksplorasi secara mendalam konsep <i>Mare Liberium</i> sebagai prinsip hukum laut.	1. Mengkaji dampak dominasi VOC terhadap kebebasan perdagangan Makassar. 2. Memberikan konteks historiss penting tentang integrasi Makassar ke sistem Kolonial.

G. Landasan Teori

1. Teori Mahan

Alfred Thayer Mahan merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat yang dikenal sebagai pemikir strategis paling berpengaruh dalam sejarah maritim modern. Mahan menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam studi mengenai sejarah kelautan, strategi angkatan laut, serta dinamika kekuatan dunia yang bertumpu pada perdagangan dan pelayaran. Karyanya yang paling monumental, *The Influence of Sea Power upon History* (1890), menjadikan namanya dikenal secara global dan menjadi rujukan utama dalam kajian geopolitik, strategi angkatan laut, serta kebijakan pertahanan berbagai negara. Mahan menilai bahwa lautan bukan hanya ruang fisik, tetapi juga arena strategis yang menentukan keseimbangan kekuasaan dunia. Pandangannya yang mendalam dan analitis menjadikan Mahan sebagai arsitek utama pemikiran modern mengenai dominasi maritim.²³

Teori *Sea Power* yang diperkenalkan Mahan menegaskan bahwa kekuatan maritim adalah faktor penentu kejayaan suatu negara. Dalam pandangannya, negara yang mampu menguasai lautan baik melalui armada militer yang kuat, pelabuhan strategis, maupun jaringan perdagangan maritim akan memiliki keunggulan dalam bidang ekonomi dan pertahanan. Kekuatan maritim tidak hanya sebatas kemampuan tempur angkatan laut, tetapi mencakup keseluruhan potensi kelautan, termasuk armada niaga, industri maritim, dan infrastruktur pelabuhan. Mahan menegaskan bahwa mengabaikan kekuatan laut berarti mengabaikan salah satu sumber kekuasaan utama negara. Sebaliknya, pemberdayaan maksimal kekuatan laut akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan nasional.²⁴ Walaupun teori ini disusun pada akhir abad ke-19, prinsip-prinsipnya dapat ditarik ke belakang untuk menganalisis konteks abad XVII, terutama dalam melihat bagaimana Makassar mempertahankan posisinya

²³Avando Bastari, "Budaya Maritim dalam Perspektif Ketahanan Nasional," Madza Media: Jakarta, 2021.

²⁴L Mulya, "Postur Maritim Indonesia: Pengukuran melalui Teori Mahan," Lembaran Sejarah 10, no. 2 (2013): 127–34.

sebagai pelabuhan internasional yang penting di Asia Tenggara. Dengan menerapkan teori ini, dinamika politik dan perdagangan Makassar dapat dipahami sebagai bagian dari perebutan kekuasaan maritim antara kesultanan lokal dan kekuatan kolonial seperti VOC.

Mahan menguraikan enam aspek utama yang menentukan kekuatan laut suatu bangsa:

1. Letak geografis yaitu posisi strategis negara dalam jalur perdagangan.
2. Bentuk fisik wilayah termasuk kualitas pelabuhan dan garis pantai.
3. Luas wilayah dan sumber daya yang mendukung aktivitas pelayaran.
4. Jumlah penduduk yang mampu menjadi pelaut.
5. Karakter masyarakat, apakah terbuka dan agresif dalam perdagangan
6. Jenis pemerintahan, apakah mendukung ekspansi maritim.²⁵

Dalam konteks Makassar abad XVII, enam aspek ini hampir sepenuhnya terpenuhi. Letaknya yang berada di persimpangan jalur pelayaran Nusantara dan Asia, kondisi pelabuhan Somba Opu yang besar dan aman, serta masyarakat Makassar yang dikenal sebagai pelaut tangguh menjadikan Makassar kekuatan maritim yang diperhitungkan sebelum VOC memaksakan monopoli.

Dengan memahami aspek-aspek Sea Power menurut Mahan, penelitian Prinsip laut Bebas (*Mare Liberum*) dan Dinamika Konflik Makassar Abad XVII dapat menjelaskan bahwa kejayaan Makassar bukan semata karena kebebasan laut (*mare liberum*), tetapi juga karena struktur kekuatan maritimnya yang kuat. VOC menyadari bahwa selama Makassar menguasai aspek-aspek strategis maritim pelabuhan, armada lokal, dan jaringan perdagangan internasional monopoli tidak akan tercapai. Oleh karena itu, konflik Makassar dan VOC dapat dipahami sebagai perebutan *sea power* yang menentukan dominasi ekonomi di kawasan timur Nusantara. Teori Mahan memberikan kerangka analitis untuk melihat bagaimana faktor geografis, sosial, dan

²⁵Umar Harun, "Buku: Politik Kebijakan Poros Maritim," 2020.

politik berperan membentuk dinamika perdagangan maritim Makassar pada abad XVII.

2. Teori Dinamika Konflik

Teori Konflik Karl Marx berangkat dari asumsi bahwa konflik merupakan bagian inheren dari masyarakat, terutama akibat pertentangan kepentingan ekonomi antara kelompok yang memiliki kekuasaan dan kelompok yang dikuasai. Marx menyatakan bahwa struktur ekonomi menentukan struktur politik, hukum, dan sosial. Meskipun Marx berbicara mengenai kelas sosial industri, konsep dasarnya dapat digunakan dalam analisis sejarah, terutama ketika melihat konflik sebagai akibat pertentangan kepentingan ekonomi antarentitas politik.²⁶ Dalam konteks perdagangan maritim abad XVII, teori Marx membantu menjelaskan bagaimana kepentingan ekonomi VOC dan Makassar membentuk dinamika politik dan militer.

VOC berperan sebagai kekuatan kapitalis Eropa yang bertujuan menguasai rantai perdagangan rempah dari produksi hingga distribusi. Untuk mencapai tujuan tersebut, VOC menerapkan monopoli sebagai bentuk kontrol ekonomi. Sementara Makassar, yang posisinya sebagai pelabuhan bebas memungkinkan seluruh pedagang Asia berdagang tanpa pembatasan, memiliki kepentingan ekonomi yang bertolak belakang dengan VOC.²⁷ Dalam perspektif Marx, VOC mewakili kelompok dominan yang berusaha mengendalikan alat produksi dan distribusi, sedangkan Makassar menjadi kelompok yang mempertahankan sistem ekonomi terbuka yang bebas dari monopoli kapitalis.

Konflik Makassar dan VOC pada pertengahan abad XVII dapat dipahami sebagai konflik struktural yang didorong oleh perebutan nilai ekonomi strategis. Laut dan perdagangan rempah menjadi “alat produksi” penting yang menghubungkan kekuatan-kekuatan regional dan global. VOC yang memiliki teknologi, modal, dan

²⁶ A Prayogi et al., “Konsep Konflik dan Teori Konflik Sosial dalam Pemikiran Karl Marx,” *SiNORA* 1, no. 1 (2025): 1–11.

²⁷ R Hasim, “Dari Monopoli Hingga Pelabuhan Bebas: Aktivitas Perdagangan di Karesidenan Ternate 1854–1930,” *SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities* 3, no. 2 (2019): 151–79.

kekuatan militer berusaha mempertahankan dominasinya dengan menciptakan struktur ketergantungan dan ketidaksetaraan. Makassar menolak struktur tersebut karena mengancam kedaulatan ekonomi dan politiknya. Dengan demikian, konflik bukan hanya bersifat militer, tetapi merupakan ekspresi dari pertentangan ekonomi yang lebih dalam.

Penerapan teori konflik Marx dalam penelitian Prinsip laut Bebas (*Mare Liberum*) dan Dinamika Konflik Makassar Abad XVII memungkinkan peneliti melihat bahwa dinamika perdagangan tidak dapat dipisahkan dari pertentangan kepentingan ekonomi dan kelas antaraktor politik. VOC menggunakan kekuatan kapitalis dan militer untuk mendominasi pasar dan jalur laut, sementara Makassar mempertahankan kebebasan navigasi demi menjaga struktur ekonominya yang inklusif. Konflik ini menunjukkan bahwa perubahan ekonomi maritim abad XVII adalah hasil dari proses dominasi, resistensi, dan negosiasi kepentingan antarentitas yang memiliki posisi berbeda dalam sistem ekonomi global.

3. Perubahan Sosial dan Politik

Perubahan sosial secara definisi ialah transformasi yang signifikan dalam struktur dan fungsi masyarakat, mencakup perubahan dalam norma, nilai, hubungan sosial, dan institusi. Menurut Max Weber bahwa perubahan sosial terjadi karena pergeseran menuju rasionalisasi, di mana masyarakat bergerak dari cara berpikir tradisional dan emosional ke cara berpikir yang lebih rasional dan sistematis. Weber juga menekankan pentingnya peran agama, khususnya Protestanisme, dalam mempengaruhi perkembangan kapitalisme dan perubahan sosial.²⁸

Transformasi dalam norma dan nilai sering kali mengubah cara pandang masyarakat terhadap berbagai isu, termasuk pandangan tentang gender, etika kerja, dan hak asasi manusia. Teori ini menjelaskan bahwa norma yang dulunya menempatkan

²⁸ Lorentius Goa, "Perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat," SAPA: Jurnal Kateketik Dan Pastoral 2, no. 2 (2017): 53–67.

budaya dalam peran domestik kini bergeser menuju kesetaraan gender di banyak negara.

Perubahan sosial juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perkembangan teknologi, ekonomi, politik, dan budaya. Revolusi industri, misalnya, membawa perubahan besar dalam struktur ekonomi dan sosial dengan memindahkan fokus dari agrikultur ke industri dan urbanisasi. Globalisasi telah membawa dampak besar pada hubungan antarbangsa, mempengaruhi budaya, ekonomi, dan politik di seluruh dunia.²⁹ Perubahan sosial tidak selalu mulus; sering kali disertai dengan resistensi dan konflik ketika kelompok-kelompok tertentu berusaha mempertahankan status quo. Perubahan sosial bisa bersifat evolusioner atau revolusioner. Perubahan evolusioner terjadi secara bertahap dan lambat, sering kali melalui reformasi dalam sistem yang ada.³⁰ Sebaliknya, perubahan revolusioner biasanya cepat dan dramatis, sering kali melibatkan konflik besar atau revolusi yang menggantikan struktur sosial dan politik yang ada dengan yang baru.

Teori perubahan politik menjelaskan bagaimana dan mengapa transformasi terjadi dalam sistem politik suatu negara atau masyarakat. Perubahan politik dapat mencakup pergeseran dalam kekuasaan, struktur pemerintahan, dan kebijakan publik.³¹ Beberapa teori utama yang menganalisis perubahan politik adalah teori revolusi, teori demokratisasi, teori institusional, teori agen dan struktur, serta teori kekuasaan. Teori revolusi, seperti yang diusulkan oleh Crane Brinton, mengidentifikasi pola umum dalam perubahan radikal yang seringkali diawali oleh ketidakpuasan luas terhadap rezim yang berkuasa, yang kemudian memicu konflik dan perubahan drastis dalam tatanan politik.

29 S Akib et al., *Pengantar Ilmu Sosial: Memahami Masyarakat dalam Dinamika Perubahan* (Seval Literindo Kreasi, 2025).

30 Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration* (Cambridge: Polity Press, 2021).

31 Asih Wastuti dan Sunny Ummul Firdaus, "Reformasi Pemerintahan dan Peran Politik Hukum dalam Membentuk Kebijakan Publik," *Sovereignty* 2, no. 4 (2023): 408–16.

Menurut Samuel Huntington yang menjelaskan proses transisi dari rezim otoriter ke demokrasi, yang biasanya melibatkan liberalisasi politik, pembangunan institusi demokratis, dan konsolidasi demokrasi.³² Politik dan pentingnya aturan, norma, dan organisasi dalam mempengaruhi perilaku politik dan menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Perubahan dalam institusi politik dapat membawa dampak signifikan pada bagaimana kekuasaan dijalankan dan kebijakan dibentuk. Teori perubahan politik ini menjelaskan bahwa interaksi antara individu atau kelompok yang berperan aktif dalam perubahan politik (agen) dan kondisi atau institusi yang mempengaruhi perilaku politik (struktur). Agen yang berhasil memobilisasi sumber daya dan dukungan dapat mengubah struktur yang ada dan membawa perubahan politik yang signifikan.³³

Teori perubahan sosial dan politik relevan untuk memahami konflik VOC Makassar abad XVII karena pertentangan tersebut mencerminkan pergeseran nilai dan struktur kekuasaan di dunia maritim. Prinsip laut bebas Makassar berbenturan dengan pola monopoli VOC yang rasional dan kapitalistik, sebagaimana dijelaskan Weber. Benturan antara agen perubahan (VOC) dan kekuatan lokal (Makassar) menunjukkan bahwa konflik ini bukan hanya soal perdagangan, tetapi transformasi besar dalam sistem ekonomi, norma, dan kekuasaan di kawasan tersebut.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang menggunakan jenis penelitian *Library Research* (penelitian pustaka). Dimana cara pengumpulan datanya dengan membaca atau menganalisis buku-buku, jurna, skripsi, media internet serta literatur naskah yang telah ditransliterasi atau diterjemahkan yang erat kaitannya dengan

³² Ken Plummer, *Sociology: A Global Introduction* (Harlow: Pearson Education Limited, 2022).

³³ S P Varma, *Teori Politik Modern* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021).

masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitiannya. Dari hasil bacaan tersebut akan ditulis atau dirangkum dalam bentuk tulisan, baik berupa kutipan langsung atau ikhtisar penulis. Sehingga dapat diketahui bagaimana peristiwa dan perubahan yang terjadi pada abad XVII, terutama terkait konsep *Mare Liberum* serta pengaruhnya terhadap kegiatan perdagangan di Makassar. Melalui kajian ini, kita dapat memahami bagaimana kebebasan laut, hubungan dagang, dan persaingan antara Kerajaan Gowa dan VOC membentuk perkembangan perdagangan maritim di wilayah Makassar pada masa tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Historis

Pengertian yang lebih komprehensif, sejarah adalah “kisah dan peristiwa masa lampau umat manusia”. Menurut Kuntowijoyo peristiwa sejarah itu mencakup segala yang dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami oleh manusia.³⁴ Pendekatan historis ini digunakan untuk mengenali fakta-fakta serta menyusun kesimpulan mengenai kejadian-kejadian penting pada masa lalu. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut membantu peneliti memahami dinamika perdagangan maritim di Makassar abad XVII, khususnya terkait konsep *Mare Liberum* dan bagaimana kebebasan laut memengaruhi hubungan dagang, politik, serta persaingan antara Kerajaan Gowa dan VOC.

b. Pendekatan Politik

Politik merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana kekuasaan dibentuk dan dibagi dalam masyarakat, termasuk proses pengambilan keputusan di dalam suatu negara.³⁵ Dalam dinamika politik, kepemimpinan sering

34 Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2011).hlm.1

35 D R Rahayu, “Dampak Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz terhadap Perkembangan Sosial Politik Islam (99–101 H / 717–720 M)” (IAIN Parepare, 2020).

dipandang sebagai faktor penentu karena menjadi tolok ukur dalam melihat arah kebijakan yang diambil.³⁶ Oleh karena itu, penulis menggunakan pendekatan politik untuk memahami bagaimana kekuasaan berfungsi, bagaimana hukum dikembangkan, serta bagaimana kebijakan-kebijakan tertentu ditetapkan oleh penguasa. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut membantu menjelaskan bagaimana kebijakan politik, seperti keputusan Kerajaan Gowa atau VOC terkait pelayaran dan perdagangan, berpengaruh terhadap penerapan konsep *Mare Liberum* serta dinamika perdagangan maritim di Makassar pada abad XVII.

c. Pendekatan Sosial

Pendekatan sosial digunakan untuk membantu memahami berbagai proses sosial yang berkaitan dengan hubungan sebab-akibat antara pergerakan sosial dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Weber menjelaskan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang berupaya memahami masyarakat serta perubahan-perubahan di dalamnya.³⁷ Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap bagaimana kondisi sosial masyarakat Makassar pada abad XVII dipengaruhi oleh aktivitas pelayaran, interaksi antarpedagang, dan kebijakan politik yang berkembang. Dengan demikian, pendekatan sosial dapat menjelaskan bagaimana dinamika perdagangan maritim dan konsep *Mare Liberum* turut membentuk perubahan struktur sosial, termasuk hubungan antar kelompok masyarakat, baik di wilayah Makassar maupun dalam interaksinya dengan kekuatan asing seperti VOC.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam studi kepustakaan (library study) melibatkan pencarian dan analisis terhadap sumber-sumber informasi yang ada dalam bentuk literatur, jurnal ilmiah, buku, laporan riset, dokumen resmi, dan materi lain yang

³⁶ Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam.hlm.19

³⁷ Baharuddin, Pengantar Sosiologi (Sanabil, 2021).hlm.11

relevan dengan topik penelitian.³⁸ Adapun teknik dalam pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Heuristik

Heuristik atau teknik mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang terkait dengan penelitian. Penentuan sumber sejarah akan mempengaruhi tempat, dimana, siapa dan cara menemukan sumber-sumber tersebut. Penulis mengumpulkan sumber-sumber dari artikel, buku, jurnal, skripsi, tesis maupun sumber informasi di internet yang relevan dengan penelitian ini.

Berdasarkan kajian penulis terdapat beberapa rujukan buku yang terkait dengan *Mare Liberum* dan Dinamika Perdagangan Maritim Di Makassar Abad XVII, yaitu Edward L. Polinggomang, “Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim” Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, 2002. Ahmad Yani, “Melintasi Rentang Waktu: Eksistensi Masyarakat Bugis-Makassar Pasca Perang Melawan VOC Belanda” Penerbit Rajawali Pres, 2024. Abdul Rahman Hamid, “Sejarah Maritim Indonesia” Penerbit Ombak, 2013.

Pada tahap ini penulis mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian ini.

b. Verifikasi/ Kritik Sumber

Setelah sumber data dikumpulkan dalam teknik pengumpulan data, tahapan selanjutnya adalah verifikasi atau kritik sumber. Tahap ini dilakukan untuk menguji kredibilitas dan orientasi agar memperoleh sumber data yang dapat dipercaya keabsahannya. Verifikasi itu terdapat dua macam yaitu:

1) Autentitas

Autentitas sumber ini minial diuji berdasarkan lima pertanyaan yaitu, kapan sumber dibuat, dimana sumber dibuat, siapa yang membuat, dari bahan apa

³⁸ Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif) (Jakarta: GP Press, 2018).

sumber dibuat, dan apakah sumber itu dalam bentuk asli. Jika data yang ditemukan dalam bentuk naskah lokal, maka data tersebut harus diteliti baik kertasnya, tintanya, gaya tulisannya, kalimatnya, ungkapannya, hurupnya dan seluruh tampilannya.³⁹

Analisis buku “Makasaar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim”

Keaslian Buku	Asli
Penerbit	Kepustakaan Populer Gramedia, 2002.
Fisik buku	Dicetak dengan format buku modern, sampul softcover, kertas putih dengan tulisan cetak jelas dan nyaman dibaca, mengikuti standar penerbit nasional.
Nama Penulis	Edward L. Polinggomang
Latar Belakang Penulis	Buku ini disusun oleh Edward L. Polinggomang, ia merupakan dosen sekaligus sejarawan yang mengajar di UNHAS dan juga Universitas Negeri Makassar

Analisis Buku “Melintasi Rentang Waktu: Eksistensi Masyarakat Bugis-Makassar Pasca Perang Melawan VOC Belanda”

Keaslian Buku	Asli
---------------	------

39 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013).

Penerbit	Penerbit Rajawali Pres, 2024
Fisik Buku	Sampul buku yang menarik dan susunan isi buku yang rapih dan mudah dipahami.
Nama Penulis	Ahmad Yani
Latar Belakang Penulis	Ahmad Yani merupakan seorang pendidik yang saat ini mengajar di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare, ia memiliki pengalaman yang luas dalam bidang sejarah dan telah banyak memberikan kontribusi dalam penelitian sejarah.

Analisis Buku “Sejarah Maritim Indonesia”

Keaslian Buku	Asli
Penerbit	Ombak, 2013
Fisik Buku	Sampul berdesain akademik dengan ilustrasi bertema maritim. Tulisan tersusun rapi, menggunakan kertas putih modern dan layout yang mudah dibaca.
Nama Penulis	Abdul Rahman Hamid

Latar Belakang Penulis	Abdul Rahman Hamid adalah akademisi dan peneliti sejarah yang banyak menulis mengenai sejarah maritim Indonesia. Ia aktif meneliti dinamika perdagangan, pelayaran, serta perkembangan sosial budaya masyarakat pesisir.
------------------------	--

2) Kredibilitas

Ketika sudah menemukan bahwa data itu autentik, maka akan diteliti apakah dokumen tersebut dapat dipercaya agar tidak terjadi kekeliruan dalam sumber informasi. Dalam buku berjudul “Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim” karya Edward L. Polinggomang merupakan hasil penelitian sejarah yang berfokus pada dinamika kebijakan maritim dan perdagangan di Makassar pada abad ke-19. Buku ini disusun berdasarkan sumber-sumber arsip kolonial, dokumen resmi, serta kajian literatur ilmiah, sehingga data yang disajikan memiliki dasar yang kuat. Sebagai sejarawan yang banyak menulis tentang sejarah Sulawesi Selatan, Polinggomang dikenal memiliki otoritas ilmiah dalam bidang sejarah maritim dan kolonial. Hal ini menjadikan bukunya kredibel untuk dijadikan rujukan, terutama dalam menjelaskan konteks kebijakan perdagangan dan hubungan Makassar dengan kekuatan kolonial pada masa tersebut.

Buku kedua, “Sejarah Maritim Indonesia” karya Abdul Rahman Hamid, juga memiliki tingkat kredibilitas tinggi karena disusun melalui penelitian mendalam mengenai perkembangan dunia maritim Nusantara. Hamid merupakan akademisi dan peneliti yang berfokus pada sejarah sosial dan

maritim, sehingga setiap pembahasan dalam bukunya didukung oleh data historis yang relevan. Buku ini membahas ruang lingkup yang cukup luas, mulai dari aktivitas pelayaran, perdagangan antarwilayah, hingga perkembangan budaya bahari di Indonesia, menjadikannya sumber yang kaya untuk memahami dinamika maritim dalam perspektif nasional. Penggunaan sumber primer, literatur akademik, serta pendekatan sejarah menjadikan karya ini dapat dipercaya sebagai referensi ilmiah.

Dengan demikian, kedua buku tersebut memenuhi unsur kredibilitas karena ditulis oleh peneliti yang kompeten, menggunakan metode ilmiah, dan didukung oleh sumber yang dapat diverifikasi. Kedua sumber ini sangat relevan untuk kajian yang berkaitan dengan sejarah perdagangan dan kemaritiman, khususnya dalam konteks Indonesia dan kawasan timur Nusantara.

c. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran sejarah terhadap data melalui analisis. Interpretasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan data guna menyingkap peristiwa-peristiwa mana yang terjadi dalam waktu yang bersamaan.⁴⁰ Jadi, tahap interpretasi dilakukan untuk menganalisis peristiwa serta kausalitas dalam sejarah. Dalam tahap ini, digunakan dua metode sebagai berikut:

- 1) Metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini penelitian yang berjudul “*Mare Liberum* Dan Dinamika Perdagangan Maritim Di Makassar Abad XVII” akan dikemukakan dahulu tiap-tiap sumbernya kemudian menarik kesimpulan.
- 2) Metode deduktif, yaitu berangkat dari teori-teori yang bersifat umum untuk menjelaskan kejadian-kejadian yang bersifat khusus. Dalam hal ini peneliti

40 Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam.hlm.114

akan memulai gambaran umum tentang kerajaan Makassar lalu mengakhiri dengan gambaran yang bersifat khusus.

- 3) Metode komparatif, yaitu menganalisis dengan membandingkan data atau pendapat ahli antara satu dengan yang lainnya, kemudian menarik sebuah kesimpulan.

d. Historiografi

Secara etimologi, historiografi berasal dari bahasa Yunani yaitu *historia* dan *grafein*. *Historia* berarti menyelidiki tentang gejala alam fisik (*physicalresearch*) sedangkan, *grafein* berarti gambaran, likisan, tulisan atau uraian (*discription*). Dengan demikian, historiografi dapat diartikan sebagai uraian atau tulisan tentang hasil penelitian mengenai gejala alam.⁴¹

Jenis Historiografi dalam penulisan ini adalah termasuk dalam historiografi modern karena menggunakan metode penelitian. Historiografi merupakan tahap akhir dalam rangkaian metode penelitian sejarah. Dengan merekonstruksi data dari sumber-sumber yang telah diseleksi lalu dituangkan dalam bentuk tulisan sejarah atau laporan hasil penelitian sejarah. Tahap akhir ini akan menyajikan hasil penelitian tentang “*Mare Liberum* Dan Dinamika Perdagangan Maritim Di Makassar Abad XVII” dengan menggunakan teknik deskripsi, narasi dan analisis.

41 H Sulasman dan M Hum, “Metodologi penelitian sejarah,” Bandung: Pustaka Setia, 2014.hlm.147

BAB II

PRINSIP MARE LIBERUM DAN KEPENTINGAN MARITIM MAKASSAR

A. Kondisi Maritim Makassar Abad XVII

Pada abad ke-17, Makassar tidak hanya berkembang sebagai sebuah pelabuhan, tetapi juga menjadi pusat aktivitas maritim yang sangat penting di kawasan timur Nusantara. Perkembangan tersebut didukung oleh letak geografisnya yang strategis serta kondisi iklim yang menguntungkan bagi aktivitas pelayaran. Pada masa itu, pelayaran masih sangat bergantung pada pola angin muson, sehingga para pedagang dan pelaut membutuhkan pelabuhan yang aman sebagai tempat singgah sambil menunggu perubahan arah angin. Kapal-kapal yang berlayar ke arah timur memanfaatkan angin muson barat, sedangkan perjalanan kembali ke arah barat dilakukan dengan memanfaatkan angin muson timur. Dalam konteks tersebut, Selat Makassar yang berada di antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi memiliki peran penting sebagai jalur utama pelayaran. Posisi ini menjadikan Makassar sebagai tempat persinggahan yang strategis sekaligus titik pertemuan berbagai kapal dagang yang berlayar menuju maupun kembali dari pusat-pusat perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku.⁴²

Perkembangan aktivitas perdagangan di pesisir Makassar berlangsung seiring dengan dinamika ekonomi Asia Tenggara pada abad ke-16 hingga ke-17 yang oleh sejarawan Anthony Reid disebut sebagai *Age of Commerce* atau Kurun Niaga. Periode ini ditandai oleh meningkatnya aktivitas perdagangan internasional yang dipengaruhi oleh besarnya peredaran perak di pasar global. Tingginya permintaan dari pasar Eropa dan Tiongkok terhadap komoditas rempah-rempah mendorong pertumbuhan jaringan perdagangan di berbagai wilayah Asia Tenggara. Dalam situasi tersebut, Kerajaan Makassar mampu memanfaatkan peluang yang muncul dengan mengembangkan

⁴² Tini Suryaningsi, Balai Arkeologi, dan Sulawesi Selatan, “Perdagangan Maritim Di Makassar Abad Xvi- Xvii” 12, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.36869/wjsb.v12i2.232>.

peranannya sebagai pusat perdagangan regional. Upaya tersebut diwujudkan melalui pembangunan sarana pelabuhan, penguatan sistem perdagangan, serta penyusunan kebijakan yang mendukung keamanan dan kelancaran aktivitas niaga. Berbagai langkah tersebut mendorong transformasi kawasan pesisir Makassar dari permukiman yang sebelumnya berskala lokal menjadi kota pelabuhan yang memiliki peranan penting dalam jaringan perdagangan internasional.⁴³

Kekuatan maritim Makassar pada abad ke-17 didukung oleh sistem pemerintahan yang mampu menciptakan stabilitas politik. Salah satu faktor utamanya adalah terbentuknya persatuan politik antara Kerajaan Gowa dan Tallo yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan. Hubungan kedua kerajaan tersebut dipertegas melalui semboyan "*Rua Karaeng Se're Ata*" yang berarti "dua raja, satu rakyat," sebagai simbol kesatuan kepemimpinan dan kerja sama dalam menjalankan pemerintahan. Stabilitas politik yang tercipta memungkinkan kerajaan mengurangi potensi konflik internal yang sering terjadi di berbagai kerajaan lain di Nusantara. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi pemerintah untuk memusatkan perhatian dan sumber daya pada penguatan armada laut serta pengembangan sektor maritim. Melalui kebijakan tersebut, Kerajaan Gowa-Tallo berhasil memperkuat posisinya sebagai kekuatan maritim sekaligus memperluas pengaruh ekonomi di kawasan timur Nusantara.⁴⁴

Pelabuhan Somba Opu menjadi pusat kegiatan ekonomi Kerajaan Gowa pada abad ke-17. Pelabuhan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat kapal berlabuh, tetapi juga berkembang menjadi kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan benteng, pasar, dan pusat pemerintahan. Di sekitar istana dan pasar Somba Opu, pemerintah Kerajaan Gowa menyediakan permukiman bagi para pedagang dari berbagai daerah, seperti Kampung Melayu, Kampung Wajo, dan permukiman bagi pedagang Eropa. Penataan

43 Anthony Reid, "Southeast Asia in the age of commerce 1450--1680: Volume 2: Expansion and crisis," New Haven and London, 1993. h.62-64

44 Aulia Fitriana, "Makassar Sebagai Kota Maritim," Makassar sebagai Kota Maritim, 2017.h.12-15

kawasan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan di Pelabuhan Somba Opu telah dikelola secara teratur. Untuk mendukung kelancaran perdagangan, pemerintah membentuk sistem kesyahbandaran dan mengangkat syahbandar sebagai pejabat yang bertanggung jawab mengelola aktivitas pelabuhan. Syahbandar bertugas mengurus administrasi kapal, mengawasi penimbangan barang, serta menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara para pedagang. Melalui sistem tersebut, keamanan dan kelancaran kegiatan perdagangan di Pelabuhan Somba Opu dapat terjaga dengan baik.⁴⁵

Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas perdagangan di Somba Opu juga dipengaruhi oleh jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Setelah menguasai Malaka, Portugis menerapkan sistem monopoli perdagangan dan kebijakan perpajakan yang memberatkan para pedagang. Kondisi tersebut mendorong banyak saudagar, terutama pedagang Muslim dari Melayu, Arab, dan India, untuk mencari pelabuhan lain yang lebih mendukung kegiatan perdagangan mereka. Situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh penguasa Makassar melalui pemberian jaminan keamanan serta hak kepada para pedagang pendatang untuk mengelola komunitas mereka sendiri. Kebijakan tersebut menciptakan suasana perdagangan yang lebih terbuka dan mendorong semakin banyak pedagang memilih Makassar sebagai pusat kegiatan niaga, sehingga jalur perdagangan di kawasan Asia secara bertahap bergeser menuju Makassar.⁴⁶

Sebagai pelabuhan transit, Makassar memperoleh keuntungan karena aktivitas perdagangannya tidak bergantung pada satu jenis komoditas saja. Pelabuhan ini berkembang sebagai pusat pertukaran berbagai barang dagangan dari berbagai wilayah. Para pedagang dari wilayah barat membawa komoditas seperti kain sutra dari India, porselen dari Tiongkok, dan perak untuk diperdagangkan di Makassar. Sebagai

45 I Nyoman Siryayasa dan M Syahrul Yasin, "Pelabuhan, Perdagangan dan Ekonomi: Makassar dalam Kurun Niaga di Asia Tenggara," *Pelabuhan, Perdagangan Dan Ekonomi: Makassar Dalam Kurun Niaga Di Asia Tenggara* 3, no. 2 (2019): 88–97.

46 Siryayasa dan Yasin. *Pelabuhan, Perdagangan dan Ekonomi: Makassar dalam Kurun Niaga di Asia Tenggara*, h.92

imbalannya, mereka memperoleh cengkih dan pala dari Maluku, kayu cendana dari Timor, serta beras dari pedalaman Sulawesi. Untuk mendukung kegiatan perdagangan tersebut, pemerintah Kerajaan Gowa menerapkan kebijakan bea pelabuhan yang relatif rendah dan jelas, sehingga menarik lebih banyak pedagang untuk singgah di Makassar. Tingginya aktivitas perdagangan dan banyaknya barang yang keluar masuk melalui Pelabuhan Somba Opu kemudian menjadi salah satu sumber utama pendapatan Kerajaan Gowa.⁴⁷

Perkembangan perdagangan di Makassar didukung oleh kemampuan masyarakat Bugis dan Makassar dalam bidang pelayaran dan teknologi perkapalan. Mereka memiliki keahlian membangun kapal-kapal besar, salah satunya kapal padewakang, yang mampu mengangkut muatan dalam jumlah besar serta digunakan untuk pelayaran jarak jauh. Selain itu, para pelaut Bugis dan Makassar juga menguasai teknik navigasi tradisional dengan memanfaatkan posisi bintang sebagai penunjuk arah. Kemampuan tersebut memungkinkan mereka menjalin hubungan perdagangan dengan berbagai wilayah, mulai dari Semenanjung Malaya hingga pesisir utara Australia yang dikenal dengan sebutan Marege, terutama dalam kegiatan perdagangan dan pencarian teripang.⁴⁸

Bagi masyarakat pesisir Sulawesi Selatan, laut tidak hanya dipandang sebagai batas yang memisahkan antarwilayah, tetapi juga sebagai jalur yang menghubungkan berbagai daerah dan mendukung interaksi antarmasyarakat. Oleh karena itu, aktivitas pelayaran tidak hanya berfungsi sebagai sarana perdagangan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam hubungan sosial dan politik. Melalui jalur pelayaran, Kerajaan Gowa menjalin kerja sama politik, membangun persekutuan militer, serta mempererat hubungan kekerabatan melalui perkawinan dengan keluarga bangsawan di Bima,

47 Abd. Rahman Hamid, Rifal, "Perkembangan Makassar Menjadi Kota Pelabuhan Dunia di Jalur Rempah Abad XVII.", h.55-57

48 Andi Muhammad Akhmar, Fathu Rahman, dan Hidayatullah Yunus, "Budaya maritim orang Bugis Makassar dan arah transformasinya," Jurnal Ilmu Budaya 12, no. 1 (2024): 146–60.

Sumbawa, dan Kalimantan. Jaringan hubungan tersebut turut memperkuat pengaruh politik Kerajaan Gowa di kawasan timur Nusantara.⁴⁹

Penguatan kekuatan maritim Kerajaan Gowa juga didukung oleh peran Mangkubumi Karaeng Pattingalloang sebagai tokoh penting dalam pemerintahan. Sebagai pejabat kerajaan, ia mendorong pengelolaan pemerintahan yang lebih teratur dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Karaeng Pattingalloang mempelajari berbagai bahasa asing, seperti Portugis, Spanyol, dan Latin, sehingga dapat memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari Eropa. Ia juga mengumpulkan berbagai buku, peta, dan peralatan ilmiah sebagai sumber informasi bagi kerajaan. Pengetahuan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung penyusunan kebijakan pemerintahan, memperkuat pertahanan, serta mengembangkan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain.⁵⁰

Dengan dukungan tersebut, para penguasa Gowa-Tallo, mulai dari Sultan Alauddin hingga Sultan Hasanuddin, menerapkan kebijakan perdagangan yang terbuka bagi pedagang dari berbagai negara. Pemerintah kerajaan memberikan jaminan keamanan terhadap pedagang asing beserta harta benda mereka selama mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, kerajaan tidak memberikan hak monopoli kepada satu kelompok atau negara tertentu dalam kegiatan perdagangan. Kebijakan tersebut mendorong berkembangnya aktivitas perdagangan di Makassar dan menjadikan pelabuhan ini sebagai salah satu pusat perdagangan yang ramai dan terbuka di Asia pada masa itu.⁵¹

Kebijakan perdagangan Kerajaan Gowa yang terbuka sejalan dengan prinsip kebebasan berlayar dan berdagang yang menolak praktik monopoli di laut. Oleh karena itu, ketika VOC berusaha membatasi perdagangan Makassar dengan Maluku untuk

49 Akhmar, Rahman, dan Yunus. *Budaya maritim orang Bugis Makassar dan arah transformasinya*, h. 50

50 Leonard Y Andaya, "Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17, terj," Nurhadi Simorok. Makassar: Inninawa, 2004. h.43-45

51 Abd. Rahman Hamid, Rifal, "Perkembangan Makassar Menjadi Kota Pelabuhan Dunia di Jalur Rempah Abad XVII", h.60

mempertahankan monopoli rempah-rempah, pemerintah Kerajaan Gowa menolak kebijakan tersebut. Perbedaan kepentingan antara Kerajaan Gowa yang mempertahankan kebebasan perdagangan dan VOC yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah kemudian menjadi salah satu penyebab terjadinya Perang Makassar. Konflik tersebut mencerminkan upaya Kerajaan Gowa untuk mempertahankan kedaulatan serta kebebasan perdagangan di wilayah kekuasaannya.⁵²

Kondisi tersebut dapat dianalisis melalui Teori Sea Power Alfred Thayer Mahan yang menekankan bahwa kekuatan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuannya menguasai aspek-aspek maritim, seperti letak geografis, pelabuhan, armada pelayaran, perdagangan, karakter masyarakat bahari, dan kebijakan pemerintah. Dalam konteks Makassar abad XVII, Kerajaan Gowa-Tallo memenuhi unsur-unsur tersebut melalui posisi strategis di jalur pelayaran internasional, keberadaan Pelabuhan Somba Opu sebagai pusat perdagangan, tradisi pelayaran masyarakat Bugis-Makassar, serta kebijakan perdagangan terbuka yang didukung stabilitas politik kerajaan. Dengan demikian, kejayaan maritim Makassar bukan hanya disebabkan oleh letak geografisnya, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memanfaatkan potensi maritim sebagai sumber kekuatan politik dan ekonomi. Kondisi inilah yang menjadikan Makassar sebagai kekuatan maritim yang mampu mengendalikan jaringan perdagangan di kawasan timur Nusantara sekaligus menjadi pesaing utama VOC. Oleh sebab itu, upaya VOC untuk memaksakan monopoli perdagangan dapat dipahami sebagai usaha merebut dominasi sea power Makassar, sehingga pertentangan antara kedua pihak tidak hanya berkaitan dengan perdagangan rempah-rempah, tetapi juga merupakan persaingan dalam menguasai kekuatan maritim di Asia Tenggara.

52 Justus M van der Kroef dan G J Resink, "Indonesia's History Between the Myths: Essays in Legal History and Historical Theory," Pacific Affairs, 1968, <https://doi.org/10.2307/2754590>.

B. Sistem Perdagangan Kerajaan Gowa–Tallo

Pada abad ke-17, Kerajaan Gowa–Tallo menerapkan sistem perdagangan yang berlandaskan pada keterbukaan dan kebebasan berdagang. Kebijakan ini berbeda dengan praktik perdagangan yang diterapkan oleh negara-negara Eropa, yang pada umumnya menjalankan sistem monopoli. Dengan memanfaatkan letak Makassar yang strategis, pemerintah kerajaan membuka pelabuhan bagi para pedagang dari berbagai wilayah tanpa memberikan hak istimewa kepada kelompok tertentu. Melalui kebijakan tersebut, Makassar berkembang menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan berbagai jalur perdagangan di Nusantara dengan jaringan perdagangan internasional.⁵³

Kebijakan perdagangan terbuka yang diterapkan Kerajaan Gowa–Tallo pada abad ke-17 bukanlah kebijakan yang muncul secara tiba-tiba ataupun merupakan adopsi langsung dari konsep *Mare Liberum* yang diperkenalkan Hugo Grotius pada tahun 1609. Tradisi perdagangan bebas di Makassar telah berkembang sejak pertengahan abad ke-16, terutama pada masa pemerintahan Tumapa'risi' Kallonna (1510–1546) yang membangun Pelabuhan Somba Opu sebagai pusat perdagangan dan membuka hubungan dagang dengan berbagai daerah di Nusantara maupun luar Nusantara. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat pada masa Tunipalangga (1546–1565) melalui pembangunan infrastruktur pelabuhan, pengangkatan syahbandar, serta penataan administrasi perdagangan yang memberi ruang bagi para pedagang asing untuk melakukan aktivitas niaga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan telah menjadi bagian dari kebijakan maritim Kerajaan Gowa–Tallo jauh sebelum konsep *Mare Liberum* dirumuskan di Eropa.⁵⁴

Setelah Islam diterima sebagai agama resmi kerajaan pada masa Sultan Alauddin pada tahun 1605, kebijakan perdagangan terbuka tidak mengalami perubahan, tetapi justru memperoleh legitimasi yang lebih kuat melalui nilai-nilai

⁵³ Ilham Daeng Makkelo, “Sejarah Makassar dan Tradisi Literasi,” *Lembaran Sejarah* 15, no. 1 (2020): 30, <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.59523>.

⁵⁴ Mualim Agung Wibawa, *Peranan Kerajaan Gowa Dalam Perniagaan Abad Xvii*, Repository UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011

Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, dan kebebasan dalam bermuamalah.⁵⁵ Dengan demikian, ketika Hugo Grotius menerbitkan *Mare Liberum* pada tahun 1609, praktik perdagangan terbuka telah lama menjadi bagian dari kebijakan maritim Kerajaan Gowa–Tallo. Kesamaan di antara keduanya lebih menunjukkan adanya keselarasan prinsip dalam menjunjung kebebasan pelayaran dan perdagangan daripada adanya hubungan pengaruh secara langsung, karena kebijakan perdagangan bebas di Makassar berkembang berdasarkan tradisi maritim lokal, kebutuhan politik, dan kepentingan ekonomi kerajaan yang telah terbentuk sejak sebelum proses Islamisasi maupun munculnya gagasan *Mare Liberum*.

Sistem perdagangan yang diterapkan Kerajaan Gowa–Tallo tidak didasarkan pada praktik monopoli, tetapi memberikan kesempatan yang sama kepada para pedagang dari berbagai wilayah untuk melakukan aktivitas perdagangan. Kebijakan tersebut mendorong kedatangan pedagang asing dari Portugis, Melayu, Arab, Tiongkok, dan India yang menjadikan Makassar sebagai salah satu pusat kegiatan niaga di kawasan timur Nusantara. Keterbukaan tersebut menciptakan interaksi antarpedagang dari berbagai latar belakang sehingga Makassar berkembang menjadi pelabuhan yang tidak hanya menjadi pusat pertukaran komoditas, tetapi juga menjadi tempat bertemunya berbagai budaya dan pengetahuan.⁵⁶

Pelabuhan Somba Opu menjadi pusat perdagangan Kerajaan Gowa–Tallo pada abad ke-17. Letaknya yang strategis dan didukung oleh benteng pertahanan menjadikan pelabuhan ini berperan penting dalam aktivitas perdagangan dan pelayaran. Selain sebagai tempat berlangsungnya kegiatan perdagangan, Pelabuhan Somba Opu juga menjadi lokasi pertemuan antara pemerintah kerajaan dan para pedagang asing untuk membahas urusan perdagangan maupun hubungan politik. Adanya jaminan keamanan serta kebebasan berdagang dari pemerintah Kerajaan Gowa–Tallo mendorong banyak

⁵⁵Hasriyana Nur Badriyah, “Prinsip Laut Bebas (Mare Liberum) Sultan Alauddin Setelah Masuknya Islam di Gowa Abad XVI-XVII,” 2021, 1–23.

⁵⁶ Heather Sutherland, “Trade, court and company,” *Hof en handel: Aziatische vorsten en de VOC, 1620 1720* (2004): 85–112.

pedagang memilih Makassar sebagai tujuan perdagangan, terutama mereka yang ingin menghindari kebijakan monopoli VOC.⁵⁷

Para penguasa Kerajaan Gowa–Tallo tidak hanya menjalankan tugas sebagai pemimpin pemerintahan, tetapi juga berperan aktif dalam kegiatan perdagangan. Selain menetapkan kebijakan di bidang perdagangan dan mengelola pendapatan kerajaan, mereka turut memiliki kapal dagang serta terlibat dalam aktivitas pelayaran niaga. Tokoh seperti Karaeng Pattingalloang dan Karaeng Karunrung memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan perdagangan sekaligus membangun hubungan dengan para pedagang asing. Keterlibatan para penguasa dalam aktivitas tersebut menunjukkan bahwa kebijakan politik dan kegiatan ekonomi saling berkaitan dalam mendukung perkembangan Kerajaan Gowa–Tallo.⁵⁸

Perkembangan perdagangan di Makassar juga didukung oleh kehadiran para pedagang asing yang menjalankan aktivitas perdagangan di wilayah Kerajaan Gowa–Tallo. Beberapa di antaranya ialah Francisco Viera de Figueiredo dari Portugis serta saudagar Mapule dan Mamet Saphy dari Koromandel. Kehadiran para pedagang tersebut memperluas hubungan dagang Makassar dengan berbagai wilayah di Asia. Melalui jaringan perdagangan yang mereka bangun, berbagai komoditas dari India, Asia Tenggara, hingga Asia Timur dapat diperdagangkan secara berkesinambungan melalui Pelabuhan Makassar.⁵⁹

Komoditas yang diperdagangkan di Makassar sangat beragam. Selain rempah-rempah dari Maluku, seperti cengkih dan pala, pelabuhan ini juga memperdagangkan beras, kayu cendana dari Timor, tekstil dari India, serta berbagai komoditas lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Keragaman komoditas tersebut menunjukkan bahwa Makassar berperan sebagai pusat perdagangan yang menghubungkan berbagai daerah di Nusantara dan kawasan Asia. Kondisi ini membuat perdagangan Kerajaan Gowa–

57 Makkelo, “Sejarah Makassar dan Tradisi Literasi”, h.37

58 Sutherland, “Trade, court and company”, h.88

59 Sutherland. “Trade, court and company”, h.90

Tallo tidak bergantung pada satu jenis komoditas, sehingga kegiatan ekonomi tetap berkembang dan mampu mendukung pertumbuhan perdagangan kerajaan..⁶⁰

Kelancaran kegiatan perdagangan di Kerajaan Gowa–Tallo juga didukung oleh berkembangnya sistem pencatatan dalam pemerintahan. Para penulis istana menyusun berbagai catatan mengenai aktivitas perdagangan, peraturan hukum, dan silsilah kerajaan sebagai bagian dari administrasi pemerintahan. Keberadaan pencatatan tersebut menunjukkan bahwa Kerajaan Gowa–Tallo telah memiliki sistem administrasi yang teratur sehingga mendukung pengelolaan perdagangan dengan lebih baik.⁶¹

Kegiatan perdagangan di Makassar juga didukung oleh sistem kredit yang berlandaskan pada kepercayaan antara para pelaku perdagangan. Para pedagang memberikan barang secara kredit kepada para bangsawan maupun sesama saudagar dengan kesepakatan bahwa pembayaran dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa hubungan perdagangan di Makassar dibangun atas dasar saling percaya, sehingga kegiatan niaga dapat berlangsung secara berkelanjutan.⁶²

Jaringan perdagangan Kerajaan Gowa–Tallo berkembang hingga menjangkau berbagai wilayah, seperti Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Maluku. Perkembangan tersebut didukung oleh armada kapal yang mampu melakukan pelayaran ke berbagai daerah, bahkan mencapai pesisir utara Australia. Luasnya jaringan perdagangan ini semakin memperkuat kedudukan Makassar sebagai salah satu pusat perdagangan di kawasan timur Nusantara. Namun, perkembangan tersebut mulai mengalami hambatan ketika VOC berusaha menerapkan monopoli perdagangan rempah-rempah yang bertentangan dengan kebijakan perdagangan terbuka yang dijalankan oleh Kerajaan Gowa–Tallo.⁶³

60 Anthony Reid, "The Rise of Makassar," *Review of Indonesian and Malayan Affairs* 17 (1983): 117–60, <https://search.informit.org/doi/10.3316/intanmas.42>.

61 Makkelo, "Sejarah Makassar dan Tradisi Literasi", h.37

62 Sutherland, "Trade, court and company", h.91

63 Makkelo, "Sejarah Makassar dan Tradisi Literasi", h.39

Berdasarkan perspektif Hugo Grotius, laut merupakan wilayah bersama (*mare liberum*) yang memberikan hak kepada setiap bangsa untuk berlayar dan berdagang tanpa monopoli. Prinsip tersebut sejalan dengan kebijakan perdagangan terbuka Kerajaan Gowa–Tallo, meskipun berkembang secara mandiri dari tradisi maritim lokal, bukan sebagai adopsi langsung pemikiran Grotius. Sementara itu, menurut Teori *Sea Power* Alfred Thayer Mahan, kemajuan Makassar sebagai pusat perdagangan internasional didukung oleh letak geografis yang strategis, Pelabuhan Somba Opu, armada pelayaran, serta kebijakan pemerintah yang mendukung aktivitas maritim. Kombinasi faktor-faktor tersebut menjadikan Makassar sebagai kekuatan maritim yang mampu menguasai jaringan perdagangan di kawasan timur Nusantara dan menjadi pesaing utama VOC dalam memperebutkan dominasi perdagangan.

C. Prinsip Mare Liberum dalam Kebijakan Makassar

Mare Liberum atau prinsip laut bebas merupakan konsep hukum yang menyatakan bahwa laut tidak dapat dimonopoli oleh satu negara atau kekuatan tertentu. Konsep ini memberikan hak yang sama kepada setiap bangsa untuk melakukan pelayaran dan perdagangan di laut. Meskipun diperkenalkan oleh Hugo Grotius pada tahun 1609, praktik kebebasan berlayar telah dikenal oleh masyarakat maritim di Nusantara. Prinsip tersebut juga tercermin dalam kebijakan perdagangan Kerajaan Gowa–Tallo yang memberikan kebebasan kepada para pedagang untuk melakukan aktivitas niaga di Makassar.⁶⁴

Kebijakan perdagangan terbuka yang diterapkan oleh Kerajaan Gowa–Tallo mencerminkan prinsip kebebasan berlayar dan berdagang di laut. Pemerintah kerajaan menjadikan kebijakan tersebut sebagai bagian penting dalam mengembangkan perekonomian kerajaan. Para pedagang dari berbagai daerah dan negara diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan perdagangan di Pelabuhan Makassar. Pemerintah juga tidak membedakan pedagang berdasarkan asal daerah,

⁶⁴ van der Kroef dan Resink, “Indonesia’s History Between the Myths: Essays in Legal History and Historical Theory”, h.32

agama, maupun latar belakang etnis dalam memberikan akses perdagangan. Kebijakan tersebut mendorong berkembangnya aktivitas perdagangan dan memperkuat kedudukan Makassar sebagai salah satu pusat perdagangan di kawasan timur Nusantara.⁶⁵

Kebijakan perdagangan terbuka yang diterapkan oleh Kerajaan Gowa–Tallo mendorong Makassar berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan maritim di kawasan timur Nusantara yang ramai didatangi oleh pedagang dari berbagai wilayah. Keberhasilan tersebut didukung oleh kebijakan pintu terbuka yang memberikan kebebasan kepada para pedagang untuk melakukan aktivitas perdagangan. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi, tetapi juga mencerminkan pandangan Kerajaan Gowa–Tallo mengenai pentingnya kebebasan berlayar dan berdagang. Bagi penguasa Gowa–Tallo, laut dipandang sebagai ruang bersama yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai bangsa untuk menjalin hubungan perdagangan secara damai.⁶⁶

Kerajaan Gowa–Tallo secara konsisten menolak praktik monopoli perdagangan yang diterapkan oleh pihak asing karena bertentangan dengan kebijakan perdagangan terbuka yang dijalankan kerajaan. Bagi pemerintah Gowa–Tallo, kebebasan berlayar dan berdagang merupakan prinsip penting dalam menjaga kelancaran aktivitas perdagangan di kawasan timur Nusantara. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin, kebijakan tersebut semakin diperkuat seiring dengan berkembangnya Islam sebagai agama resmi kerajaan. Penerimaan Islam tidak hanya membawa perubahan dalam kehidupan keagamaan, tetapi juga memperluas hubungan politik dan perdagangan Kerajaan Gowa–Tallo dengan berbagai kerajaan Islam serta jaringan saudagar Muslim di Nusantara. Melalui hubungan tersebut, posisi Makassar semakin berkembang

65 Makkelo, “Sejarah Makassar dan Tradisi Literasi”, h.30

66 Sutherland, “Trade, court and company”, h.85

sebagai salah satu pusat perdagangan yang menghubungkan berbagai wilayah di kawasan timur Nusantara.⁶⁷

Seiring berkembangnya aktivitas perdagangan, pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, dan kawasan Melayu semakin aktif menjalin hubungan dagang dengan Makassar. Kehadiran mereka tidak hanya memperluas jaringan perdagangan, tetapi juga memperkuat kedudukan Makassar sebagai bandar perdagangan yang menghubungkan berbagai wilayah di Nusantara dan Asia. Kebijakan perdagangan terbuka yang diterapkan oleh Kerajaan Gowa–Tallo turut mendorong peningkatan aktivitas perdagangan dan pelayaran di pelabuhan Makassar. Kondisi tersebut memberikan keuntungan ekonomi bagi kerajaan melalui penerimaan dari bea pelabuhan dan berbagai aktivitas perdagangan, yang kemudian menjadi salah satu sumber pendapatan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan perkembangan kerajaan.⁶⁸

Selain memberikan manfaat ekonomi, kebijakan perdagangan terbuka juga memperkuat hubungan diplomatik Kerajaan Gowa–Tallo dengan berbagai kerajaan dan bangsa asing. Melalui kebijakan tersebut, Makassar berhasil membangun jaringan perdagangan yang luas serta menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai mitra dagang. Kondisi ini memperkuat kedudukan Kerajaan Gowa–Tallo sebagai salah satu kekuatan maritim di kawasan timur Nusantara tanpa bergantung pada kekuatan asing tertentu. Namun, kebijakan perdagangan terbuka yang tetap dipertahankan oleh kerajaan kemudian menimbulkan perbedaan kepentingan dengan VOC yang berupaya menerapkan monopoli perdagangan rempah-rempah.⁶⁹

D. Prinsip Mare Clausum dan Kepentingan VOC

Berbeda dengan Kerajaan Gowa–Tallo yang menerapkan kebijakan perdagangan terbuka, VOC menjalankan kebijakan yang didasarkan pada prinsip *Mare*

⁶⁷ Abd. Rahman Hamid, Rifal, “Perkembangan Makassar Menjadi Kota Pelabuhan Dunia di Jalur Rempah Abad XVII”, h.60

⁶⁸ Andaya, “Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17, terj”, h.63

⁶⁹ Sutherland, “Trade, court and company”, h.88

Clausum atau laut tertutup. Prinsip tersebut menyatakan bahwa suatu negara atau kekuatan politik dapat menguasai wilayah laut tertentu dan mengatur aktivitas pelayaran maupun perdagangan di wilayah tersebut. Berdasarkan prinsip ini, VOC berupaya membatasi kegiatan perdagangan pihak lain sebagai bagian dari kebijakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara.⁷⁰

VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) didirikan pada tahun 1602 sebagai perusahaan dagang Belanda yang memperoleh hak istimewa (*octrooi*) dari pemerintah Belanda untuk menjalankan kegiatan perdagangan di Asia. Melalui hak tersebut, VOC tidak hanya melakukan aktivitas perdagangan, tetapi juga berwenang membuat perjanjian politik, membangun benteng, membentuk angkatan bersenjata, serta menguasai jalur perdagangan sesuai dengan kepentingannya. Dalam menjalankan kebijakan tersebut, VOC berupaya mengendalikan jalur pelayaran yang menghubungkan daerah-daerah penghasil rempah-rempah dengan pasar perdagangan. Oleh karena itu, penguasaan wilayah laut menjadi bagian penting dari strategi VOC. Di Kepulauan Maluku sebagai pusat produksi rempah-rempah, VOC menerapkan sistem monopoli secara ketat untuk mengendalikan produksi, distribusi, dan perdagangan rempah-rempah sesuai dengan kepentingan ekonominya.⁷¹

Sebagai bagian dari kebijakan monopoli perdagangan, VOC mengatur bahwa perdagangan cengkih dan pala hanya dapat dilakukan melalui perusahaan tersebut. Kebijakan ini membatasi para pedagang dari berbagai bangsa untuk memperoleh rempah-rempah secara langsung dari daerah penghasil. Untuk memastikan aturan tersebut berjalan, VOC melaksanakan patroli laut yang dikenal sebagai *Hongitochten* atau Pelayaran Hongi. Dalam pelaksanaannya, patroli tersebut disertai dengan pemusnahan pohon-pohon rempah di wilayah yang tidak mematuhi kebijakan VOC.

⁷⁰ van der Kroef dan Resink, "Indonesia's History Between the Myths: Essays in Legal History and Historical Theory", h.45

⁷¹ Reid, "Southeast Asia in the age of commerce 1450--1680: Volume 2: Expansion and crisis", h.100

Langkah tersebut bertujuan mengendalikan produksi rempah-rempah agar nilainya di pasar Eropa tetap tinggi.⁷²

Dalam pelaksanaan kebijakan monopoli VOC, keberadaan Makassar menjadi salah satu tantangan utama bagi kepentingan perdagangan perusahaan tersebut. Kerajaan Gowa–Tallo tetap mempertahankan kebijakan perdagangan terbuka dengan memberikan akses kepada para pedagang dari berbagai bangsa untuk melakukan kegiatan perdagangan di Pelabuhan Makassar. Kondisi ini memungkinkan pedagang Portugis, Melayu, Inggris, dan kelompok pedagang lainnya tetap memperoleh rempah-rempah melalui jalur perdagangan Makassar tanpa harus mengikuti sistem monopoli yang diterapkan VOC. Akibatnya, upaya VOC untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di kawasan timur Nusantara tidak dapat berjalan sepenuhnya karena Makassar tetap berperan sebagai bandar perdagangan alternatif di luar pengawasan VOC.⁷³

Bagi VOC, kebijakan perdagangan terbuka yang dipertahankan oleh Kerajaan Gowa–Tallo menjadi hambatan dalam mewujudkan monopoli perdagangan rempah-rempah di kawasan timur Nusantara. Selama Makassar tetap membuka pelabuhannya bagi para pedagang dari berbagai bangsa, upaya VOC untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah tidak dapat berjalan sepenuhnya. Oleh karena itu, VOC mulai meningkatkan tekanan terhadap Kerajaan Gowa–Tallo melalui berbagai tindakan militer, termasuk menyerang armada dagang Makassar di perairan Maluku. Selain itu, VOC juga berupaya menghambat jalur perdagangan Makassar agar para pedagang tidak dapat memperoleh rempah-rempah secara langsung dari daerah penghasil. Kebijakan tersebut kemudian memperburuk hubungan antara VOC dan Kerajaan Gowa–Tallo serta menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya konflik di antara keduanya.⁷⁴

72 C R Boxer, “Jan Kompeni Sejarah VOC Dalam Perang dan Damai 1602-1799, terj,” Bakri Siregar, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.h.41

73 Anthony Reid, “Pluralism and progress in seventeenth-century Makassar,” in *Authority and Enterprise* (Brill, 2000), 55–71.

74 Andaya, “Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17, terj.”h.118

E. Benturan Kepentingan Maritim VOC dan Makassar

Konflik antara Kerajaan Gowa–Tallo dan VOC pada abad ke-17 dipengaruhi oleh perbedaan pandangan mengenai pengelolaan perdagangan dan pelayaran. Kerajaan Gowa–Tallo menjalankan kebijakan perdagangan terbuka yang sejalan dengan prinsip kebebasan berlayar (*Mare Liberum*), sehingga para pedagang dari berbagai wilayah dapat melakukan kegiatan perdagangan di Makassar. Sebaliknya, VOC menerapkan kebijakan monopoli untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah di kawasan timur Nusantara. Perbedaan kebijakan tersebut menyebabkan hubungan antara Kerajaan Gowa–Tallo dan VOC semakin tegang hingga akhirnya berkembang menjadi konflik.⁷⁵

Kebijakan perdagangan terbuka yang diterapkan oleh Kerajaan Gowa–Tallo tidak hanya bertujuan meningkatkan kegiatan perdagangan, tetapi juga menjadi salah satu dasar dalam memperkuat perekonomian kerajaan. Keterbukaan pelabuhan Makassar terhadap para pedagang dari berbagai wilayah mendorong berkembangnya jaringan perdagangan dan memperlancar arus komoditas di kawasan timur Nusantara. Melalui aktivitas tersebut, kerajaan memperoleh pendapatan dari bea pelabuhan dan perdagangan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Atas dasar itu, setiap upaya untuk membatasi akses perdagangan dipandang bertentangan dengan kepentingan Kerajaan Gowa–Tallo dan berpotensi menghambat perkembangan ekonominya.⁷⁶

Berbeda dengan Kerajaan Gowa–Tallo, VOC memandang kebijakan perdagangan terbuka di Makassar sebagai hambatan terhadap upaya penguasaan perdagangan rempah-rempah. Keberadaan Makassar sebagai bandar perdagangan yang terbuka memungkinkan para pedagang memperoleh rempah-rempah di luar jaringan monopoli VOC. Akibatnya, pengendalian perdagangan rempah-rempah yang diupayakan VOC menjadi kurang efektif. Atas dasar itu, VOC berusaha memperluas

⁷⁵ Sutherland, “Trade, court and company”, h.96-97

⁷⁶ Abd. Rahman Hamid, Rifal, “Perkembangan Makassar Menjadi Kota Pelabuhan Dunia di Jalur Rempah Abad XVII”, h.60

pengaruhnya di Makassar sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat monopoli perdagangan di kawasan timur Nusantara.⁷⁷

Ketegangan antara Kerajaan Gowa–Tallo dan VOC semakin meningkat ketika VOC mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Makassar. Salah satu tuntutan tersebut adalah agar Kerajaan Gowa–Tallo menghentikan hubungan perdagangan dengan para pedagang Portugis yang telah lama melakukan aktivitas niaga di Makassar. Selain itu, VOC juga meminta agar Makassar tidak lagi memberikan akses perdagangan kepada bangsa-bangsa Eropa lain yang menjadi pesaingnya, seperti Inggris. Tuntutan tersebut merupakan bagian dari upaya VOC untuk memperkuat penguasaan atas perdagangan rempah-rempah dengan membatasi jaringan perdagangan para pesaingnya di kawasan timur Nusantara.⁷⁸

Pemerintah Kerajaan Gowa–Tallo menolak tuntutan VOC untuk menghentikan hubungan perdagangan dengan para pedagang Portugis dan bangsa-bangsa lain yang telah lama berdagang di Makassar. Penolakan tersebut didasarkan pada kebijakan perdagangan terbuka yang menjadi dasar pelaksanaan perdagangan di kerajaan. Bagi Kerajaan Gowa–Tallo, setiap pedagang yang datang untuk melakukan kegiatan perdagangan secara damai berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa membedakan asal negaranya. Oleh karena itu, pemerintah kerajaan tetap mempertahankan kebijakan tersebut dan menolak campur tangan VOC dalam menentukan hubungan perdagangan Makassar dengan pihak lain.⁷⁹

Setelah tuntutannya tidak diterima oleh Kerajaan Gowa–Tallo, VOC mulai mengubah pendekatannya dari jalur diplomasi menjadi tindakan militer. Armada VOC meningkatkan pengawasan di perairan Maluku dengan mencegat kapal-kapal dagang Makassar serta menyita muatan yang dianggap melanggar kebijakan monopoli perdagangan. Tindakan tersebut didasarkan pada klaim VOC bahwa para pedagang

⁷⁷ C R Boxer, “Sejarah VOC dalam perang dan damai 1602-1799.[Edisi Terjemahan],” Jakarta: Sinar Harapan, 1983.h. 42

⁷⁸ Sutherland, “Trade, court and company”,h. 95

⁷⁹ Andaya, “Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17, terj”,h.43-35

Makassar melakukan perdagangan di wilayah yang berada di bawah penguasaannya. Kebijakan ini tidak hanya menghambat aktivitas perdagangan Kerajaan Gowa–Tallo, tetapi juga memperburuk hubungan antara kedua pihak hingga akhirnya berkembang menjadi konflik terbuka.⁸⁰

Melihat bahwa upaya untuk menguasai Makassar melalui tekanan militer belum memberikan hasil yang diharapkan, VOC kemudian menerapkan strategi politik dengan menjalin kerja sama dengan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Kerajaan Gowa–Tallo. Salah satu bentuk kerja sama tersebut dilakukan dengan memberikan dukungan kepada Arung Palakka dari Bone yang pada saat itu memiliki konflik dengan Gowa. Melalui strategi tersebut, VOC berupaya memanfaatkan kondisi politik di Sulawesi Selatan untuk melemahkan kekuatan Kerajaan Gowa–Tallo sebelum melancarkan serangan militer yang lebih besar.⁸¹

Penolakan Kerajaan Gowa–Tallo terhadap kebijakan monopoli VOC menyebabkan hubungan antara kedua pihak berkembang menjadi konflik terbuka. Puncak konflik tersebut terjadi dalam Perang Makassar pada tahun 1666–1669 yang melibatkan Kerajaan Gowa–Tallo dan VOC beserta sekutunya. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Gowa–Tallo mempertahankan Benteng Somba Opu sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas perdagangan. Perlawanan tersebut menunjukkan upaya kerajaan untuk mempertahankan kedaulatan politik serta kebijakan perdagangan terbuka yang telah lama diterapkan di Makassar.⁸²

Meskipun Perang Makassar berakhir dengan kekalahan Kerajaan Gowa–Tallo dan diikuti dengan penandatanganan Perjanjian Bongaya pada tahun 1667, peristiwa tersebut menjadi bagian penting dalam sejarah Sulawesi Selatan. Perang Makassar kemudian direkam dalam berbagai sumber sejarah, salah satunya melalui Syair Perang Mengkasar (Sha'ir Sipelman) karya Encik Amin. Karya tersebut tidak hanya menggambarkan jalannya peperangan, tetapi juga merekam perlawanan Kerajaan

80 Sutherland, "Trade, court and company",h.96

81 Andaya, "Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17, terj",h.120

82 Makkelo, "Sejarah Makassar dan Tradisi Literasi",h.37

Gowa–Tallo dalam mempertahankan kebijakan perdagangan terbuka dan kedaulatan kerajaan di tengah upaya VOC menerapkan monopoli perdagangan.⁸³

Seluruh kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan Makassar sebagai pusat perdagangan maritim pada abad ke-17 merupakan hasil dari perpaduan antara letak geografis yang strategis, kekuatan maritim kerajaan, stabilitas politik, serta kebijakan perdagangan terbuka yang telah berkembang sejak sebelum Islam menjadi agama resmi kerajaan dan terus dipertahankan pada masa Gowa–Tallo. Kebijakan tersebut menjadikan Makassar sebagai bandar internasional yang menghubungkan berbagai jaringan perdagangan di Asia sekaligus memperkuat posisi kerajaan sebagai kekuatan maritim di kawasan timur Nusantara. Karakter perdagangan yang terbuka memiliki kesesuaian dengan prinsip *Mare Liberum* yang dikemukakan Hugo Grotius, meskipun berkembang dari tradisi maritim lokal yang mandiri. Sebaliknya, kebijakan monopoli yang diterapkan VOC melalui prinsip *Mare Clausum* menciptakan pertentangan kepentingan yang semakin memperjelas perbedaan orientasi kedua pihak dalam memandang laut dan perdagangan. Perbedaan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi munculnya ketegangan yang berkembang menjadi konflik terbuka antara Kerajaan Gowa–Tallo dan VOC pada abad ke-17.

Dinamika konflik antara Kerajaan Gowa–Tallo dan VOC dapat dipahami melalui Teori Konflik Karl Marx yang memandang konflik sebagai konsekuensi dari pertentangan kepentingan dalam memperebutkan sumber daya ekonomi dan kekuasaan.⁸⁴ Dalam konteks ini, rempah-rempah, jalur pelayaran, dan pelabuhan menjadi sumber daya strategis yang diperebutkan oleh kedua pihak. Kerajaan Gowa–Tallo mempertahankan sistem perdagangan terbuka sebagai upaya menjaga kedaulatan ekonomi dan keberlangsungan jaringan perdagangan internasional, sedangkan VOC berusaha membangun struktur monopoli untuk mengendalikan produksi, distribusi,

⁸³ “Syair Perang Mengkasar (Shair Sipelman) Karya Entji Amin: Analisis Anakronisme Dan Patronase,” *Basastra: Jurnal Kajian Bahasa Dan Sastra Indonesia* 13, no. 1 SE-Articles (n.d.), <https://doi.org/10.24114/bss.v13i1.56486>.

⁸⁴ Prayogi et al., “Konsep Konflik dan Teori Konflik Sosial dalam Pemikiran Karl Marx.”

dan perdagangan rempah-rempah demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Pertentangan kepentingan tersebut berkembang dari persaingan ekonomi menjadi konflik politik dan militer melalui tekanan diplomatik, blokade pelayaran, hingga Perang Makassar. Dalam perspektif Marx, tindakan VOC menunjukkan upaya kelompok yang memiliki modal dan kekuatan militer untuk menguasai sumber-sumber ekonomi strategis, sedangkan perlawanan Kerajaan Gowa–Tallo merupakan bentuk resistensi terhadap dominasi tersebut. Oleh karena itu, konflik VOC dan Makassar tidak hanya mencerminkan persaingan perdagangan, tetapi juga perebutan kekuasaan atas sistem ekonomi maritim di kawasan timur Nusantara.

Rangkaian peristiwa sejak awal hubungan dagang, meningkatnya ketegangan perdagangan dan pelayaran, eskalasi konflik, Perang Makassar, hingga lahirnya Perjanjian Bongaya menunjukkan perubahan hubungan antara Kerajaan Gowa–Tallo dan VOC dari kerja sama perdagangan menjadi konflik terbuka yang menentukan arah perkembangan sejarah maritim di kawasan timur Nusantara. Konflik tersebut tidak hanya mengakhiri hubungan diplomatik kedua pihak, tetapi juga menjadi titik awal perubahan besar terhadap sistem perdagangan, keseimbangan politik, dan struktur kekuasaan yang akan memberikan dampak luas terhadap kehidupan ekonomi dan sosial politik masyarakat Makassar pada masa berikutnya.

BAB III

DINAMIKA KONFLIK VOC DAN MAKASSAR ABAD XVII

A. Awal Hubungan Makassar dan VOC

Memasuki awal abad ke-17, kondisi perdagangan di Nusantara mengalami perubahan yang cukup besar seiring dengan semakin luasnya pengaruh kongsi-kongsi dagang Eropa, terutama Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Kongsi dagang yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1602 ini dibentuk sebagai respons terhadap ketatnya persaingan perdagangan di Eropa serta kebutuhan untuk memperoleh pasokan rempah-rempah secara langsung dari kepulauan Asia. Pada waktu yang sama, Kerajaan Gowa-Tallo di pesisir barat Sulawesi Selatan sedang berkembang menjadi salah satu kerajaan maritim terbesar yang menguasai jalur pelayaran di kawasan timur Nusantara. Pesatnya perkembangan Makassar juga tidak terlepas dari berlangsungnya "Kurun Niaga" (*Age of Commerce*), sebagaimana dikemukakan oleh Anthony Reid, yaitu masa ketika pertumbuhan ekonomi dunia mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan dan pergerakan modal secara besar-besaran di kawasan Asia Tenggara..⁸⁵

Ketika kapal-kapal VOC pertama kali tiba di Pelabuhan Somba Opu, hubungan antara kedua pihak diawali melalui diplomasi yang bersifat pragmatis. Bagi penguasa Makassar, kehadiran armada VOC hanya dianggap sebagai bagian dari berbagai komunitas pedagang asing yang telah lebih dahulu berdagang di Makassar, seperti pedagang Melayu, Arab, India, Cina, Portugis, dan Inggris. Sistem perdagangan Makassar pada masa Sultan Alauddin menerapkan prinsip keterbukaan, yaitu memberikan kebebasan kepada setiap kapal asing untuk berlabuh, melakukan kegiatan bongkar muat, dan berdagang dengan perlindungan hukum adat kerajaan. Kebijakan pelabuhan terbuka yang bersifat inklusif tersebut menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Gowa-Tallo. Melalui kebijakan ini, kerajaan

⁸⁵ Anthony Reid, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680* Jilid 1: Tanah di Bawah Angin, vol. 1 (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 1992).h.48-45

mampu menjaga keamanan pelayaran sekaligus memperoleh pendapatan yang besar dari bea cukai pelabuhan yang rendah dan dikelola secara terbuka.⁸⁶

Di pihak VOC, kedatangan mereka ke Pelabuhan Somba Opu didorong oleh kepentingan strategis untuk mendukung kelangsungan aktivitas perdagangan di kawasan timur. VOC membutuhkan pangkalan logistik yang mampu menyediakan kebutuhan pangan, terutama beras dari pedalaman Sulawesi dan Jawa, untuk memenuhi kebutuhan serdadu serta wilayah kekuasaannya di Maluku dan Batavia. Selain itu, VOC juga berupaya memperoleh rempah-rempah bernilai tinggi, khususnya cengkeh dari Maluku Utara dan pala dari Kepulauan Banda, yang banyak diperdagangkan di pasar Somba Opu oleh para pelaut dan pedagang perantara dari berbagai wilayah Nusantara. Kepentingan tersebut mendorong kedua pihak untuk menjalin kesepakatan dagang awal yang memberikan izin kepada VOC membeli kebutuhan pokok di pasar Makassar.⁸⁷

Meskipun pada awalnya hubungan diplomatik antara Makassar dan VOC tampak berjalan dengan baik, sebenarnya terdapat perbedaan pandangan yang mendasar di antara keduanya. Kerajaan Gowa-Tallo menjalankan aktivitas maritim berdasarkan keyakinan bahwa laut dan kebebasan berdagang merupakan hak setiap orang yang tidak boleh dikuasai oleh satu kekuatan tertentu. Setelah Islam diterima di Gowa pada awal abad ke-17, prinsip kebebasan pelayaran dan perdagangan (*Mare Liberum*) semakin diperkuat oleh nilai-nilai Islam yang menekankan persamaan hak serta menolak segala bentuk pemaksaan dan diskriminasi di pelabuhan. Sebaliknya, VOC menjalankan sistem perdagangannya berdasarkan kebijakan merkantilisme Eropa yang mengutamakan penguasaan penuh atas jalur perdagangan dan berusaha menyingkirkan para pesaing untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.⁸⁸

86 Hamid, Sejarah Maritim Indonesia.

87 Poelinggomang, Makassar abad XIX: studi tentang kebijakan perdagangan maritim.h.30-32

88 Hasriyana Nur Badriyah, "Prinsip Laut Bebas (*Mare Liberum*) Sultan Alauddin Setelah Masuknya Islam di Gowa Abad XVI-XVII."

Ketegangan mulai muncul ketika VOC menyadari bahwa sistem perdagangan terbuka di Pelabuhan Somba Opu menjadi hambatan utama bagi upaya mereka untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Pedagang asing yang menjadi pesaing VOC, terutama Portugis dan Inggris, memperoleh kesempatan yang sama untuk berdagang di Makassar sehingga dapat membeli rempah-rempah dalam jumlah besar dan membawanya langsung ke Eropa maupun India. Kehadiran para pedagang tersebut di bawah perlindungan Kerajaan Gowa-Tallo membuat harga rempah-rempah di pasar internasional tetap bersaing. Kondisi ini menghambat upaya VOC untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan mereka di Belanda. Oleh karena itu, VOC memandang sistem perdagangan bebas yang diterapkan di Makassar sebagai ancaman terhadap kepentingan dan keuntungan kongsi dagang mereka.⁸⁹

Perbedaan kepentingan ekonomi antara Kerajaan Gowa-Tallo dan VOC kemudian menyebabkan semakin sering terjadinya perselisihan, terutama mengenai kebebasan kapal-kapal Makassar untuk berlayar ke Kepulauan Maluku. Para pelaut Bugis dan Makassar yang menggunakan kapal padewakang secara rutin berlayar ke Ambon, Banda, dan Seram untuk menukarkan beras serta kain India dengan rempah-rempah yang diperoleh langsung dari para petani setempat. Bagi Kerajaan Gowa-Tallo, pelayaran ke Maluku merupakan bagian dari jalur perdagangan yang sah karena telah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum kedatangan bangsa Eropa di Nusantara. Namun, setelah VOC memberlakukan perjanjian monopoli dengan para penguasa lokal di Maluku melalui penaklukan militer, aktivitas pelayaran armada Makassar ke wilayah tersebut dianggap oleh VOC sebagai tindakan penyelundupan dan pelanggaran terhadap kekuasaan mereka.⁹⁰

Menghadapi sikap VOC yang semakin agresif di kawasan perairan timur, Sultan Alauddin menunjukkan pendirian yang tegas dengan menolak tekanan dari

⁸⁹ Sutherland, "Trade, court and company", 95-96

⁹⁰ Poelinggomang, Makassar abad XIX: studi tentang kebijakan perdagangan maritim.h.35-38

kongsi dagang tersebut. Ketika utusan VOC meminta agar Kerajaan Makassar melarang rakyatnya berlayar dan berdagang ke Maluku, pihak istana Gowa menolak permintaan tersebut secara tegas. Sultan Alauddin menyatakan bahwa bumi dan lautan diciptakan oleh Tuhan untuk dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia, sehingga tidak ada pihak yang berhak melarang Makassar berlayar di lautan bebas. Pernyataan tersebut tidak hanya menunjukkan penolakan terhadap tuntutan perdagangan VOC, tetapi juga menjadi bentuk sikap politik Kerajaan Gowa-Tallo dalam menentang upaya Belanda untuk menguasai jalur perdagangan laut.⁹¹

Sikap tegas Kerajaan Makassar terus dipertahankan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Said (1639–1653) dengan dukungan Mangkubumi Karaeng Pattingalloang. Keduanya membangun kepemimpinan yang menggabungkan kekuatan diplomasi, kemampuan militer, dan tata kelola pemerintahan yang maju pada masanya. Sebagai seorang intelektual istana yang menguasai beberapa bahasa Eropa serta memiliki pengetahuan tentang kartografi dan navigasi, Karaeng Pattingalloang memahami kondisi politik internasional dan tujuan utama kedatangan VOC di Nusantara. Pengetahuan tersebut membantunya menyusun kebijakan pertahanan dan diplomasi maritim sehingga Kerajaan Gowa-Tallo dapat berunding dengan VOC secara seimbang serta menolak berbagai perjanjian yang dianggap merugikan kedaulatan kerajaan.⁹²

VOC semakin tidak menyukai sikap Kerajaan Makassar yang tetap menjalankan kebijakan diplomasi secara mandiri, terutama ketika hubungan Karaeng Pattingalloang dengan para pedagang asing di Somba Opu semakin erat. Salah satu pedagang Portugis, Francisco Viera de Figueiredo, tidak hanya diberi tempat tinggal yang aman, tetapi juga dipercaya sebagai perantara perdagangan dan penasihat kerajaan dalam urusan yang berkaitan dengan Eropa. Hubungan yang baik antara Kerajaan Makassar dan para pedagang asing tersebut menciptakan sistem perdagangan

91 Yani, *Melintasi Rentang Waktu: Eksistensi Masyarakat Bugis-Makassar Pasca Perang Melawan VOC Belanda*.

92 Andaya, “Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17, terj”, h.43-45

yang berkembang dengan baik serta mampu menyaingi pengaruh VOC di kawasan timur Nusantara. Bagi VOC, selama kerja sama tersebut terus berlangsung, Makassar akan tetap menjadi pelabuhan transit bebas yang menghambat upaya mereka untuk menguasai jaringan perdagangan rempah-rempah.⁹³

Hubungan antara Kerajaan Makassar dan VOC yang pada awalnya didasarkan pada kerja sama perdagangan secara perlahan berubah menjadi konflik yang semakin serius. VOC menyadari bahwa upaya diplomasi tidak akan mampu membuat Makassar meninggalkan sistem perdagangan bebas yang telah lama diterapkan. Karena itu, VOC mulai menyiapkan strategi lain yang mengarah pada penggunaan tekanan dan kekuatan. Sementara itu, Kerajaan Gowa-Tallo juga mulai mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terjadinya konflik. Di bawah kepemimpinan Karaeng Pattingalloang, kerajaan memperkuat armada laut dan membangun kembali benteng-benteng pertahanan di sepanjang pesisir. Menjelang akhir pemerintahan Sultan Muhammad Said, hubungan antara Makassar dan VOC telah mencapai tingkat ketegangan yang semakin tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua pihak mulai bergeser dari jalur diplomasi menuju konfrontasi bersenjata.⁹⁴

B. Ketegangan Perdagangan dan Pelayaran

Ketegangan antara Kerajaan Gowa-Tallo dan VOC semakin meningkat ketika perselisihan dalam bidang perdagangan berkembang menjadi perbedaan pandangan mengenai hukum laut. Perbedaan tersebut terlihat dari sikap Kerajaan Makassar yang tetap mempertahankan prinsip *Mare Liberum* (laut bebas), sedangkan VOC berusaha menerapkan prinsip *Mare Clausum* (laut tertutup). Bagi masyarakat maritim Sulawesi Selatan, laut bukan dipandang sebagai batas yang memisahkan suatu wilayah, melainkan sebagai jalur yang menghubungkan berbagai bangsa untuk melakukan perdagangan dan pertukaran budaya secara adil. Pandangan tersebut terus dipertahankan dalam berbagai aturan pelabuhan dan kebijakan kerajaan yang

93 Poelinggomang, Makassar abad XIX: studi tentang kebijakan perdagangan maritim.h.39-41

94 Andaya, "Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17, terj", h.49-51

menjamin hak setiap pelaut, tanpa membedakan asal negaranya, untuk berlayar dan berdagang secara bebas di perairan Nusantara.⁹⁵

Sebaliknya, VOC menerapkan prinsip *Mare Clausum* sebagai dasar hukum untuk membenarkan kebijakan monopoli perdagangan dan penguasaan atas wilayah laut tertentu. VOC menganggap bahwa perjanjian yang dibuat dengan para penguasa lokal di kepulauan rempah memberikan hak kepada mereka untuk menutup perairan Maluku dari kapal-kapal milik pihak lain. Berdasarkan prinsip tersebut, setiap kapal yang berlayar tanpa surat izin resmi dari VOC (*pas*) dianggap sebagai kapal penyelundup atau perompak sehingga dapat ditangkap, dirampas, bahkan ditenggelamkan. Perbedaan pandangan mengenai kebebasan laut antara Kerajaan Makassar dan VOC inilah yang kemudian memicu ketegangan di bidang hukum dan militer di berbagai wilayah perairan, seperti Laut Jawa, Selat Makassar, dan Laut Banda.⁹⁶

Untuk menjaga harga rempah-rempah di pasar Eropa tetap tinggi dan menguntungkan, VOC menerapkan pengawasan yang ketat terhadap jalur pelayaran di Kepulauan Maluku. Dari Batavia, VOC memerintahkan pelaksanaan patroli laut bersenjata yang dikenal sebagai pelayaran hong (hongitochten). Patroli yang menggunakan perahu kora-kora dan dikawal oleh serdadu VOC ini tidak hanya bertugas menangkap kapal-kapal yang dianggap melanggar aturan monopoli, tetapi juga menebang dan memusnahkan pohon-pohon cengkeh serta pala di wilayah yang menolak kebijakan VOC atau menghasilkan rempah-rempah melebihi jumlah yang telah ditentukan. Melalui kebijakan tersebut, VOC berusaha mengendalikan pasokan rempah-rempah sejak dari daerah penghasilnya agar tidak diperdagangkan ke pelabuhan lain, terutama Pelabuhan Somba Opu.⁹⁷

95 van der Kroef dan Resink, "Indonesia's History Between the Myths: Essays in Legal History and Historical Theory."h.45

96 Poelinggomang, Makassar abad XIX: studi tentang kebijakan perdagangan maritim.h.42-44

97 Sutherland, "Trade, court and company,"h.95-96

Meskipun VOC menerapkan kebijakan monopoli yang ketat di Maluku, kebijakan tersebut justru memperkuat posisi Pelabuhan Somba Opu sebagai pusat perdagangan. Banyak pedagang Muslim dari Jawa, Melayu, Arab, dan India, serta pedagang Eropa selain Belanda, memilih memindahkan kegiatan perdagangan mereka ke Makassar karena tidak ingin terikat oleh aturan monopoli dan biaya yang diberlakukan VOC. Di bawah perlindungan hukum Kerajaan Gowa, Pelabuhan Somba Opu berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai dan terbuka. Bagi VOC, pelabuhan ini dianggap sebagai tempat perdagangan ilegal yang melemahkan kebijakan monopoli mereka, sedangkan bagi para pedagang dari berbagai negara, Makassar merupakan pelabuhan yang aman dan memberikan kebebasan untuk berdagang. Kemampuan Makassar menampung rempah-rempah dari Maluku dan menyalurkannya kembali ke berbagai jaringan perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama yang menghambat keberhasilan VOC dalam menerapkan monopoli perdagangan di Asia Tenggara.⁹⁸

Keberhasilan Makassar dalam mempertahankan perannya sebagai pelabuhan transit internasional juga didukung oleh kemampuan teknologi pelayaran dan keahlian para pelaut Bugis serta Makassar. Kapal padewakang yang mereka gunakan dirancang untuk mampu berlayar jauh dengan daya angkut yang besar, sehingga dapat melewati pengawasan patroli VOC di perairan Maluku dengan memanfaatkan arah angin muson. Kapal-kapal tersebut membawa berbagai kebutuhan penting, terutama beras dari Makassar, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kepulauan rempah yang mengalami kekurangan pangan akibat banyaknya lahan pertanian yang dialihkan menjadi perkebunan rempah milik VOC. Sebagai balasannya, para pelaut Makassar memperoleh cengkeh dan pala dengan harga yang lebih menguntungkan bagi petani setempat dibandingkan harga yang ditetapkan oleh VOC melalui sistem monopoli.⁹⁹

98 Poelinggomang, Makassar abad XIX: studi tentang kebijakan perdagangan maritim.h.45-48

99 Hamid, Sejarah Maritim Indonesia.h.89-91

Ketegangan di perairan semakin meningkat ketika kapal-kapal dagang Makassar yang kembali dari Maluku sering dihentikan, diperiksa, dan dirampas oleh kapal perang VOC di Laut Banda. Bagi Kerajaan Gowa-Tallo, tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak kebebasan berlayar sekaligus penghinaan terhadap kedaulatan kerajaan. Agresi yang dilakukan VOC terhadap kapal-kapal dagang Makassar semakin memperburuk hubungan antara kedua pihak karena Kerajaan Gowa-Tallo merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi keselamatan rakyat dan setiap kapal yang berlayar di bawah bendera Makassar. Akibatnya, persaingan perdagangan yang sebelumnya hanya sebatas persaingan ekonomi berkembang menjadi permusuhan terbuka yang diwarnai rasa saling curiga dan konflik militer.¹⁰⁰

Menghadapi tindakan VOC di jalur pelayaran, para pemimpin Kerajaan Gowa-Tallo tidak langsung membalas dengan kekuatan militer, tetapi memilih memperkuat upaya hukum dan diplomasi. Di bawah arahan Karaeng Pattingalloang, istana Makassar menyampaikan protes diplomatik kepada Gubernur Jenderal VOC di Batavia dengan menggunakan dasar-dasar hukum laut. Berbekal pengetahuannya tentang hukum maritim dan perjanjian-perjanjian internasional di Eropa, Karaeng Pattingalloang berusaha menunjukkan bahwa klaim monopoli VOC atas perairan Nusantara tidak memiliki dasar yang kuat. Melalui argumentasi tersebut, Kerajaan Gowa-Tallo menegaskan bahwa perairan Maluku merupakan jalur perdagangan yang terbuka dan dapat dilayari oleh kapal-kapal dari berbagai bangsa, bukan menjadi wilayah yang hanya dikuasai oleh Belanda.¹⁰¹

Selain memperkuat upaya diplomasi, ketegangan perdagangan juga mendorong Kerajaan Gowa-Tallo untuk memperkuat sistem pertahanan di wilayah pesisir. Menyadari bahwa bentrokan dengan armada perang VOC sulit dihindari, Karaeng Pattingalloang memerintahkan modernisasi benteng-benteng pertahanan di sepanjang

100 Tini Suryaningsi Sritimuryati, "Perdagangan Maritim Di Makassar Abad XVI-XVII," n.d.h.159-161

101 Andaya, "Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17, terj", h.45

pesisir barat. Benteng-benteng utama, seperti Benteng Somba Opu, Benteng Panakkukang, Benteng Barombong, dan Benteng Ujung Pandang, diperkuat dengan dinding batu bata yang lebih kokoh untuk menahan serangan artileri serta dilengkapi dengan ratusan meriam yang diperoleh dari pedagang Portugis, Inggris, dan Denmark. Langkah tersebut menunjukkan kesiapan Kerajaan Gowa-Tallo dalam mempertahankan wilayahnya sekaligus menjaga prinsip kebebasan pelayaran meskipun harus menghadapi kekuatan militer VOC.¹⁰²

Keberhasilan Kerajaan Makassar dalam menerapkan sistem perdagangan terbuka yang didukung oleh pertahanan maritim yang kuat menimbulkan kekecewaan di kalangan pimpinan VOC, baik di Batavia maupun di Belanda. Bagi mereka, keberadaan Kerajaan Gowa-Tallo dipandang sebagai hambatan utama dalam mewujudkan kebijakan monopoli perdagangan yang dijalankan VOC. Selama Kerajaan Makassar tetap mempertahankan prinsip kebebasan berlayar (*Mare Liberum*), VOC akan kesulitan menguasai jalur perdagangan rempah-rempah secara penuh. Kondisi tersebut menyebabkan perundingan perdagangan tidak lagi menemukan jalan keluar, sementara ketegangan di laut terus meningkat hingga mendorong kedua pihak memasuki tahap konflik yang semakin terbuka dan sulit untuk dihindari.¹⁰³

C. Proses Eskalasi Konflik

Memasuki dekade 1650-an, hubungan antara Kerajaan Gowa-Tallo dan VOC semakin memanas. Perselisihan yang sebelumnya hanya terjadi dalam bidang perdagangan mulai berkembang menjadi konflik politik yang lebih serius. Setelah Sultan Hasanuddin diangkat sebagai raja Gowa ke-16 pada tahun 1653, Kerajaan Gowa-Tallo menunjukkan sikap yang lebih tegas dalam menghadapi tindakan VOC di kawasan timur Nusantara. Sejak muda, Sultan Hasanuddin telah mempelajari ilmu pemerintahan dan kemiliteran di bawah bimbingan ayahnya, Sultan Muhammad Said, serta Mangkubumi Karaeng Pattingalloang. Pengalaman tersebut membuatnya

102 Andaya. "Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17, terj", h.52

103 Boxer, "Jan Kompeni Sejarah VOC Dalam Perang dan Damai 1602-1799, terj", h.51

memahami bahwa VOC tidak benar-benar ingin menjalin hubungan yang setara dengan Kerajaan Gowa-Tallo. Oleh karena itu, kepemimpinannya diarahkan untuk mempertahankan kedaulatan kerajaan dan menjaga kebebasan perdagangan yang menjadi dasar kemakmuran Makassar.¹⁰⁴

Di pihak VOC, kebijakan yang diterapkan juga semakin tegas ketika para pemimpinnya di Batavia memutuskan untuk mengakhiri toleransi terhadap sistem perdagangan bebas di Pelabuhan Somba Opu. Pada tahun 1655 hingga awal dekade 1660-an, Dewan Hindia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Joan Maetsuycker mengirimkan utusan ke Kerajaan Gowa-Tallo dengan membawa sejumlah tuntutan. VOC meminta agar Kerajaan Makassar menghentikan hubungan dagang dengan pedagang Portugis dan Inggris, menutup pelabuhan bagi kapal-kapal Eropa selain Belanda, serta melarang seluruh armada Makassar berlayar ke Maluku. Tuntutan tersebut bukan sekadar bagian dari proses perundingan, tetapi merupakan upaya VOC untuk membatasi dan mengurangi kedaulatan maritim Kerajaan Gowa-Tallo.¹⁰⁵

Menghadapi tekanan diplomatik dari VOC, Sultan Hasanuddin bersama Dewan Adat (Bate Salapang) memberikan penolakan secara tegas. Sultan Hasanuddin menegaskan bahwa mengusir para pedagang asing yang telah lama menetap, berdagang secara jujur, dan mematuhi aturan kerajaan merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan serta hukum adat *Ade'* yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Penolakan tersebut juga didasarkan pada pandangan moral dan keagamaan bahwa kebebasan berlayar di laut merupakan hak yang telah ditetapkan oleh Tuhan dan tidak dapat dibatasi oleh kebijakan monopoli yang dibuat oleh manusia. Sikap tegas Kerajaan Gowa-Tallo tersebut semakin memperjelas perbedaan kepentingan dengan VOC dan membuat hubungan kedua pihak semakin sulit untuk didamaikan.¹⁰⁶

104 Andaya, "Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17, terj", h.155

105 Sutherland, "Trade, court and company", h.95

106 Poelinggomang, Makassar abad XIX: studi tentang kebijakan perdagangan maritim.h.54

Setelah tuntutan diplomatiknya ditolak oleh Kerajaan Gowa-Tallo, VOC mulai menggunakan kekuatan militer untuk menekan Makassar. Kapal-kapal perang VOC yang berpatroli di Laut Banda dan Kepulauan Maluku diperintahkan untuk menghentikan, menyerang, menenggelamkan, serta merampas muatan kapal-kapal padewakang Makassar yang diduga membawa rempah-rempah. Selain melakukan tindakan di laut, VOC juga beberapa kali menyerang wilayah pesisir Makassar dan merusak pelabuhan-pelabuhan pendukung kerajaan tanpa terlebih dahulu menyatakan perang secara resmi. Melalui tindakan tersebut, VOC berupaya melemahkan jalur logistik Kerajaan Gowa-Tallo sekaligus memancing Sultan Hasanuddin agar segera melakukan serangan balasan.¹⁰⁷

Meskipun telah meningkatkan tekanan militer, VOC menyadari bahwa kekuatan armada lautnya belum mampu menaklukkan ibu kota Kerajaan Gowa-Tallo melalui serangan langsung dari laut. Benteng Somba Opu telah diperkuat menjadi benteng pertahanan yang kokoh dengan dinding bata yang tebal serta dilengkapi ratusan meriam. Kekuatan pertahanan Makassar juga didukung oleh kerja sama antara benteng-benteng di darat dan armada laut yang siap menghadapi setiap serangan dari pihak lawan. Kondisi tersebut membuat VOC menyadari bahwa serangan langsung melalui jalur laut berisiko menimbulkan kekalahan dan kerugian yang besar bagi armada mereka.¹⁰⁸

Karena sulit menembus pertahanan Kerajaan Gowa-Tallo melalui jalur militer, VOC mulai mengubah strategi dengan menerapkan politik adu domba (*divide et impera*) untuk memecah kekuatan di Sulawesi Selatan. Pimpinan VOC di Batavia melihat adanya ketegangan politik di antara kerajaan-kerajaan di wilayah tersebut. Kebijakan Kerajaan Gowa-Tallo yang memusatkan kekuasaan serta mengerahkan tenaga kerja dalam jumlah besar untuk memperkuat benteng dan sarana pertahanan menimbulkan ketidakpuasan di beberapa kerajaan yang berada di bawah pengaruhnya,

107 Boxer, "Jan Kompeni Sejarah VOC Dalam Perang dan Damai 1602-1799, terj", h.53

108 Ruslan Arief et al., "Makassar war in the perspective of the Indonesian total war," *Journal of Social and Political Sciences* 4, no. 2 (2021).h.295

terutama Kerajaan Bone dan Soppeng. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh VOC untuk memecah hubungan antarkerajaan sehingga kekuatan Kerajaan Gowa-Tallo dapat dilemahkan dari dalam.¹⁰⁹

Kesempatan tersebut dimanfaatkan VOC dengan menjalin kerja sama secara rahasia dengan seorang bangsawan dari Kerajaan Bone, yaitu Arung Palakka. Arung Palakka menyimpan rasa kecewa dan permusuhan terhadap kekuasaan Gowa karena melihat rakyat Bone harus menjalani kerja paksa dalam pembangunan saluran air dan benteng pertahanan di Makassar. Pada tahun 1660, ia memimpin pemberontakan terhadap kekuasaan Gowa. Meskipun pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan oleh pasukan Sultan Hasanuddin, Arung Palakka bersama ribuan pengikutnya berhasil melarikan diri ke Batavia untuk meminta perlindungan dan bantuan militer kepada VOC. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik penting bagi VOC karena mereka memperoleh dukungan pasukan darat dari Bone yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi Kerajaan Gowa-Tallo.¹¹⁰

Di Batavia, kerja sama antara VOC dan Arung Palakka semakin diperkuat melalui sejumlah kesepakatan politik yang menguntungkan kedua belah pihak. VOC berjanji memberikan bantuan berupa kapal perang, persenjataan, amunisi, logistik, dan pasukan Eropa untuk membantu Arung Palakka melepaskan Kerajaan Bone dari kekuasaan Gowa. Sebagai balasannya, Arung Palakka menyatakan kesediaannya untuk mengerahkan ribuan prajurit Bugis dalam membantu VOC menyerang pusat pemerintahan Kerajaan Gowa-Tallo di Somba Opu. Kerja sama tersebut kemudian memperkuat kemampuan militer VOC karena menggabungkan keunggulan persenjataan Eropa dengan kekuatan pasukan darat Bugis, sehingga mengubah keseimbangan kekuatan di Sulawesi Selatan.¹¹¹

109 A Abdullah, "The Kingdom of Bone in the historical trajectory of South Sulawesi (a political and power upheaval in searching, discovering, upholding and defending the values of the Bugis cultural entity)," *Cultural Lens: Scientific Journal of the Humanities* 12, no. 2 (2017): 15–28.

110 Andaya, "Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17, terj", h.132

111 Abdullah, "The Kingdom of Bone in the historical trajectory of South Sulawesi (a political and power upheaval in searching, discovering, upholding and defending the values of the Bugis cultural entity)", h.26

Setelah terbentuknya kerja sama militer antara VOC dan Arung Palakka, konflik antara Kerajaan Gowa-Tallo dan VOC tidak lagi terbatas pada persoalan perdagangan dan pelayaran, tetapi berkembang menjadi konflik politik dan militer yang lebih luas. Sultan Hasanuddin mengetahui adanya kerja sama tersebut dan segera mempersiapkan pertahanan kerajaan dengan mengonsolidasikan kekuatan militer, mempererat hubungan dengan kerajaan-kerajaan sekutu seperti Wajo, serta mengerahkan pasukan untuk menjaga wilayah pesisir. Seluruh benteng pertahanan disiagakan, sementara persediaan bahan pangan dan amunisi dipersiapkan di dalam Benteng Somba Opu sebagai langkah menghadapi kemungkinan terjadinya pengepungan. Pada tahap ini, hubungan diplomatik antara Kerajaan Gowa-Tallo dan VOC praktis telah berakhir, sehingga kedua pihak mulai bersiap menghadapi perang yang menentukan di kawasan Indonesia Timur.¹¹²

D. Perang Makassar

Perang Makassar yang berlangsung pada tahun 1666–1669 menjadi salah satu perang terbesar dan paling menentukan dalam sejarah Nusantara pada abad ke-17. Perang ini tidak hanya berkaitan dengan perebutan wilayah atau penguasaan perdagangan rempah-rempah, tetapi juga merupakan pertentangan antara dua pandangan yang berbeda mengenai penguasaan dan pemanfaatan wilayah laut. Di satu pihak, Kerajaan Gowa-Tallo di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin berjuang untuk mempertahankan kedaulatan kerajaan, kebebasan berlayar, dan sistem pelabuhan terbuka yang telah lama diterapkan. Di pihak lain, VOC yang dipimpin oleh Laksamana Cornelis Speelman bersama sekutu-sekutu lokalnya berusaha menerapkan monopoli perdagangan dan menguasai jalur pelayaran di Nusantara.¹¹³

Kampanye militer ini dimulai pada akhir tahun 1666 ketika VOC mengirim armada besar dari Batavia menuju Sulawesi Selatan. Armada tersebut terdiri atas 21 kapal perang yang dipersenjatai dengan meriam berat dan membawa lebih dari 1.600

¹¹² Andaya, “Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17, terj”, h.135

¹¹³ van der Kroef dan Resink, “Indonesia’s History Between the Myths: Essays in Legal History and Historical Theory”, h.45

serdadu Eropa. Kekuatan VOC juga diperkuat oleh ribuan prajurit Bugis yang dipimpin Arung Palakka serta pasukan Ambon di bawah pimpinan Kapten Jonker yang berpengalaman dalam peperangan di wilayah hutan dan pesisir. Pada tahap awal, Cornelis Speelman tidak langsung menyerang Benteng Somba Opu, tetapi memilih melakukan blokade laut serta menyerang wilayah-wilayah penyangga Kerajaan Gowa-Tallo dan pulau-pulau di sekitarnya untuk menguji kekuatan pertahanan pasukan Sultan Hasanuddin.¹¹⁴

Sultan Hasanuddin menghadapi kedatangan armada VOC dengan menerapkan strategi pertahanan yang terencana dan memanfaatkan kekuatan benteng-benteng pertahanan serta armada laut Kerajaan Gowa-Tallo. Pasukan kerajaan dipimpin oleh panglima-panglima yang dikenal memiliki kemampuan dan keberanian dalam peperangan, seperti Karaeng Bontomarannu, Karaeng Karunrung, dan Karaeng Lengkesse. Kapal-kapal perang Makassar, seperti galai dan padewakang, melakukan serangan secara cepat terhadap kapal-kapal VOC di perairan sempit, sementara meriam dari benteng-benteng pesisir digunakan untuk menghalangi armada VOC mendekati pantai. Besarnya pengerahan pasukan, persediaan logistik, dan kekuatan artileri menunjukkan bahwa Kerajaan Gowa-Tallo mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya untuk mempertahankan wilayah dan kedaulatannya.¹¹⁵

Meskipun armada VOC di bawah pimpinan Cornelis Speelman terus membombardir pesisir Makassar dengan meriam, Benteng Somba Opu tetap mampu bertahan dan tidak mudah dihancurkan melalui serangan dari laut. Melihat serangan tersebut tidak memberikan hasil yang diharapkan, Speelman bersama Arung Palakka kemudian mengubah strategi dengan mendaratkan pasukan darat dalam jumlah besar di Pantai Barombong. Pendaratan ini menandai dimulainya pertempuran darat yang berlangsung sengit antara pasukan Bugis yang dipimpin Arung Palakka dan pasukan Kerajaan Gowa-Tallo di wilayah berlumpur, rawa, serta hutan pesisir. Kemampuan

114 Andaya, "Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17, terj", h.138

115 Arief et al., "Makassar war in the perspective of the Indonesian total war."

pasukan Arung Palakka dalam menguasai medan pertempuran serta tekad mereka untuk membebaskan Kerajaan Bone menjadi salah satu faktor yang memengaruhi jalannya perang dan memecah konsentrasi pertahanan Kerajaan Gowa-Tallo.¹¹⁶

Pertempuran yang paling sengit dalam rangkaian Perang Makassar terjadi ketika kedua pihak memperebutkan benteng-benteng yang menjadi pertahanan terluar sebelum mencapai Benteng Somba Opu, terutama Benteng Barombong dan Benteng Panakkukang. Selama beberapa minggu, pasukan Kerajaan Gowa-Tallo dan aliansi VOC-Bugis saling melancarkan serangan yang mengakibatkan banyak korban di kedua belah pihak. VOC terus menembakkan meriam untuk menghancurkan benteng pertahanan, sedangkan pasukan Makassar melakukan perlawanan dengan menggunakan tombak, keris, dan senapan. Jatuhnya Benteng Barombong ke tangan aliansi VOC-Bugis menjadi titik penting dalam jalannya perang karena melemahkan pertahanan luar Kerajaan Gowa-Tallo dan membuka jalan menuju pengepungan Benteng Somba Opu.¹¹⁷

Setelah benteng-benteng pertahanan terluar berhasil dikuasai, Benteng Somba Opu terkepung dari dua arah. Di laut, armada VOC melakukan blokade untuk memutus jalur masuk bantuan dan pasokan pangan, sedangkan di darat pasukan yang dipimpin Cornelis Speelman dan Arung Palakka mengepung benteng dengan ketat. Keadaan tersebut menimbulkan krisis yang serius di dalam Benteng Somba Opu. Pasukan, keluarga bangsawan, dan masyarakat yang berada di dalam benteng mulai mengalami kekurangan bahan makanan, persediaan mesiu semakin menipis, serta muncul ancaman penyakit akibat kondisi lingkungan yang memburuk selama pengepungan. Dalam situasi yang semakin sulit tersebut, Sultan Hasanuddin menyadari bahwa mempertahankan pertempuran dalam keadaan terisolasi hanya akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar dan mengancam keselamatan rakyat Makassar.¹¹⁸

116 Andaya, "Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17, terj", h.144

117 Andaya. "Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17, terj", h.153

118 Arief et al., "Makassar war in the perspective of the Indonesian total war", h.297

Untuk menyelamatkan rakyatnya dan menghindari kehancuran yang lebih besar terhadap Kerajaan Gowa-Tallo, Sultan Hasanuddin akhirnya menerima usulan gencatan senjata yang diajukan oleh VOC pada akhir tahun 1667. Perundingan tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Bongaya. Namun, isi perjanjian tersebut dinilai sangat merugikan dan mengurangi kedaulatan Kerajaan Makassar sehingga menimbulkan penolakan dari para panglima dan tokoh kerajaan. Akibatnya, perlawanan kembali terjadi pada tahun 1668–1669. Pasukan Makassar yang dipimpin oleh Karaeng Karunrung kembali mempertahankan Benteng Somba Opu hingga akhirnya benteng tersebut berhasil dikuasai dan dihancurkan oleh VOC pada bulan Juni 1669.¹¹⁹

Perjuangan dan pengorbanan rakyat Makassar selama Perang Makassar diabadikan dalam karya sastra sejarah berjudul *Syair Perang Mengkasar (Sha'ir Sipelman)* yang ditulis oleh Encik Amin. Karya tersebut tidak hanya mencatat jalannya perang, tetapi juga menggambarkan semangat perjuangan, kesetiaan, dan keteguhan rakyat serta pemimpin Makassar dalam mempertahankan kerajaan. Isi syair tersebut menunjukkan bahwa kekalahan Kerajaan Gowa-Tallo bukan disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan Sultan Hasanuddin atau rendahnya semangat juang pasukan Makassar, melainkan karena keunggulan persenjataan militer VOC yang didukung oleh keberhasilan mereka memanfaatkan perpecahan politik di antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan melalui strategi *divide et impera*.¹²⁰

E. Perjanjian Bongaya

Perang Makassar yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama akhirnya berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Bongaya (*Het Bongaisch Verdrag*) pada 18 November 1667 di Desa Bongaya. Perjanjian yang terdiri atas 30 pasal tersebut disusun oleh Cornelis Speelman dan berisi berbagai ketentuan yang membatasi kekuatan politik, kedaulatan, serta kegiatan ekonomi Kerajaan Gowa-Tallo. Bagi VOC,

119 Andaya, “Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17, terj”, h.160

120 “Syair Perang Mengkasar (Shair Sipelman) Karya Entji Amin: Analisis Anakronisme Dan Patronase.”

perjanjian ini menjadi bukti keberhasilan mereka dalam menguasai perdagangan dan memperkuat pengaruhnya di kawasan timur Nusantara. Sebaliknya, bagi Kerajaan Gowa-Tallo, Perjanjian Bongaya menjadi awal berakhirnya masa kejayaan Pelabuhan Somba Opu sebagai pelabuhan bebas dan menandai semakin kuatnya pengaruh Belanda di wilayah tersebut.¹²¹

Isi Perjanjian Bongaya disusun dengan tujuan membatasi kekuatan ekonomi maritim Kerajaan Gowa-Tallo. Melalui perjanjian tersebut, Kerajaan Gowa-Tallo diwajibkan mengakhiri kebijakan perdagangan bebas yang selama ini diterapkan dan memberikan hak monopoli perdagangan rempah-rempah serta impor kain di wilayah Sulawesi Selatan kepada VOC. Selain itu, kerajaan juga harus mengusir seluruh pedagang Eropa selain Belanda, seperti Portugis, Inggris, Denmark, dan Prancis, dari wilayah Makassar dalam waktu yang telah ditentukan. Ketentuan tersebut menyebabkan Pelabuhan Somba Opu kehilangan fungsinya sebagai pusat perdagangan internasional dan mengurangi perannya dalam jaringan perdagangan dunia.¹²²

Perjanjian Bongaya juga memberikan dampak besar terhadap kekuasaan politik dan wilayah Kerajaan Gowa-Tallo. Melalui perjanjian tersebut, wilayah kekuasaan Gowa yang sebelumnya meliputi pesisir Kalimantan, Nusa Tenggara, seperti Bima dan Sumbawa, serta sebagian wilayah Maluku, dipersempit sehingga hanya mencakup wilayah Gowa dan Tallo. Daerah-daerah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Gowa harus dilepaskan dan kemudian berada di bawah pengaruh VOC atau diserahkan kepada sekutunya, yaitu Kerajaan Bone yang dipimpin oleh Arung Palakka. Selain kehilangan banyak wilayah, Kerajaan Gowa-Tallo juga diwajibkan membayar ganti rugi perang kepada VOC dalam bentuk emas dan menyerahkan mata uang kerajaan sebagai bagian dari ketentuan yang telah disepakati.¹²³

121 Anthony Reid, *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 2: Jaringan Perdagangan Global* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).h.90

122 Adam, "Relevansi Perjanjian Bongaya 1667 dan 1824 dalam Perubahan Sosial Politik antara Kerajaan Gowa dan Belanda (VOC)", h.40-42

123 Andaya, "Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17, terj", h.155

VOC juga menerapkan kebijakan demiliterisasi untuk mencegah Kerajaan Gowa-Tallo membangun kembali kekuatan militernya. Berdasarkan ketentuan Perjanjian Bongaya, benteng-benteng pertahanan, seperti Benteng Somba Opu, Benteng Barombong, dan Benteng Panakkukang, harus dihancurkan oleh pihak Kerajaan Makassar. Hanya Benteng Ujung Pandang yang tidak dihancurkan karena diambil alih oleh VOC. Benteng tersebut kemudian diperkuat dengan gaya arsitektur Eropa dan diubah namanya menjadi Fort Rotterdam. Selanjutnya, Fort Rotterdam dijadikan sebagai pusat pertahanan militer, pemerintahan kolonial, serta tempat penahanan bagi tokoh-tokoh yang menentang kekuasaan VOC di Sulawesi Selatan dan wilayah Indonesia Timur.¹²⁴

Perjanjian Bongaya tidak hanya menjadi kesepakatan untuk mengakhiri perang antara Kerajaan Gowa-Tallo dan VOC, tetapi juga menjadi dasar hukum yang mengatur hubungan kedua pihak dalam jangka panjang. Ketentuan-ketentuan mengenai perdagangan yang terdapat dalam perjanjian tersebut tetap dipertahankan dan kembali digunakan dalam berbagai perjanjian berikutnya, termasuk Perjanjian Bongaya tahun 1824. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah kolonial Belanda terus memanfaatkan Perjanjian Bongaya sebagai dasar untuk mengendalikan kegiatan ekonomi dan membatasi kebebasan politik serta diplomasi Kerajaan Gowa-Tallo.¹²⁵

Setelah Perjanjian Bongaya diberlakukan, banyak masyarakat Bugis dan Makassar tidak menerima pembatasan terhadap kebebasan pelayaran dan perdagangan yang diterapkan oleh VOC. Kondisi tersebut mendorong terjadinya perpindahan besar-besaran masyarakat pelaut, bangsawan, dan prajurit Bugis-Makassar ke berbagai daerah di Nusantara. Mereka berlayar menuju wilayah seperti Kalimantan Timur, Semenanjung Malaya, Kepulauan Riau, dan pesisir Jawa untuk mencari kehidupan baru. Di daerah-daerah tersebut, mereka membangun permukiman, menjalin hubungan dengan penguasa setempat, serta tetap mempertahankan tradisi pelayaran dan

¹²⁴ Poelinggomang, Makassar abad XIX: studi tentang kebijakan perdagangan maritim.h.48

¹²⁵ Adam, "Relevansi Perjanjian Bongaya 1667 dan 1824 dalam Perubahan Sosial Politik antara Kerajaan Gowa dan Belanda (VOC)", h.58

perdagangan yang telah lama mereka jalankan. Perpindahan ini menjadi salah satu bentuk perlawanan terhadap kebijakan monopoli VOC meskipun dilakukan tanpa melalui peperangan secara langsung.¹²⁶

Perkembangan setelah Perjanjian Bongaya menunjukkan bahwa meskipun VOC berhasil melemahkan kekuatan politik dan militer Kerajaan Gowa-Tallo, pengaruhnya tidak mampu menghilangkan identitas maritim masyarakat Bugis-Makassar. Masyarakat Bugis-Makassar tetap mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru melalui pembangunan jaringan perdagangan di berbagai wilayah serta mempertahankan tradisi pelayaran yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Nilai-nilai tentang kebebasan berlayar juga tetap diwariskan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bagian penting dari identitas masyarakat maritim Sulawesi Selatan.¹²⁷

Perjanjian Bongaya membawa perubahan besar terhadap kondisi politik, ekonomi, dan sistem maritim di Nusantara pada abad ke-17. Perjanjian ini mengakhiri masa berkembangnya perdagangan bebas di kawasan Indonesia Timur dan menjadi awal semakin kuatnya pengaruh kolonial VOC melalui penerapan sistem monopoli perdagangan. Meskipun demikian, perjanjian tersebut tidak menghilangkan semangat maritim masyarakat Bugis-Makassar. Melalui diaspora ke berbagai wilayah Nusantara, mereka tetap mempertahankan tradisi pelayaran, membangun jaringan perdagangan baru, serta menjaga nilai-nilai kebebasan berlayar yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat maritim Sulawesi Selatan.¹²⁸

126 Yani, Melintasi Rentang Waktu: Eksistensi Masyarakat Bugis-Makassar Pasca Perang Melawan VOC Belanda.h.52

127 Surayah Rasyid et al., "Reinterpreting historical traces: the socio-political dynamics of Bugis–Makassar Society after the 17th-Century Bungaya Treaty," *Cogent Arts & Humanities* 13, no. 1 (2026): 2604957.

128 Reid, *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 2: Jaringan Perdagangan Global*.h.98

BAB IV

DAMPAK KONFLIK VOC DAN MAKASSAR

A. Dampak terhadap Sistem Perdagangan Maritim

Berakhirnya Perang Makassar dan ditandatanganinya Perjanjian Bongaya pada tahun 1667 membawa perubahan besar terhadap sistem perdagangan maritim di kawasan timur Nusantara. Kemenangan VOC dalam konflik tersebut mengakhiri sistem perdagangan terbuka yang selama ini dipertahankan oleh Kerajaan Gowa-Tallo berdasarkan prinsip *Mare Liberum* (laut bebas). Setelah itu, VOC mulai menerapkan prinsip *Mare Clausum* (laut tertutup), yaitu sistem yang menempatkan seluruh aktivitas pelayaran, perdagangan, dan distribusi barang di perairan Indonesia bagian timur di bawah pengawasan dan monopoli VOC. Perubahan tersebut juga mengakhiri kebebasan berlayar dan berdagang yang sebelumnya telah menjadi bagian penting dari aktivitas perdagangan di wilayah Sulawesi dan Maluku selama berabad-abad.¹²⁹

Dampak yang paling terlihat dari perubahan sistem perdagangan maritim ini adalah menurunnya peran Pelabuhan Somba Opu sebagai pelabuhan transit internasional. Setelah memenangkan Perang Makassar, VOC berupaya menghilangkan peran Somba Opu sebagai pusat perdagangan yang dapat menyaingi Batavia. Melalui pelaksanaan Perjanjian Bongaya, Kerajaan Gowa-Tallo diwajibkan menutup Pelabuhan Somba Opu bagi kapal-kapal dagang Eropa selain Belanda serta para pedagang Asia yang tidak mengikuti aturan monopoli VOC. Selain itu, berbagai fasilitas pelabuhan, gudang penyimpanan barang, dan kawasan permukiman para pedagang di sekitar benteng juga dihancurkan. Akibatnya, Pelabuhan Somba Opu yang sebelumnya menjadi pusat perdagangan internasional berubah menjadi kawasan pesisir yang kehilangan perannya dalam jaringan perdagangan internasional.¹³⁰

Setelah Pelabuhan Somba Opu kehilangan perannya sebagai pusat perdagangan, VOC juga melakukan pengusiran terhadap para pedagang asing yang

¹²⁹ van der Kroef dan Resink, "Indonesia's History Between the Myths: Essays in Legal History and Historical Theory."

¹³⁰ Reid, Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 2: Jaringan Perdagangan Global.h.92

selama ini menjadi bagian penting dari kegiatan perdagangan di Makassar. Para pedagang Eropa dari Portugis, Inggris, Denmark, dan Prancis yang memiliki kantor dagang di Makassar diwajibkan meninggalkan wilayah tersebut beserta seluruh aset mereka dalam waktu yang telah ditentukan. Kebijakan ini juga berdampak pada para pedagang Muslim dari Koromandel (India), Melayu, Jawa, dan Arab yang sebelumnya memperoleh perlindungan dan kebebasan berdagang di bawah pemerintahan Kerajaan Gowa-Tallo. Kepergian para pedagang tersebut menyebabkan hubungan perdagangan Makassar dengan berbagai pusat perdagangan di kawasan Samudra Hindia hingga Laut Cina Selatan semakin berkurang.¹³¹

Untuk mencegah bangkitnya kembali sistem perdagangan bebas melalui pelayaran masyarakat lokal, VOC menerapkan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas pelayaran dengan memberlakukan surat izin berlayar yang dikenal sebagai *pasbas*. Melalui aturan ini, setiap kapal lokal, termasuk kapal padewakang milik pelaut Bugis dan Makassar, diwajibkan memiliki izin resmi dari VOC sebelum berlayar ke luar wilayah Sulawesi Selatan. Surat izin tersebut memuat informasi mengenai rute pelayaran, jumlah awak kapal, serta jenis barang yang diizinkan untuk diangkut, termasuk larangan membawa rempah-rempah dari Maluku. Apabila terdapat kapal yang berlayar tanpa surat izin atau tidak mengikuti rute yang telah ditetapkan, VOC akan menganggapnya sebagai kapal penyelundup atau perompak sehingga kapal beserta muatannya dapat disita.¹³²

Penerapan sistem monopoli dan surat izin berlayar (*pasbas*) mengubah jalur perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Sebelum terjadinya konflik, Makassar berperan sebagai pelabuhan transit dan pusat perdagangan alternatif bagi cengkeh dari Maluku Utara serta pala dari Kepulauan Banda, sehingga harga rempah-rempah di pasar dunia tetap bersaing. Setelah Kerajaan Makassar berhasil dikuasai, VOC mengendalikan jalur perdagangan dari Maluku dengan mengarahkan seluruh

131 Boxer, "Jan Kompeni Sejarah VOC Dalam Perang dan Damai 1602-1799, terj",h.43

132 Poelinggomang, Makassar abad XIX: studi tentang kebijakan perdagangan maritim.h.38

perdagangan rempah-rempah melalui Batavia sebelum dikirim ke Amsterdam. Kebijakan tersebut membatasi hubungan perdagangan dengan wilayah lain dan membuat para pedagang Nusantara kehilangan akses untuk memperoleh rempah-rempah secara langsung. Akibatnya, aktivitas perdagangan di berbagai pelabuhan di kawasan timur Indonesia juga mengalami penurunan.¹³³

Setelah Pelabuhan Somba Opu tidak lagi berfungsi sebagai pusat perdagangan, VOC memindahkan kegiatan administrasi pelayaran dan perdagangan ke Benteng Ujung Pandang yang kemudian diubah namanya menjadi Fort Rotterdam. Namun, Fort Rotterdam memiliki fungsi yang berbeda dengan Somba Opu. Benteng ini tidak digunakan sebagai pelabuhan perdagangan yang terbuka, tetapi sebagai pusat pengawasan militer dan administrasi perdagangan VOC. Seluruh aktivitas keluar masuk barang diawasi oleh pegawai VOC yang bertugas memeriksa muatan kapal dan memungut bea cukai atas barang-barang yang diizinkan untuk diperdagangkan. Perubahan tersebut menjadikan kegiatan perdagangan di Makassar berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh VOC.¹³⁴

Meskipun VOC menerapkan sistem monopoli yang ketat, masyarakat Bugis dan Makassar tetap berusaha mempertahankan kegiatan pelayaran dan perdagangan mereka. Banyak pedagang dan pelaut lokal yang tidak mengikuti aturan *pasbas* karena dianggap membatasi aktivitas perdagangan. Mereka kemudian melakukan perdagangan secara diam-diam dengan menghindari pengawasan patroli VOC di beberapa jalur pelayaran. Berbekal kemampuan mengoperasikan kapal padewakang serta pengetahuan tentang arah angin, rasi bintang, dan kondisi perairan, para pelaut tetap mengangkut beras, tekstil, dan rempah-rempah ke berbagai wilayah, seperti Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Riau. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem perdagangan bebas Kerajaan Gowa-Tallo telah berakhir, tradisi pelayaran dan perdagangan masyarakat Bugis-Makassar tetap bertahan.¹³⁵

133 Sritimuryati, "Perdagangan Maritim Di Makassar Abad XVI-XVII", h.158

134 Andaya, "Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17, ter", h.155

135 Sutherland, "Trade, court and company", h.98

Monopoli perdagangan yang diterapkan VOC juga berdampak pada sistem distribusi pangan dan kebutuhan pokok di kawasan timur Nusantara. Sebelum dikuasai VOC, Pelabuhan Makassar menjadi pusat penyaluran beras yang berasal dari Jawa dan Maros untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kepulauan rempah yang mengalami kekurangan lahan pertanian. Setelah VOC mengambil alih perdagangan dan membatasi pengiriman beras hanya untuk memenuhi kebutuhan garnisun mereka di Maluku, pasokan pangan ke berbagai wilayah di Indonesia bagian timur mulai berkurang. Akibatnya, harga bahan pokok meningkat dan hubungan perdagangan antarpulau yang sebelumnya saling mendukung menjadi terganggu.¹³⁶

Anthony Reid menjelaskan bahwa runtuhnya sistem perdagangan maritim Makassar menandai berakhirnya masa Kurun Niaga (*Age of Commerce*) di kawasan timur Asia Tenggara. Pada masa tersebut, pelabuhan-pelabuhan di Nusantara berkembang sebagai pusat perdagangan yang terbuka dan menjadi bagian dari jaringan perdagangan internasional. Setelah VOC menguasai Makassar, sistem perdagangan berubah menjadi berada di bawah kendali kolonial. Akibatnya, Makassar yang sebelumnya menjadi salah satu pusat perdagangan maritim penting di Nusantara kehilangan perannya dan berada di bawah pengawasan VOC. Perubahan tersebut mengurangi peran masyarakat maritim Nusantara dalam perdagangan internasional karena aktivitas perdagangan dan distribusi komoditas mulai dikendalikan oleh kekuatan kolonial.¹³⁷

Dampak terhadap sistem perdagangan maritim tidak hanya berlangsung dalam waktu singkat, tetapi terus berlanjut melalui kebijakan kolonial yang diterapkan setelah Perjanjian Bongaya. Ketentuan mengenai pembatasan pelayaran dan perdagangan yang tercantum dalam Perjanjian Bongaya tahun 1667 tetap dipertahankan dan kembali diterapkan dalam perjanjian-perjanjian berikutnya, termasuk Perjanjian Bongaya tahun 1824. Keberlanjutan kebijakan tersebut membuat perkembangan perdagangan maritim

136 Adam, "Relevansi Perjanjian Bongaya 1667 dan 1824 dalam Perubahan Sosial Politik antara Kerajaan Gowa dan Belanda (VOC)", h.42

137 Reid, *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 2: Jaringan Perdagangan Global*.h.95

Makassar tetap berada di bawah sistem monopoli kolonial dalam jangka waktu yang lama. Akibatnya, Makassar tidak dapat kembali berkembang sebagai pelabuhan bebas hingga berakhirnya kekuasaan VOC pada akhir abad ke-18 dan dimulainya pemerintahan Hindia Belanda.¹³⁸

B. Dampak terhadap Kondisi Ekonomi Makassar

Konflik yang berlangsung antara Kerajaan Gowa-Tallo dan VOC, serta berlakunya Perjanjian Bongaya, membawa dampak besar terhadap kondisi ekonomi kerajaan. Dampak yang paling dirasakan adalah berkurangnya pendapatan kerajaan yang sebelumnya berasal dari bea cukai pelabuhan. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin hingga Sultan Muhammad Said, Pelabuhan Somba Opu menjadi sumber utama pemasukan kerajaan karena tingginya aktivitas perdagangan dan penerimaan bea cukai. Namun, setelah Perjanjian Bongaya diberlakukan, hak untuk memungut bea cukai di pelabuhan diambil alih oleh VOC melalui Fort Rotterdam. Akibatnya, pendapatan Kerajaan Gowa-Tallo menurun secara signifikan sehingga kemampuan kerajaan dalam mengelola keuangannya juga ikut melemah.¹³⁹

Selain kehilangan pendapatan dari bea cukai, Kerajaan Gowa-Tallo juga diwajibkan membayar ganti rugi perang (*herstelbetaling*) kepada VOC. Seluruh biaya yang dikeluarkan VOC selama Perang Makassar, seperti biaya kampanye militer, penggunaan amunisi, dan operasional armada, dibebankan kepada Kerajaan Gowa-Tallo. Sebagai bentuk pembayaran, kerajaan harus menyerahkan emas, mata uang perak, dan koin emas kerajaan kepada VOC. Kewajiban tersebut mengurangi cadangan kekayaan kerajaan dan harta milik para bangsawan yang tergabung dalam Dewan Adat (Bate Salapang). Akibatnya, kemampuan ekonomi kelompok elite kerajaan yang sebelumnya berperan dalam mendukung kegiatan perdagangan dan pelayaran juga mengalami penurunan.¹⁴⁰

138 Adam, "Relevansi Perjanjian Bongaya 1667 dan 1824 dalam Perubahan Sosial Politik antara Kerajaan Gowa dan Belanda (VOC)", h.58

139 Poelinggomang, Makassar abad XIX: studi tentang kebijakan perdagangan maritim.h.48

140 Andaya, "Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17, terj", h.158

Selain mengurangi pendapatan kerajaan, VOC juga menguasai perdagangan barang impor yang memiliki nilai ekonomi tinggi, terutama kain dan tekstil dari India, seperti kain Koromandel dan Surat. Sebelum Perang Makassar, Makassar dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan tekstil terbesar di kawasan timur Nusantara, tempat kain-kain dari India diperdagangkan dan ditukarkan dengan berbagai komoditas lokal serta rempah-rempah. Setelah tahun 1667, VOC mewajibkan seluruh perdagangan kain India di Sulawesi Selatan dilakukan melalui gudang-gudang milik mereka. Akibatnya, para pedagang lokal kehilangan kesempatan untuk memperdagangkan tekstil secara bebas, sementara masyarakat harus memperoleh kain melalui VOC dengan harga yang telah ditentukan oleh pihak kompeni.¹⁴¹

Kerusakan infrastruktur ekonomi di Somba Opu juga memberikan dampak besar terhadap kegiatan perdagangan masyarakat Makassar. Setelah pertempuran pada tahun 1669, benteng, pasar, gudang penyimpanan barang, dan pusat-pusat kerajinan di sekitar Somba Opu mengalami kerusakan sehingga aktivitas perdagangan tidak lagi dapat berjalan seperti sebelumnya. Pasar-pasar yang menjadi tempat bertemunya petani dari pedalaman dengan para pedagang pesisir juga mengalami perubahan karena pusat perdagangan dipindahkan ke kawasan Ujung Pandang yang berada di bawah pengawasan VOC. Perpindahan pusat perdagangan tersebut mengganggu hubungan kerja sama dan sistem kepercayaan yang selama ini telah terjalin di antara para pedagang, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat ikut mengalami penurunan.¹⁴²

Kebijakan monopoli yang diterapkan VOC juga berdampak pada industri pembuatan kapal tradisional di Sulawesi Selatan. Produksi kapal padewakang dan pinisi yang sebelumnya menjadi salah satu kegiatan ekonomi penting di daerah pesisir, seperti Bira dan Makassar, mengalami penurunan yang signifikan. Industri ini sebelumnya melibatkan banyak tenaga kerja, mulai dari pengrajin kayu, pandai besi, hingga pembuat layar. Namun, setelah VOC memberlakukan sistem *pasbas* yang

141 Boxer, "Jan Kompeni Sejarah VOC Dalam Perang dan Damai 1602-1799, terj", h.54

142 Andaya, "Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17, terj", h.161

membatasi pelayaran jarak jauh serta membatasi akses terhadap kayu berkualitas untuk pembuatan kapal, permintaan terhadap kapal dagang berukuran besar semakin menurun. Kondisi tersebut menyebabkan industri galangan kapal tradisional mengalami kemunduran, sehingga banyak pengrajin kehilangan mata pencaharian yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka.¹⁴³

Di bidang pertanian, kebijakan VOC juga memengaruhi perdagangan hasil pangan di wilayah Maros, Gowa, dan Takalar. Sebelum dikuasai VOC, Kerajaan Gowa-Tallo memiliki sistem irigasi dan penyimpanan hasil panen yang mendukung produksi beras dalam jumlah besar untuk diperdagangkan ke kepulauan rempah. Setelah VOC menguasai Makassar, diterapkan sistem penyerahan wajib hasil panen serta monopoli pembelian beras dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi tentara dan pegawai kolonial. Akibatnya, para petani memperoleh keuntungan yang lebih kecil sehingga semangat untuk meningkatkan produksi pertanian ikut menurun. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kesejahteraan petani dan melambatnya perkembangan sektor pertanian di wilayah pedalaman.¹⁴⁴

Akibat berbagai kebijakan VOC, kondisi perekonomian masyarakat Makassar mengalami kemunduran. Sebelum Perang Makassar, kegiatan perdagangan di Somba Opu telah menggunakan berbagai jenis mata uang, seperti koin emas, koin perak Spanyol (*real*), dan koin tembaga sebagai alat tukar dalam transaksi perdagangan. Namun, setelah perdagangan luar negeri menurun dan akses terhadap permodalan dibatasi oleh VOC, jumlah uang yang beredar di pasar semakin berkurang. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat kembali menggunakan sistem barter untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perubahan ini menunjukkan terjadinya kemunduran dalam aktivitas ekonomi masyarakat dibandingkan dengan masa ketika Makassar masih menjadi pusat perdagangan internasional.¹⁴⁵

143 Hamid, Sejarah Maritim Indonesia.h.85

144 Poelinggomang, Makassar abad XIX: studi tentang kebijakan perdagangan maritim.h.35

145 Reid, Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 2: Jaringan Perdagangan Global.h.65

Kebijakan ekonomi VOC juga berdampak pada kehidupan para saudagar lokal di Makassar. Sebelum terjadinya konflik, para saudagar bumiputera memiliki peran penting dalam kegiatan perdagangan dan menempati posisi yang cukup tinggi dalam kehidupan ekonomi kerajaan. Namun, setelah banyak kapal dan barang dagangan mereka dirampas serta akses terhadap modal semakin terbatas, para saudagar tersebut tidak lagi mampu bersaing dengan VOC yang memiliki dukungan modal dan kekuatan militer. Akibatnya, banyak saudagar lokal mengalami kebangkrutan, terlilit utang kepada perantara VOC, atau beralih menjadi pedagang kecil dengan keuntungan yang lebih sedikit. Kondisi ini menyebabkan peran saudagar bumiputera dalam menggerakkan perekonomian Makassar semakin melemah.¹⁴⁶

Secara umum, konflik antara Kerajaan Gowa-Tallo dan VOC mengubah peran Makassar dalam kegiatan ekonomi di Nusantara. Makassar yang sebelumnya berkembang sebagai pusat perdagangan yang mandiri berubah menjadi wilayah yang berada di bawah kendali sistem ekonomi kolonial VOC. Edward L. Poelinggomang menjelaskan bahwa VOC sengaja menerapkan kebijakan yang membuat Sulawesi Selatan bergantung pada kekuasaan kolonial sehingga tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk menyaingi Batavia. Akibatnya, sumber daya alam dan tenaga kerja masyarakat Sulawesi Selatan lebih banyak dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan ekonomi VOC daripada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.¹⁴⁷

Kebijakan ekonomi yang diterapkan VOC setelah Perjanjian Bongaya tidak hanya berdampak dalam waktu singkat, tetapi juga memengaruhi perkembangan ekonomi Sulawesi Selatan pada masa-masa berikutnya. Kebijakan yang diberlakukan sejak Perjanjian Bongaya tahun 1667 menyebabkan perkembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan berjalan lebih lambat dibandingkan wilayah yang menjadi pusat pemerintahan kolonial di Jawa. Kondisi tersebut

146 Yani, *Melintasi Rentang Waktu: Eksistensi Masyarakat Bugis-Makassar Pasca Perang Melawan VOC Belanda*.h.50

147 Poelinggomang, *Makassar abad XIX: studi tentang kebijakan perdagangan maritim*.h.55

menunjukkan bahwa dampak Perang Makassar tidak hanya berupa kekalahan di bidang militer, tetapi juga menjadi awal dari kemunduran ekonomi yang berlangsung dalam jangka panjang dan memengaruhi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.¹⁴⁸

C. Dampak terhadap Struktur Sosial Politik

Konflik antara Kerajaan Gowa-Tallo dan VOC serta kekalahan dalam Perang Makassar membawa perubahan besar terhadap struktur sosial politik dan peta kekuasaan di kawasan timur Nusantara. Salah satu dampak yang paling nyata setelah ditandatanganinya Perjanjian Bongaya adalah berakhirnya kekuasaan dan pengaruh Kerajaan Gowa-Tallo di Sulawesi Selatan. Sejak abad ke-16 hingga awal abad ke-17, Kerajaan Gowa-Tallo berhasil menyatukan berbagai kerajaan Bugis, Makassar, dan Mandar dalam suatu hubungan politik yang didasarkan pada ikrar kesetiaan *Rua karaeng se're ata* (dua raja, satu hamba) serta sistem perjanjian dengan kerajaan-kerajaan yang berada di bawah pengaruhnya. Namun, kemenangan VOC yang didukung oleh sekutu-sekutu lokal mengakhiri tatanan politik tersebut dan melemahkan persatuan antarkerajaan yang selama ini menjadi dasar kekuatan politik dan maritim Kerajaan Gowa-Tallo.¹⁴⁹

Kekalahan dalam Perang Makassar juga menyebabkan Kerajaan Gowa-Tallo kehilangan sebagian besar kekuasaan politik dan wilayahnya. Berdasarkan ketentuan Perjanjian Bongaya, Sultan Hasanuddin harus melepaskan kekuasaan atas berbagai wilayah di luar daerah inti Gowa, seperti Kerajaan Bima dan Sumbawa di Nusa Tenggara, Kesultanan Buton, Pulau Selayar, serta pesisir Kalimantan Timur. Selain itu, Kerajaan Gowa-Tallo juga tidak lagi memiliki kekuasaan atas kerajaan-kerajaan Bugis, seperti Bone, Soppeng, dan Wajo. Berkurangnya wilayah kekuasaan tersebut menyebabkan kedudukan Gowa berubah dari kerajaan maritim yang memiliki

¹⁴⁸ Hamid, Sejarah Maritim Indonesia.h.90

¹⁴⁹ Andaya, “Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17, terj”, h.156

pengaruh luas menjadi kerajaan yang hanya berpusat di wilayah pesisir barat Sulawesi Selatan.¹⁵⁰

Setelah kekuasaan Kerajaan Gowa-Tallo melemah, terjadi perubahan dalam keseimbangan politik di Sulawesi Selatan dengan munculnya Kerajaan Bone sebagai kekuatan baru di bawah kepemimpinan Arung Palakka. Leonard Y. Andaya menjelaskan bahwa dengan dukungan militer dan politik dari VOC, Arung Palakka diangkat menjadi Raja Bone dan memiliki pengaruh yang besar dalam mengatur kondisi politik di Sulawesi Selatan. Dengan kedudukannya tersebut, Arung Palakka memperluas pengaruh Bone terhadap kerajaan-kerajaan yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Gowa. Kondisi ini menyebabkan pusat kekuasaan di Sulawesi Selatan berpindah dari Gowa ke Bone, sementara VOC tetap mempertahankan pengaruhnya melalui keberadaan Fort Rotterdam. Perubahan tersebut juga memengaruhi hubungan politik antarkerajaan di Sulawesi Selatan yang semakin dipengaruhi oleh kebijakan *divide et impera* yang diterapkan oleh VOC.¹⁵¹

Sebagai bagian dari upaya melemahkan kekuatan Kerajaan Gowa-Tallo, VOC menerapkan kebijakan penghancuran benteng-benteng pertahanan di wilayah pesisir. Benteng Somba Opu yang menjadi pusat pemerintahan dan simbol kekuatan Kerajaan Gowa-Tallo dihancurkan setelah berakhirnya perang pada tahun 1669. Benteng-benteng lain, seperti Benteng Barombong, Panakkukang, Garassi, dan Mariso, juga mengalami nasib yang sama. Sementara itu, Benteng Ujung Pandang tidak dihancurkan karena diambil alih oleh VOC dan diubah menjadi Fort Rotterdam. Benteng tersebut kemudian dijadikan sebagai pusat pertahanan militer dan pemerintahan VOC di Sulawesi Selatan.¹⁵²

Kekalahan dalam Perang Makassar dan hilangnya kedaulatan kerajaan juga menimbulkan dampak terhadap kondisi sosial dan politik di lingkungan Kerajaan Gowa-Tallo. Di kalangan bangsawan kerajaan muncul perbedaan sikap dalam

150 Hamid, Sejarah Maritim Indonesia.h.88

151 Andaya, "Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17, terj", h.163

152 Poelinggomang, Makassar abad XIX: studi tentang kebijakan perdagangan maritim.h.46

menghadapi kekuasaan VOC. Sebagian tokoh, seperti Karaeng Karunrung dan Karaeng Bontomarannu, memilih untuk terus melakukan perlawanan dan menolak tunduk kepada VOC. Sementara itu, sebagian bangsawan lainnya memilih menjalin kerja sama dengan VOC sebagai upaya mempertahankan keberlangsungan pemerintahan Kerajaan Gowa-Tallo. Perbedaan sikap tersebut menimbulkan perpecahan di kalangan elite kerajaan dan melemahkan persatuan politik serta stabilitas pemerintahan Makassar setelah perang berakhir.¹⁵³

Salah satu dampak sosial dan politik setelah Perjanjian Bongaya adalah terjadinya perpindahan besar-besaran masyarakat Bugis-Makassar ke berbagai wilayah di Nusantara. Banyak prajurit, bangsawan, dan pelaut dari Gowa, Wajo, serta daerah pesisir lainnya memilih meninggalkan kampung halaman karena tidak menerima kekuasaan VOC dan perubahan politik yang terjadi setelah perang. Mereka berlayar menuju berbagai daerah, seperti Kepulauan Riau, Selangor, Johor, Semenanjung Malaya, Kalimantan, pesisir utara Jawa, dan Nusa Tenggara. Perpindahan tersebut menjadi salah satu gelombang diaspora terbesar pada abad ke-17 dan turut menyebarkan tradisi pelayaran serta pengaruh masyarakat Bugis-Makassar ke berbagai wilayah di Nusantara.¹⁵⁴

Gelombang diaspora tersebut membawa perubahan besar terhadap kondisi sosial dan politik masyarakat Bugis-Makassar. Setelah meninggalkan Sulawesi Selatan, banyak di antara mereka tidak lagi menjadi bagian dari kerajaan yang berkuasa, tetapi menjalani kehidupan sebagai pelaut, prajurit, dan perantau di berbagai wilayah Nusantara. Pemerintah kolonial Belanda sering menyebut mereka sebagai perompak karena menolak tunduk pada aturan VOC. Namun, di daerah tujuan perantauan, masyarakat Bugis dan Makassar justru memiliki peran penting dalam kehidupan politik. Mereka menjadi prajurit, membantu menentukan pergantian kekuasaan di beberapa kerajaan Melayu, serta berperan dalam berdirinya pemerintahan

¹⁵³ Arief et al., "Makassar war in the perspective of the Indonesian total war", h.298

¹⁵⁴ Yani, *Melintasi Rentang Waktu: Eksistensi Masyarakat Bugis-Makassar Pasca Perang Melawan VOC Belanda*.h.55

baru, seperti di Kesultanan Selangor dan Kesultanan Riau-Lingga. Selain itu, mereka juga membangun jaringan perdagangan baru di berbagai wilayah sebagai bentuk perlawanan terhadap monopoli perdagangan VOC.¹⁵⁵

Meskipun berada di bawah kekuasaan kolonial VOC, masyarakat Bugis-Makassar tetap mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan politik yang terjadi setelah Perjanjian Bongaya. Mereka mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, seperti tradisi kebaharian, *siri' na pacce*, serta semangat kemandirian dalam kehidupan sosial. Selain itu, masyarakat juga tetap mempertahankan peran lembaga adat *Ade'* dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun berada di bawah tekanan kekuasaan VOC, masyarakat Bugis-Makassar masih mampu menjaga identitas budaya dan kehidupan sosial mereka.¹⁵⁶

Semangat perlawanan masyarakat Makassar terhadap kekuasaan VOC juga tetap terpelihara melalui tradisi sastra dan budaya lisan. Karya-karya seperti *Syair Perang Mengkasar* (*Sha'ir Sipelman*) yang ditulis oleh Encik Amin serta tradisi lisan Sinrili' menjadi sarana untuk mengenang perjuangan Sultan Hasanuddin dan peristiwa Perang Makassar. Selain menceritakan jalannya peperangan, karya-karya tersebut juga berperan dalam mewariskan nilai-nilai keberanian, semangat mempertahankan kedaulatan, dan kecintaan terhadap tanah air kepada generasi berikutnya. Melalui tradisi sastra dan lisan tersebut, nilai-nilai tentang kebebasan berlayar dan semangat mempertahankan martabat Kerajaan Makassar tetap terjaga meskipun kerajaan telah berada di bawah kekuasaan VOC.¹⁵⁷

Konflik antara VOC dan Kerajaan Gowa-Tallo pada abad ke-17 memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan sosial dan politik masyarakat Sulawesi

155 Yani. Melintasi Rentang Waktu: Eksistensi Masyarakat Bugis-Makassar Pasca Perang Melawan VOC Belanda.h.60

156 Rasyid et al., "Reinterpreting historical traces: the socio-political dynamics of Bugis-Makassar Society after the 17th-Century Bungaya Treaty", 4-8

157 "Syair Perang Mengkasar (Shair Sipelman) Karya Entji Amin: Analisis Anakronisme Dan Patronase."

Selatan. Abdul Rahman Hamid menjelaskan bahwa penaklukan Makassar dan lahirnya Perjanjian Bongaya menjadi awal perubahan besar dalam sejarah maritim Nusantara karena kekuasaan atas jalur pelayaran dan perdagangan mulai berada di bawah kendali kolonial Belanda. Meskipun demikian, berbagai bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Kerajaan Gowa-Tallo dan masyarakat Bugis-Makassar menunjukkan bahwa semangat untuk mempertahankan kebebasan berlayar, kedaulatan, dan kemandirian tetap menjadi bagian penting dari sejarah maritim Sulawesi Selatan.¹⁵⁸

Dinamika konflik antara Kerajaan Gowa-Tallo dan VOC dapat dipahami melalui Teori Konflik Karl Marx yang memandang konflik sebagai akibat pertentangan kepentingan dalam memperebutkan sumber daya ekonomi dan kekuasaan.¹⁵⁹ Kerajaan Gowa-Tallo mempertahankan sistem perdagangan terbuka, sedangkan VOC berusaha menerapkan monopoli perdagangan rempah-rempah untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Pertentangan tersebut berkembang dari persaingan perdagangan menjadi konflik politik dan militer. Selanjutnya, berdasarkan Teori Perubahan Sosial Max Weber, konflik dan Perjanjian Bongaya membawa perubahan besar terhadap struktur politik dan ekonomi Kerajaan Gowa-Tallo, ditandai dengan berakhirnya sistem perdagangan bebas serta menguatnya dominasi VOC di kawasan timur Nusantara.

Rangkaian peristiwa sejak awal hubungan dagang hingga Perjanjian Bongaya menunjukkan bahwa hubungan Kerajaan Gowa-Tallo dan VOC berubah dari kerja sama perdagangan menjadi konflik terbuka akibat perbedaan kepentingan dalam penguasaan perdagangan maritim. Konflik tersebut tidak hanya mengakhiri kebijakan perdagangan bebas Makassar, tetapi juga menjadi titik awal perubahan struktur politik dan ekonomi di Sulawesi Selatan yang selanjutnya memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat pada masa berikutnya.

¹⁵⁸ van der Kroef dan Resink, "Indonesia's History Between the Myths: Essays in Legal History and Historical Theory."

¹⁵⁹ Prayogi et al., "Konsep Konflik dan Teori Konflik Sosial dalam Pemikiran Karl Marx."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Simpulan penelitian ini yaitu:

1. Prinsip *Mare Liberum* yang diterapkan Kerajaan Gowa-Tallo menjadi salah satu faktor utama munculnya konflik dengan VOC pada abad XVII. Kerajaan Gowa membuka pelabuhan Makassar bagi seluruh pedagang tanpa membedakan asal negara, sehingga berkembang sebagai pusat perdagangan internasional. Sebaliknya, VOC berusaha menerapkan sistem monopoli perdagangan rempah melalui prinsip *Mare Clausum* yang membatasi kebebasan pelayaran. Perbedaan kepentingan tersebut melahirkan pertentangan dalam bidang perdagangan, diplomasi, dan politik yang kemudian berkembang menjadi konflik terbuka.
2. Konflik antara Kerajaan Gowa-Tallo dan VOC berkembang secara bertahap dari persaingan perdagangan menjadi peperangan berskala besar. Ketegangan diawali oleh penolakan Kerajaan Gowa terhadap tuntutan monopoli VOC, kemudian meningkat melalui blokade perdagangan, penyitaan kapal dagang Makassar, serta kegagalan berbagai upaya diplomasi. Konflik mencapai puncaknya dalam Perang Makassar (1666–1669) yang melibatkan aliansi VOC dengan Arung Palakka dari Bone. Kekalahan Kerajaan Gowa-Tallo kemudian melahirkan Perjanjian Bongaya sebagai dasar penguasaan politik dan ekonomi VOC di Sulawesi Selatan.
3. Konflik VOC dan Makassar memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan ekonomi, perdagangan maritim, serta struktur sosial politik di Sulawesi Selatan. Penerapan monopoli perdagangan oleh VOC menyebabkan berakhirnya sistem perdagangan bebas yang sebelumnya berkembang di Pelabuhan Somba Opu, menurunkan aktivitas ekonomi masyarakat, dan

mengalihkan pusat perdagangan ke bawah kendali VOC. Selain itu, Perjanjian Bongaya mengurangi kedaulatan politik Kerajaan Gowa-Tallo, mengubah keseimbangan kekuasaan regional, serta mendorong terjadinya diaspora masyarakat Bugis-Makassar ke berbagai wilayah Nusantara. Meskipun demikian, nilai-nilai kebaharian, semangat kebebasan berlayar, dan identitas maritim masyarakat Bugis-Makassar tetap bertahan sebagai bagian dari warisan sejarah maritim Indonesia.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai sejarah maritim Makassar dengan memanfaatkan lebih banyak sumber primer, seperti arsip VOC, lontaraq, maupun catatan perjalanan bangsa Eropa dan Asia, sehingga diperoleh analisis yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan antara kerajaan-kerajaan Nusantara dan kekuatan kolonial.
2. Bagi Program Studi Sejarah Peradaban Islam, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan kajian sejarah maritim Indonesia, khususnya mengenai peran Kerajaan Gowa-Tallo dalam perdagangan internasional, dinamika kolonialisme, serta perkembangan sejarah Islam di kawasan timur Nusantara.
3. Bagi masyarakat dan pembaca, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya posisi Kerajaan Gowa-Tallo dalam sejarah maritim Indonesia serta menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai kedaulatan, kebebasan pelayaran, dan semangat mempertahankan kepentingan bangsa yang tercermin dalam perjuangan masyarakat Makassar menghadapi monopoli VOC.
4. Bagi pemerintah dan pemerhati sejarah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pelestarian situs-situs sejarah maritim, seperti kawasan Benteng Somba Opu dan Fort Rotterdam, serta

mendorong penguatan literasi sejarah maritim sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya bangsa.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abd. Rahman Hamid, Rifal, Asmunandar. "Perkembangan Makassar Menjadi Kota Pelabuhan Dunia di Jalur Rempah Abad XVII." *Jalurrempah*, no. December (2021).

Abdullah, A. "The Kingdom of Bone in the historical trajectory of South Sulawesi (a political and power upheaval in searching, discovering, upholding and defending the values of the Bugis cultural entity)." *Cultural Lens: Scientific Journal of the Humanities* 12, no. 2 (2017).

Abdurrahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2011.

Adam, A. "Relevansi Perjanjian Bongaya 1667 dan 1824 dalam Perubahan Sosial Politik antara Kerajaan Gowa dan Belanda (VOC)." IAIN Parepare, 2025.

Akhmar, Andi Muhammad, Fathu Rahman, dan Hidayatullah Yunus. "Budaya maritim orang Bugis Makassar dan arah transformasinya." *Jurnal Ilmu Budaya* 12, no. 1 (2024).

Akib, S, Z Nurhillal, R Ulum, A Amanda, R A Nofandi, M S Panggabean, dan B Bulkis. *Pengantar Ilmu Sosial: Memahami Masyarakat dalam Dinamika Perubahan*. Seval Literindo Kreasi, 2025.

Andaya, Leonard Y. "Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17, terj." *Nurhadi Simorok. Makassar: Inninawa*, 2004.

Arief, Ruslan, I Wayan Midhio, Helda Risman, Syaiful Anwar, dan Lukman Yudho Prakoso. "Makassar war in the perspective of the Indonesian total war." *Journal of Social and Political Sciences* 4, no. 2 (2021).

Badriah, H N. "Kebijakan Laut Bebas (Mare Liberum) Sultan Alauddin setelah Masuknya Islam di Gowa Abad XVI–XVII." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

Baharuddin. *Pengantar Sosiologi*. Sanabil, 2021.

- Bastari, Avando. "Budaya Maritim dalam Perspektif Ketahanan Nasional." *Madza Media: Jakarta*, 2021.
- Boxer, C R. "Jan Kompeni Sejarah VOC Dalam Perang dan Damai 1602-1799, terj." *Bakri Siregar, Jakarta: Sinar Harapan*, 1983.
- . "Sejarah VOC dalam perang dan damai 1602-1799.[Edisi Terjemahan]." *Jakarta: Sinar Harapan*, 1983.
- Fitriana, Aulia. "MAKASSAR SEBAGAI KOTA MARITIM." *Makassar sebagai Kota Maritim*, 2017.
- Giddens, Anthony. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press, 2021.
- Goa, Lorentius. "Perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat." *SAPA: Jurnal Kateketik Dan Pastoral* 2, no. 2 (2017).
- Hamid, A R, dan A Rifal. *Perkembangan Makassar Menjadi Kota Pelabuhan Dunia Di Jalur Rempah Abad XVII*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021.
- Hamid, Abdul Rahman. *Sejarah Maritim Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Harun, Umar. "Buku: Politik Kebijakan Poros Maritim," 2020.
- Hasim, R. "Dari Monopoli Hingga Pelabuhan Bebas: Aktivitas Perdagangan di Karesidenan Ternate 1854–1930." *SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities* 3, no. 2 (2019).
- Hasriyana Nur Badriyah. "Prinsip Laut Bebas (Mare Liberum) Sultan Alauddin Setelah Masuknya Islam di Gowa Abad XVI-XVII," 2021.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press, 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Kroef, Justus M van der, dan G J Resink. "Indonesia's History Between the Myths: Essays in Legal History and Historical Theory." *Pacific Affairs*, 1968. <https://doi.org/10.2307/2754590>.

- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- Makkelo, Ilham Daeng. “Sejarah Makassar dan Tradisi Literasi.” *Lembaran Sejarah* 15, no. 1 (2020): 30. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.59523>.
- Mery, L. *Hukum Laut: Kajian Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia*. Tohar Media, 2024.
- Mukhlis, P, E Poelinggomang, A M Kallo, B Sulisty, A Thosibo, dan A Maryam. *Sejarah Kebudayaan Sulawesi*. Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1995.
- Mulya, L. “Postur Maritim Indonesia: Pengukuran melalui Teori Mahan.” *Lembaran Sejarah* 10, no. 2 (2013).
- Plummer, Ken. *Sociology: A Global Introduction*. Harlow: Pearson Education Limited, 2022.
- Poelinggomang, Edward L. *Makassar abad XIX: studi tentang kebijakan perdagangan maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002.
- . *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 1*. Diedit oleh dkk. Makassar: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, 2004.
- Prayogi, A, R Nasrullah, S Setiawan, dan M A Setyawan. “Konsep Konflik dan Teori Konflik Sosial dalam Pemikiran Karl Marx.” *SiNORA* 1, no. 1 (2025).
- Rahayu, D R. “Dampak Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz terhadap Perkembangan Sosial Politik Islam (99–101 H / 717–720 M).” IAIN Parepare, 2020.
- Rasyid, Surayah, Ahmad Yani, Saidin Hamzah, dan Aksa Aksa. “Reinterpreting historical traces: the socio-political dynamics of Bugis–Makassar Society after the 17th-Century Bungaya Treaty.” *Cogent Arts & Humanities* 13, no. 1 (2026): 2604957.
- Reid, Anthony. *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 1: Tanah di Bawah Angin*. Vol. 1. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 1992.
- . *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 2: Jaringan Perdagangan Global*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- . “Pluralism and progress in seventeenth-century Makassar.” In *Authority and Enterprise*, 55–71. Brill, 2000.

- . “Southeast Asia in the age of commerce 1450--1680: Volume 2: Expansion and crisis.” *New Haven and London*, 1993.
- . “The Rise of Makassar.” *Review of Indonesian and Malayan Affairs* 17 (1983). <https://search.informit.org/doi/10.3316/intanmas.42>.
- Saraswati, M, M Marsetio, R Rudiyanto, P Widodo, H R J Saragih, K Kristijarso, dan P Suwarno. “Perspektif Maritim Indonesia dalam Strategi Diplomasi dan Konektivitas Jalur Laut.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, no. 10 (2024): 4031–41.
- Sinaga, R, T R Fahlevi, R G Lumbantoruan, dan H Berutu. “Kongsi Dagang Inggris (EIC) dan Belanda (VOC): Pengaruhnya dalam Jaringan Perdagangan Antar Benua.” *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation* 1, no. 2 (2024).
- Sinaga, T B, S D L Roeroe, J M Korua, R A Taroreh, dan V F Taroreh. “Wilayah Negara sebagai Salah Satu Unsur Esensial Negara Menurut Hukum Internasional.” *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022).
- Siryayasa, I Nyoman, dan M Syahrul Yasin. “Pelabuhan, Perdagangan dan Ekonomi: Makassar dalam Kurun Niaga di Asia Tenggara.” *PELABUHAN, PERDAGANGAN DAN EKONOMI: MAKASSAR DALAM KURUN NIAGA DI ASIA TENGGARA* 3, no. 2 (2019).
- Sritimuryati, Tini Suryaningsi. “PERDAGANGAN MARITIM DI MAKASSAR ABAD XVI-XVII,” n.d.
- Sulasman, H, dan M Hum. “Metodologi penelitian sejarah.” *Bandung: Pustaka Setia*, 2014.
- Suryaningsi, Tini, Balai Arkeologi, dan Sulawesi Selatan. “PERDAGANGAN MARITIM DI MAKASSAR ABAD XVI- XVII” 12, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.36869/wjsb.v12i2.232>.
- Sutherland, Heather. “Trade, court and company.” *Hof en handel: Aziatische vorsten en de VOC, 1620 1720* (2004).
- “SYAIR PERANG MENGKASAR (SHAIR SIPELMAN) KARYA ENTJI AMIN:

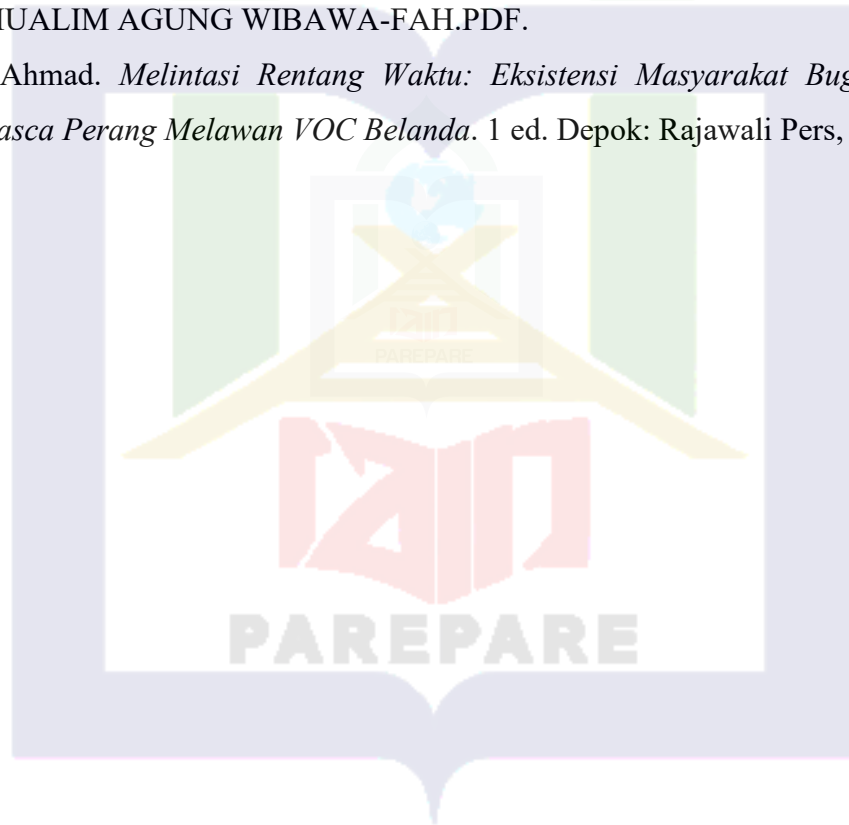
ANALISIS ANAKRONISME DAN PATRONASE.” *BASASTRA: JURNAL KAJIAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA* 13, no. 1 SE-Articles (n.d.).
<https://doi.org/10.24114/bss.v13i1.56486>.

Varma, S P. *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021.

Wastuti, Asih, dan Sunny Ummul Firdaus. “Reformasi Pemerintahan dan Peran Politik Hukum dalam Membentuk Kebijakan Publik.” *Sovereignty* 2, no. 4 (2023).

Wibawa, Mualim Agung. *Peranan Kerajaan Gowa Dalam Perniagaan Abad Xvii*.
Repository UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3583/1/97604-MUALIM AGUNG WIBAWA-FAH.PDF](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3583/1/97604-MUALIM%20AGUNG%20WIBAWA-FAH.PDF).

Yani, Ahmad. *Melintasi Rentang Waktu: Eksistensi Masyarakat Bugis-Makassar Pasca Perang Melawan VOC Belanda*. 1 ed. Depok: Rajawali Pers, 2024.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Sk Pembimbing



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
NOMOR : B-1330/In.39/PP.00.9/PPs.05/06/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

- Menimbang**
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2025
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :**
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2307381/2024, tanggal 04 Juni 2025 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2025
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: B-1330/In.39/FUAD.03/PP.00.9/06/2025 Tahun 2025, tanggal 04 Juni 2025 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah;
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan :**
- Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2025
 - Menunjuk saudara: **Dr. Ahmad Yani, M.Hum.**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
Nama Mahasiswa : ABDUL AZIS
NIM : 2220203880230008
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Judul Penelitian : PERANAN KHALIFAH HARUN AL-RASYID DALAM PERKEMBANGAN PERADABAN ISLAM DI KOTA BAGHDAD TAHUN 786-809 M
 - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 04 Juni 2025
Dekan.



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP 196412311992031045

Lampiran 2. Sk Bebas Pustaka



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: perpustakaan@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
No.: B-1026/In.39/UPS.09/HM.02.0/07/2026

Kepala UPT. Perpustakaan IAIN Parepare menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	: Abdul Azis
NIM	: 2220203880230008
Fakultas	: Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Prodi	: Sejarah Peradaban Islam

Benar telah bersih dari pinjaman pustaka di UPT. Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Bukti bebas pustaka ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

6 Juli 2026

Kepala UPT. Perpustakaan



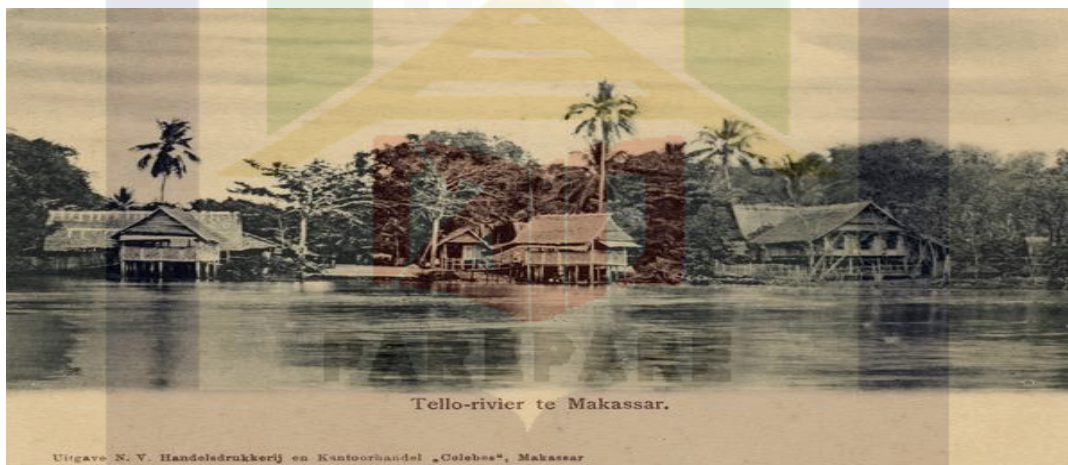
Azaliyatulhidayah
Azaliyatulhidayah

Catatan : Mahasiswa yang mengambil cuti kuliah, jika aktif kembali harap membawa slip pembayaran SPP/UKT semester berjalan ke Perpustakaan

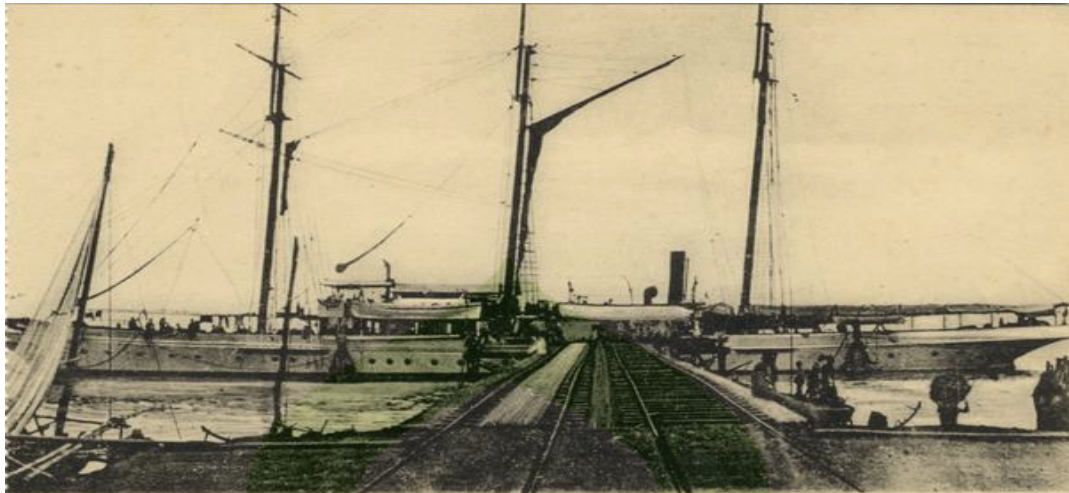
Lampiran 3. Dokumentasi (Foto Arsip)



Link Akses : <https://www.nationaalarchief.nl/beleven/onderwijs/bronnenbox/makassar-1667>



Link Akses: <http://hdl.handle.net/1887.1/item:853550>



33. Kolensteiger te Makassar.

Link Akses: <http://hdl.handle.net/1887.1/item:851944>



Overvaart te Kasi-djala bij Maros.

Link Akses: <http://hdl.handle.net/1887.1/item:856627>



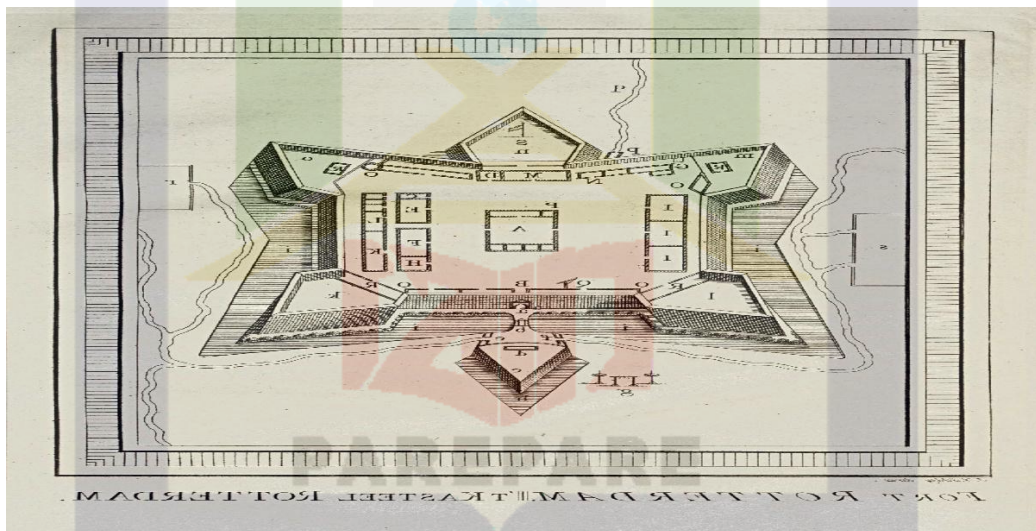
Link Akses: <http://hdl.handle.net/1887.1/item:853073>



Link Akses: <http://hdl.handle.net/1887.1/item:837401>

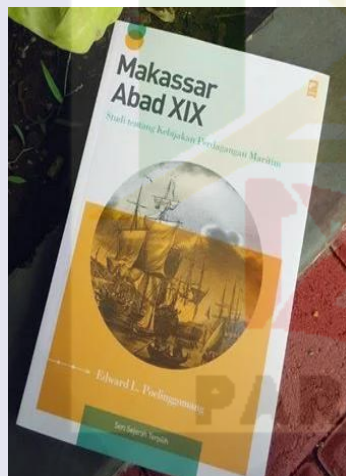
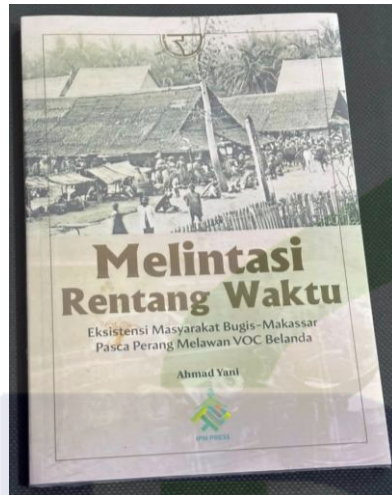


Link Akses: <http://hdl.handle.net/1887.1/item:856387>

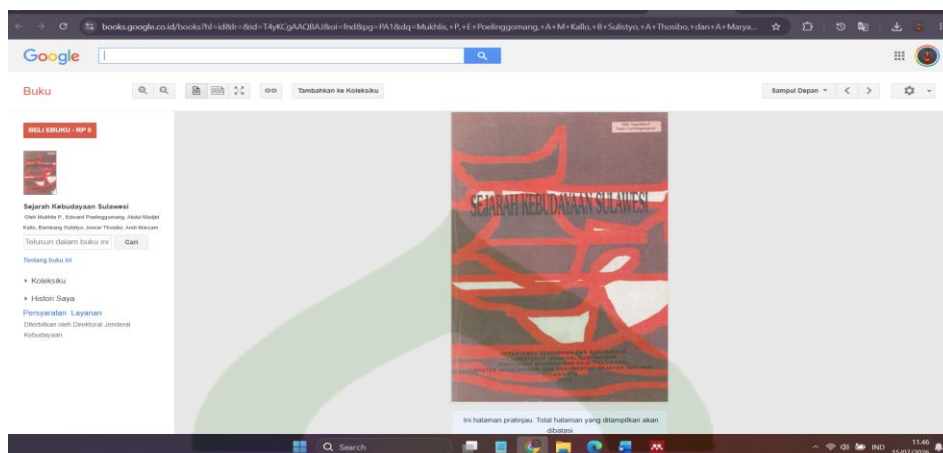


Link Akses: https://en.wikipedia.org/wiki/File:AMH-8028_KB_Floor_plan_of_Fort_Rotterdam_at_Makassar.jpg

Lampiran 4. Buku Fisik



Lamiran 5. E-Book



Link Akses:

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=T4yKCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Mukhlis,+P,+E+Poelinggomang,+A+M+Kallo,+B+Sulistyo,+A+Thosibo,+dan+A+Maryam.+Sejarah+Kebudayaan+Sulawesi.+Direktorat+Jenderal+Kebudayaan,+1995.&ots=bMRXnGBeAw&sig=cd9ZPX9N3c0tTZRAjS00RzYmAY8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

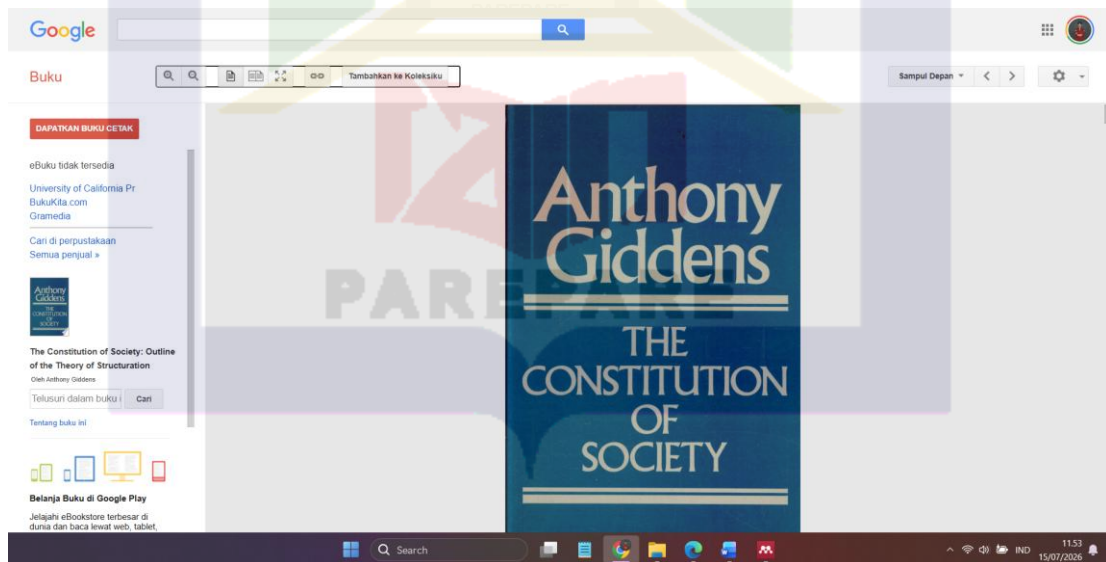


Link Akses: <https://www.koleksilokal.com/2022/01/sejarah-sulawesi-selatan.html>



Link Akses:

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=TQcUEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Mery,+L.+Hukum+Laut:+Kajian+Indonesia+sebagai+Poros+Maritim+Dunia.+Tohar+Media,+2024.&ots=gwg8Qoy8hH&sig=Dx6BO9MUMhLpKwAKRR0vBaTlhQQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false



Link Akses:

<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=x2bf4g9Z6ZwC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Giddens,+Anthony.+The+Constitution+of+Society:+Outline+of+the+Theory+of>

[+Structuration.+Cambridge:+Polity+Press,+2021.&ots=jP-M0stBeC&sig=j_mcfx1Ajs1oY09NBG6ZiDng1aM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](#)



Lampiran 6. Turnitin

SKRIPSI ABDUL AZIS.docx

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iainpare.ac.id

Internet Source

2

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

3

Submitted to iainpare

Student Paper

4

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

5

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

6

Submitted to Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Student Paper

7

Tati Haryati, A. Gafar Hidayat, Subhan. "Telaah Historis; Kedudukan Kesultanan Goa-Ta Dlam Penyebarluasan Agama Islam Di Bima pada Abad XVII", JURNAL PENDIDIKAN IPS, 2021

Publication

8

pakdosen.unhas.ac.id

Internet Source

9

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

10

ejournal.radenintan.ac.id

Internet Source

11

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

12

kebudayaan.kemdikbud.go.id

Internet Source

13

Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar

Student Paper

14

repositori.kemdikbud.go.id

Internet Source

BIODATA PENULIS



Abdul Azis lahir di Pinrang pada tanggal 22 Desember 2004. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Rasyid dan Ibu Mariana. Penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri Galung pada tahun 2010–2012. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SD Alhilal Waelata pada tahun 2012–2015, kemudian pindah ke SD Inpres Karampuang dan menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 2016. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di MTs Raodhatut Thalibin Mamuju pada tahun 2016–2019, kemudian melanjutkan ke MA Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan jenjang Strata Satu (S1) di Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare, penulis aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan. Penulis pernah menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam (HM-PS SPI) dan dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum periode 2024–2025. Selain itu, penulis juga aktif di Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (SEMA FUAD) dengan amanah sebagai Ketua Komisi Program Kerja (Komisi B). Penulis juga mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kadingeh, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam bidang akademik, penulis aktif menyusun dan mempublikasikan karya ilmiah. Artikel berjudul "Integrasi Islam dalam Struktur Pemerintahan dan Kehidupan Sosial Kedatuan Suppa di Ajatappareng Abad ke-17 Masehi" merupakan karya ilmiah yang disusun oleh penulis. Selain itu, penulis juga berkolaborasi dengan dosen dalam penulisan artikel ilmiah berjudul "Relevansi Islam dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Ungkapan Tradisional Bima". Sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum.), penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul "Prinsip Laut Bebas (*Mare Liberum*) dan Dinamika Konflik VOC Makassar Abad XVII."